



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAYA TARIK INVESTASI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

**ANDRI SATRIA MASRI
NPM: 0806429706**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**JAKARTA
DESEMBER 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAYA TARIK INVESTASI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.) pada Program Studi Magister Perencanaan
dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**

**ANDRI SATRIA MASRI
NPM: 0806429706**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH**

**JAKARTA
DESEMBER 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ANDRI SATRIA MASRI

NPM : 0806429706

Tanda Tangan :

Tanggal : Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : ANDRI SATRIA MASRI
NPM : 0806429706
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAYA TARIK
INVESTASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Pembimbing : HERA SUSANTI, S.E., M.SC (.....)

Penguji : DR. IR. WIDYONO SOETJIPTO (.....)

Penguji : DR. NUZUL ACHJAR (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Desember 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Hera Susanti, S.E., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak B. Raksaka Mahi, Ph.D, mantan Ketua Program Studi MPKP FEUI dan Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D, Ketua Program Studi MPKP FEUI beserta staf dan karyawan baik langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran studi saya di MPKP FEUI ini.
- (3) Pusat Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan dan Perencanaan (Pusbindiklatren) Bappenas beserta karyawannya yang telah menyelenggarakan program beasiswa untuk seluruh PNS di Indonesia sehingga saya bisa menempuh pendidikan di universitas bergengsi di Indonesia dengan beasiswa.
- (4) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya yang telah banyak membantu baik motivasi, dana serta dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan;
- (5) Kedua orang tua saya **St. Masri** dan **Asni**, Tek Nan, kakak dan adik-adik tercinta: Endriza S.Pd, Susi Masri, A.Md dan Arif Masri di Padang. Juga Mama, Papa dan adik-adik di Muaro Bungo Kab. Bungo Prop. Jambi. Teristimewa kepada istri tercinta **Elvina** dan kedua anak saya **Aesha Nabila Putri** dan **Muhammad Elvandra Dzakwan** atas dorongan dan motivasi serta kerelaannya untuk berjauhan selama menempuh studi ini.
- (6) Sahabat-sahabat Forahmi di Jakarta yang turut meringankan beban kuliah dengan berbagai kegiatan-kegiatan silaturahmi: uda Rinaldi Syam dan

keluarga, Benny Andre Kusuma, Ulya, Asriyon Roza, Jon Mukhlis dan Umi Kurniasih, Ali Unan, Ardian Hamdani, Yan Syafrin, Oyong Darwan, Ardian Nova dan Isnadiati, Syarli Mubaraq dan Dolly, Budi Harlon, Fitria Yolanda, Doni Haye, dan masih banyak nama-nama yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

- (7) Sahabat, rekan kerja, atasan dan mantan atasan di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman: uncu Jonpriadi, ibu Emi, pak Sudirman, uda Syafrimen, uni Feni, uda Sepno, Datuk Zamzamil, pak Eri, uda Jonriswan, Anih Chili, uni Bet, uni Ema, Ranti Iskasari, Mitra, Fauzi Al Azhar, uni Erny Syagli, uda Zahirman dan masih banyak nama-nama yang juga tidak dapat saya tuliskan satu persatu.
- (8) Rekan-rekan di MPKP FEUI Angkatan XIX Pagi Bappenas: Anton Setiadi, Desira Albertine (Dea Ndut), Dessy Suziana, Dian Kartikasari (*Backpacker*), Dyah Pramestinindyah Wikan (Notulen), Elyis Sontikasyah, Firman Edison, Nurlailah, Irawan Susanto (Itok), Irma Winarni (Sang Ketua), Ivon Nilawati, Junenti K. Nadeak, Legianto, Nata Wijaya, Ten Nova (Sang Bendahara), Ronny M. Noer, Rubidiyanti, M. Sidik Bancin (Kurik) dan Sofyan Husin (Cik Gu) serta pihak-pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan kemajuan daerah.

Jakarta, Desember 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI SATRIA MASRI
NPM : 0806429706
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAYA TARIK INVESTASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Desember 2009
Yang menyatakan

(ANDRI SATRIA MASRI)

ABSTRAK

Nama : Andri Satria Masri
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi
Kabupaten Padang Pariaman

Tesis ini menganalisis faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman dengan mempertimbangkan kondisi pasca gempa bumi, melalui: 1) karakteristik dan persepsi investor terhadap faktor-faktor penentu daya tarik investasi dan keputusan investasi, 2) potensi dan sektor-sektor unggulan perekonomian yang potensial dikembangkan serta 3) persepsi investor terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan kualitatif melalui survey yang diolah dengan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan kuantitatif menggunakan analisis struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, basis ekonomi (*Location Quotient*) dan *Shift Share*.

Pendekatan kualitatif memperoleh faktor infrastruktur fisik terutama jalan negara dipersepsi paling positif oleh responden. Sedangkan faktor pelayanan pemerintah daerah dipersepsi paling negatif oleh responden. Kedua temuan ini sesuai dengan hasil AHP yang juga memberikan prioritas tertinggi untuk pelayanan pemerintah daerah dan ketersediaan infrastruktur fisik yang merupakan sub kriteria dari kriteria perekonomian.

Sedangkan melalui pendekatan kuantitatif diperoleh hasil bahwa, sektor-sektor memiliki keunggulan komparatif terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat dan Nasional pada dasarnya sama kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor-sektor itu adalah: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Pengangkutan dan Komunikasi serta Jasa-jasa.

Kata kunci: Gempa Bumi, Karakteristik, Persepsi, Daya Tarik Investasi, Investor, Potensi, Investasi, Sektor Unggulan, *Analytic Hierarchy Process*, *Location Quotient*, *Shift Share*.

ABSTRACT

Name : Andri Satria Masri
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Determinant Factors of Investment Attractiveness of Padang Pariaman Regency

This thesis analyzes the determinants of investment attraction in Padang Pariaman by considering the post-earthquake conditions, through: 1) the investor characteristics and perception about factors influence the determinants of investment attractiveness, 2) potential and the dominant sectors of the economy the potential and 3) investor perceptions of the factors influence the decisions making.

Research method used is a combination of qualitative approach to the survey prepared by Analytic Hierarchy Process (AHP) and quantitative analysis of economic structure, economic growth, economic base (Location Quotient) and Shift Share.

Obtain qualitative approach factors of physical infrastructure, especially roads most positively perceived countries by the respondents. While local government service factors are the most negatively perceived. Both findings are consistent with the results of AHP which also given the highest priority for local government services and the availability of physical infrastructure which is a sub-criteria of economic criteria.

Meanwhile, sectors that have a comparative advantage are essentially the same except the Mining and Quarrying sector. These sectors are: Agriculture, Mining and Quarrying; Electricity, Gas and Water Supply; Transport and Communication as well as services.

Keywords: Earthquake, Characteristics, Perception, Investment Attraction, Investor, Potential, Investment, Seed Sector, Analytic Hierarchy Process, Location Quotient, Shift Share.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembaran Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metodologi Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II STUDI LITERATUR	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Fungsi Investasi dalam Pembangunan	11
2.1.2. Pengertian Investasi	14
2.1.3. Iklim Investasi	17
2.1.4. Pelayanan Publik	18
2.1.5. Pengertian Persepsi	21
2.2. Upaya Peningkatan Investasi	22
2.3. Studi Terdahulu	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Pendekatan Kualitatif	28
3.1.1. Ruang Lingkup Penelitian	28
3.1.2. Metode Pemilihan Responden	29
3.1.3. Jenis dan Sumber Data	32
3.1.4. Metode Pengolahan Data	33
3.1.5. Metode Analisis dan Penafsiran Data	33
3.1.6. Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i>	34
3.1.7. Pembuatan Hirarki AHP	40
3.1.8. Penyusunan Kuisisioner dan Penentuan Responden <i>Expert</i>	42
3.1.9. Penjelasan Definisi Level dan Elemen dalam Hirarki	43

3.2.	Pendekatan Kuantitatif	48
3.2.1.	Struktur Ekonomi	49
3.2.2.	Pertumbuhan Ekonomi	49
3.2.3.	Sektor Unggulan/Basis dengan <i>Location</i> <i>Quotient</i> (LQ)	50
3.2.4.	<i>Shift Share</i>	52
BAB IV	GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	54
4.1.	Sejarah Singkat Kabupaten Padang Pariaman	54
4.2.	Letak Geografis	55
4.3.	Topografi dan Iklim	56
4.4.	Demografi dan Tenaga Kerja	57
4.5.	Kondisi PMA dan PMDN	59
4.6.	Kondisi Perekonomian	60
4.6.1.	Perkembangan PDRB	60
4.6.2.	Analisis Sektoral	63
4.7.	Keunggulan Komparatif Kabupaten Padang Pariaman... ..	69
4.7.1.	Keunggulan Komparatif Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Propinsi Sumatera Barat	69
4.7.2.	Keunggulan Komparatif Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Nasional	70
4.8.	Analisis <i>Shift Share</i>	73
4.8.1.	Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Padang Pariaman terhadap Propinsi Sumatera Barat	73
4.8.2.	Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Padang Pariaman terhadap Nasional	75
4.9.	Sarana dan Prasarana	76
4.9.1.	Transportasi Darat	76
4.9.2.	Perhubungan Laut	77
4.9.3.	Perhubungan Udara.....	77
4.9.4.	Listrik.....	78
4.9.5.	Telekomunikasi	78
4.9.6.	Sumber Daya Air	78
4.9.7.	Perbankan/Lembaga Keuangan	78
4.9.8.	Kawasan Industri	79
4.10.	Kebijakan Daerah dan Instansi Pelayanan	79
4.10.1.	Prosedur Tetap Pelayanan Penanaman Modal....	82
4.10.2.	Pedoman Prosedur Pelayanan Perizinan.....	83
4.11.	Kondisi Sosial Budaya	86
BAB V	ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN	89
5.1.	Survei Persepsi Investor terhadap Iklim Investasi	89
5.1.1.	Karakteristik Responden	89
5.1.2.	Persepsi Investor terhadap Iklim Investasi	95
5.2.	Analisis Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi dengan AHP	101
5.2.1.	Hasil Analisis AHP	101

5.2.2. Analisis Per Responden	107
5.2.3. Analisis Sensitivitas	109
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	111
6.1. Kesimpulan	111
6.2. Saran dan Implikasi Kebijakan	112
DAFTAR REFERENSI	114



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rekapitulasi Penyebaran Proyek Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat (1969-2007)	5
Tabel 3.1.	<i>Scale for Pairwise Comparison</i>	38
Tabel 4.1.	Luas Daerah Propinsi Sumatera Barat 2007	54
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 2007	58
Tabel 4.3.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2007 (Orang)	58
Tabel 4.4.	PDRB dan Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Padang Pariaman ADHK 2000, Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (Milyar Rupiah)	61
Tabel 4.5.	Distribusi Persentase Sektoral PDRB Kabupaten Padang Pariaman ADHK 2000, Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007	64
Tabel 4.6.	Kontribusi Kelompok Sektor PDRB Kabupaten Padang Pariaman ADHB Tahun 2003-2007 (%)	66
Tabel 4.7.	Hasil Panen Produk-Produk Pertanian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2007 (Ton)	67
Tabel 4.8.	Populasi Ternak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2007 (Ekor)	68
Tabel 4.9.	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Padang Pariaman terhadap Propinsi Sumatera Barat dan Kontribusi Sektoral ADHK 2000 (2003-2007)	69
Tabel 4.10.	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Padang Pariaman terhadap Nasional dan Kontribusi Sektoral ADHK 2000 (2003-2007)	71
Tabel 4.11.	Perhitungan LQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat ADHK 2000, Menurut Lapangan Usaha (2007)	72
Tabel 4.12.	Nilai <i>Shift Share</i> Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2003-2007 dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat	74
Tabel 4.13.	Nilai <i>Shift Share</i> Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2003-2007 dibandingkan dengan Nasional	75
Tabel 5.1.	Hasil Akhir AHP dengan Lima <i>Expert</i>	101
Tabel 5.2.	Analisis AHP per Bobot Elemen Faktor pada Level 3 Kriteria Pelayanan Pemerintah Daerah	107

Tabel 5.3.	Analisis AHP per Bobot Elemen Faktor pada Level 3 Kriteria Keamanan, Politik, Sosial dan Budaya	108
Tabel 5.4.	Analisis AHP per Bobot Elemen Faktor pada Level 3 Kriteria Perekonomian	109
Tabel 5.5.	Analisis AHP per Bobot Elemen Faktor pada Level 3 Kriteria SDM dan Produktifitas	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Hirarki AHP Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi	41
Gambar 3.2.	Alur Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman	69
Gambar 4.1.	Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman (2003 dan 2007)	65
Gambar 4.2.	Alur Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman	84
Gambar 5.1.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	89
Gambar 5.2.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Asal Daerah ..	90
Gambar 5.3.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia	90
Gambar 5.4.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	91
Gambar 5.5.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Sektor Usaha	91
Gambar 5.6.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Jabatan	92
Gambar 5.7.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Badan Hukum Usaha	92
Gambar 5.8.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Aset Usaha	93
Gambar 5.9.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Umur Operasional Usaha	93
Gambar 5.10.	Pengelompokan Responden Berdasarkan Omzet Usaha	94
Gambar 5.11.	Porsentase Persepsi Positif (Sangat Baik dan Baik) Responden Terhadap Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi	96
Gambar 5.12.	Porsentase Persepsi Negatif (Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik) Responden Terhadap Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi	98
Gambar 5.13.	Hirarki AHP dengan Bobot dan Sintesa Global Masing-Masing Elemen	102
Gambar 5.14.	Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman	103
Gambar 5.15.	Kriteria Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Melihat Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman	105

Gambar 5.16.	Kriteria Perekonomian dalam Melihat Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman	106
Gambar 5.17.	Kriteria Keamanan, Politik, Sosial dan Budaya dalam Melihat Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman	106
Gambar 5.18.	Kriteria SDM dan Produktifitas dalam Melihat Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman	107



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuisisioner Survei Karakteristik dan Daya Tarik Investasi Kabupaten Padang Pariaman
- Lampiran 2 Kuisisioner *Analytical Hierarchy Process*
- Lampiran 3 Diagram Operasi Matriks Hirarki Sempurna
- Lampiran 4 Diagram Operasi Matrik Hirarki Tidak Sempurna
- Lampiran 5 Daftar PMA dan PMDN di Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2007
- Lampiran 6 Hasil Olah Data Karakteristik Responden dengan Bantuan Perangkat Lunak SPSS 12.0 for Windows
- Lampiran 7 Olah Data Persepsi Responden terhadap Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten Padang Pariaman dengan Bantuan Perangkat Lunak SPSS 12.0 for Windows
- Lampiran 8 Output Olahan Kuisisioner AHP dengan Bantuan Perangkat Lunak *Expert Choice 2000 2nd Edition*
- Lampiran 9 Alur dan Waktu Proses Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Prosedur tetap Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 tahun 2006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah upaya mewujudkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi lebih dari sekedar ada dan bahkan dari sekedar ada menjadi lebih berada di tengah-tengah perikehidupan manusia. Di tengah kondisi permasalahan kehidupan yang makin kompleks dibutuhkan upaya pembangunan dengan akselerasi yang cepat mendahului pesatnya perkembangan kebutuhan manusia itu sendiri sehingga tidak menimbulkan kelangkaan akan sumber-sumber kebutuhan tersebut.

Salah satu bentuk pembangunan dengan akselerasi cepat tersebut adalah pembangunan ekonomi. Percepatan pembangunan ekonomi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dibantah lagi melihat situasi dan kondisi dunia saat ini. Seiring dengan pertambahan jumlah manusia bertambah pula tingkat kebutuhannya, sementara itu sumberdaya pemenuhan kebutuhan manusia tersebut semakin terbatas dan berkurang. Untuk itu dibutuhkan percepatan pembangunan ekonomi.

Percepatan pembangunan ekonomi bisa dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa sebelum otonomi daerah banyak dikritik hasilnya adalah buruk, karena menyebabkan kesenjangan ekonomi, antara sedikit kelompok yang menikmati pertumbuhan ekonomi dan banyak kelompok yang tidak menikmatinya. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang merata.

Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa lalu tersebut ditenggarai oleh banyak pihak salah satunya disumbang oleh sistim pemerintahan yang terlalu terkonsentrasi di pusat pemerintahan yang dikenal dengan sentralisasi. Menyadari keadaan tersebut, melalui sebuah tragedi nasional, yang populer dengan “Reformasi Mei 1998”, direformasilah sistim pemerintahan Indonesia dengan pemberlakuan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang undang Nomor 32 Tahun 2004.

UU 32/2004 telah menjadi tonggak kelahiran sistim otonomi daerah di Indonesia. UU desentralisasi ini memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan cara mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian inti dari pelaksanaan desentralisasi adalah bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik dibanding dengan sistim pemerintahan sentralisasi.

Harapan yang diamanahkan dalam UU ini adalah terjadi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala bidang kehidupan melalui peningkatan pelayanan publik pemerintah. Sejatinya, kelahiran UU ini dapat mewujudkan cita-cita kemakmuran yang selama ini diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi melalui percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan cita-cita kemakmuran memerlukan mesin penggerak. Salah satu mesin penggerak yang dapat memenuhi harapan ini adalah penanaman modal atau investasi. Mengapa harus investasi? Dalam makalah ilmiahnya, Aritonang (2008) menjawab bahwa pada saat setelah terjadinya krisis ekonomi, Indonesia memerlukan 'dana baru' dalam bentuk investasi karena secara perhitungan ekonomi saat itu Indonesia tidak mempunyai tabungan untuk meredam gejolak ekonomi. Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bantuan lembaga finansial internasional dan mengundang sejumlah investor untuk memulai menanamkan modalnya di Indonesia.

Setyawan dan Fatchurrohman (2004) dalam paper yang disampaikan dalam Seminar Nasional Akademik Tahunan Ekonomi I tahun 2004 bahkan mengungkapkan bahwa pemulihan ekonomi sebenarnya akan lebih ditentukan oleh pemulihan investasi. Dengan mengutip Kuncoro (2000), Setyawan menjelaskan bahwa dalam teori neo-klasik selalu diajarkan bahwa untuk

membangun kinerja perekonomian suatu negara maka dibutuhkan akumulasi kapital. Dalam konteks yang sama mereka dengan mengutip Sadli (2002), mengatakan negara berkembang lebih memerlukan investasi terutama asing karena pada umumnya tingkat tabungan domestik di negara berkembang rendah.

Tanjung (2007:2) dalam tesisnya menyebutkan, secara umum tujuan pokok dari adanya kegiatan investasi adalah untuk meningkatkan produksi, penyempurnaan struktur industri, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, mendorong ekspor dan memelihara lingkungan. Menurut Nurkes (Tanjung, 2007), lingkaran perangkap kemiskinan yang banyak terjadi di negara berkembang dapat dipotong melalui investasi. Oleh sebab itu investasi dipandang sebagai salah satu faktor utama di dalam pembangunan ekonomi.

Begitu pentingnya peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat disadari betul oleh pemerintah. Sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dukungan dana yang besar, bukan hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur bidang sosial dan kehidupan masyarakat.

Penyusun UU 32/2004 juga sangat menyadari bahwa mesin penggerak pertumbuhan ekonomi adalah penanaman modal, untuk itu ditegaskanlah salah satu pelayanan publik yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah dalam kewenangannya di tingkat kabupaten/kota adalah pelayanan administrasi penanaman modal. Kewenangan ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n UU No. 32/2004 yang berbunyi: "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi salah satunya adalah pelayanan administrasi penanaman modal".

Pelayanan administrasi penanaman modal tersebut kemudian dijabarkan lebih khusus dalam UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Pembentukan UU tentang Penanaman Modal ini didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga UU tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha,

perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

UU Penanaman Modal sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi jalan bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam menawarkan peluang potensi daerah guna menarik arus modal masuk.

Kreasi dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah merupakan tugas penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan ekonomi dan dalam hal ini adalah membangun kesejahteraan ekonomi rakyat daerah. Kesejahteraan ekonomi rakyat dapat diupayakan secara minimal jika rakyat mempunyai pendapatan yang cukup dan layak baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, maupun untuk ditabung. Pada akhirnya, pendapatan akan diperoleh rakyat apabila rakyat mempunyai pekerjaan dan dari pekerjaan tersebut rakyat mendapatkan hasil atau imbalan untuk membiayai semua kebutuhan hidupnya.

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pemerintah daerah antara lain adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat di daerah, menciptakan stabilitas perekonomian daerah dan selanjutnya membangun basis ekonomi dan kesempatan yang lebih beraneka ragam. Lapangan kerja, salah satunya, dapat diciptakan melalui pertumbuhan investasi.

Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah pemerintahan kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang sangat terkenal dengan komoditas buah kelapa terbanyak dan memiliki cita rasa tersendiri sebagai salah satu bahan masakan. Selain menghasilkan buah kelapa terbanyak, pada tahun 2006 Kabupaten Padang Pariaman menjadi lokasi penanaman Sentra Pengembangan Kakao Wilayah Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dampak penanaman

ini bagi Kabupaten Padang Pariaman adalah mendapatkan peran dan tanggung jawab yang besar dalam pengembangan komoditas pertanian kakao ini terutama di Propinsi Sumatera Barat. Walaupun bukan penghasil kakao terbanyak di Propinsi Sumatera Barat, kuantitas tanaman kakao produktif ini di Kabupaten Padang Pariaman patut menjadi lirikan bagi pengusaha perkebunan kakao dan hasil olahan turunannya.

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2007 adalah US\$ 38,81 milyar sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah Rp. 194,1 milyar. Nilai investasi PMA Kabupaten Padang Pariaman berada di urutan ke tujuh dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat sementara PMDN berada di urutan ke enam, lihat Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Rekapitulasi Penyebaran Proyek Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat (1969-2007)

Kabupaten/Kota	PMA		PMDN	
	Investasi (US \$ Ribu)	Jumlah Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek
1. <i>Kab. Kep. Mentawai</i>	<i>17.814,88</i>	<i>3</i>	<i>39.930,00</i>	<i>7</i>
2. Kab. Pesisir Selatan	80.678,34	5	2.274,09	3
3. Kab. Solok	15.318,27	2	347.527,63	9
4. Kab. Sijunjung	165.646,58	7	818.514,65	16
5. Kab. Tanah Datar	0,00	0	500,00	1
6. Kab. Padang Pariaman	38.805,14	9	194.050,13	4
7. Kab. Agam	131.795,90	4	107.715,94	6
8. Kab. Lima Puluh Kota	36.530,95	3	24.840,42	8
9. Kab. Pasaman	0,00	0	0,00	0
10. Kab. Solok Selatan	169.224,18	5	30.736,35	0
11. Kab. Dharmasraya	0,00	0	241.942,49	0
12. Kab. Pasaman Barat	148.472,25	8	1.388.374,23	12
13. Kota Padang	106.038,47	26	2.208.837,86	47
14. Kota Kota Solok	0,00	0	0,00	0
15. Kota Sawahlunto	0,00	0	147.530,00	1
16. Kota Padang Panjang	253,08	2	79.009,73	5
17. Kota Bukittinggi	0,00	0	0,00	0
18. Kota Payakumbuh	0,00	0	0,00	0
19. <i>Kota Pariaman</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Jumlah	910.550,20	74	5.631.783,52	119

Sumber: Statistik Penanaman Modal Propinsi Sumatera Barat, BKPM Sumbar, 2007/2008.

Keterangan: Huruf miring pada tabel adalah kabupaten/kota pecahan dari Kab Padang Pariaman.

Sementara itu jumlah PMA yang tercatat dalam Statistik Penanaman Modal Propinsi Sumatera Barat tahun 2007/2008 oleh BKPM Sumbar adalah sembilan buah (4 operasional, 2 macet, 3 persiapan pembangunan) dan PMDN

tujuh buah (5 operasional, 2 persiapan pembangunan). Sedangkan usaha yang terdaftar sebagai pemilik Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di kantor Dinas Koperindag dan PKM Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan tahun 2007, yang tidak termasuk PMA dan PMDN adalah 178 unit.

Dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan Pengembangan Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah melalui Penciptaan Iklim yang Kondusif bagi Investasi sebagai salah satu prioritas pembangunannya di tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyadari bahwa upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Karena disadari juga bahwa belum bergairahnya investasi di Kabupaten Padang Pariaman karena adanya hambatan dari berbagai sektor, antara lain kelembagaan, perekonomian daerah, keamanan, perizinan, sosial budaya, dll. Hal ini dibuktikan dari keluhan beberapa investor dalam mengurus perizinan usaha, keamanan dan kenyamanan berusaha serta keberlangsungan usaha.

Sebenarnya ada beberapa kondisi menguntungkan di Kabupaten Padang Pariaman yang dikaitkan dengan iklim investasi daerah, seperti keberadaan “Padang Industrial Park” (PIP) sebagai salah satu kawasan penanaman modal dan “Bandara Internasional Minangkabau” (BIM) sebagai infrastruktur fisik penunjang iklim investasi. Tetapi kondisi ini ternyata belum cukup membantu peningkatan daya saing investasi Kabupaten Padang Pariaman dibanding kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat seperti tergambar dalam rekapitulasi penyebaran proyek investasi pada Tabel 1.1.

Sementara pemerintah daerah bersama-sama masyarakat berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi calon investor, malang tidak dapat ditolak bencana alam gempa bumi datang menghampiri Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 dengan kekuatan 7,9 Skala Richter-nya. Gempa dahsyat ini meluluh lantakkan beberapa kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah paling parah merasakan akibat gempa bumi tersebut.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per tanggal 24 Oktober 2009 (<http://gempa.padangpariamankab.go.id>), jumlah korban meninggal di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 438 jiwa. Sementara kerugian material sebanyak Rp 381,9 Milyar. Kerugian ini didominasi oleh hancurnya hunian warga yang mencapai 64 persen dari total kerugian. Total bangunan warga yang rubuh akibat gempa tersebut mencapai 32.537 unit. Sedangkan rumah penduduk yang mengalami rusak sedang 4.647 unit dan rusak ringan sebanyak 2.315 unit. Fasilitas pendidikan yang hancur mencapai 279 unit, rusak sedang 94 unit, dan rusak ringan 58 unit. Sedangkan jumlah sarana kesehatan yang mengalami rusak berat 61 unit, rusak sedang 17 unit, dan rusak ringan dua unit. Panjang jalan dan jembatan yang rusak 36,60 Km dan 618 M. Sarana irigasi mengalami mulai rusak ringan sampai berat 57 unit.

Dalam kondisi yang sangat tidak normal tersebut faktor-faktor penentu daya tarik investasi Kabupaten Padang Pariaman sudah barang tentu mendapatkan nilai buruk dari mata investor ataupun calon investor. Apalagi keadaan tersebut diperparah lagi dengan isu yang berkembang di seluruh Indonesia melalui pemberitaan media masa bahwa daerah Propinsi Sumatera Barat merupakan wilayah jalur gempa dan sangat rawan dengan potensi bencana gempa bumi. Secara rasional, investor menilai bahwa tingkat resiko penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman sangat tinggi diakibatkan bencana alam. Sudah barang tentu situasi ini sangat memukul psikologi seluruh aparat pemerintah yang sudah berjuang keras untuk memperbaiki iklim investasi khususnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Namun demikian, kondisi terakhir dari perusahaan-perusahaan besar dan menengah baik PMA maupun PMDN yang sudah lama beroperasi di Kabupaten Padang Pariaman belum satupun yang menyatakan akan menutup usahanya, karena memang kondisi fisik bangunan pabrik dan kantor dari perusahaan-perusahaan tersebut belum ada yang melaporkan berada dalam keadaan rusak atau roboh.

1.2. Perumusan Masalah

Selain dengan munculnya kondisi bencana alam gempa bumi, dari sekian banyak kekuatan, peluang dan kesempatan yang tersedia di daerah ini galibnya

Universitas Indonesia

percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai investasi sudah dinikmati Kabupaten Padang Pariaman, tetapi kenapa keadaan ini belum terwujud?

Walaupun telah disadari bahwa dari sisi pemerintahan dan iklim investasi daerah masih banyak kekurangan dan kelemahan, pemerintah telah berupaya untuk mengeliminirnya melalui beberapa kebijakan yang mendorong masuknya investasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain dengan promosi investasi melalui *event-event* pameran, situs internet, penerbitan buku “Peluang Investasi”, penerbitan buku “Prosedur Tetap (Protap) Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman”, dll yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di bawah koordinasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, peningkatan status kelembagaan pengurusan penanaman modal dari Eselon IV menjadi Eselon III, namun keadaan belum juga mendapatkan hasil yang menggembirakan.

Selama ini pemerintah berusaha menarik investor dengan berbagai cara tanpa berusaha mengetahui lebih dalam apa sebenarnya keinginan calon investor terhadap Kabupaten Padang Pariaman dan bagaimana kualitas kinerja pelayanan institusi yang mengurus kegiatan penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman. Bahkan belum pernah dilakukan penelitian secara mendalam mengetahui apa yang menjadi hambatan, halangan dan keluhan dari investor yang sudah melakukan investasi dan sedang mempersiapkan penanaman modal di daerah ini.

Berangkat dari sinilah, penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengimbangi ketimpangan informasi dari persoalan investasi di Kabupaten Padang Pariaman melalui identifikasi persepsi investor terhadap iklim investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Dari uraian singkat di atas, maka dapat ditentukan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik dan persepsi investor terhadap faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimana potensi dan sektor unggulan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman.

3. Faktor-faktor penentu apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah ditetapkanlah tujuan penelitian ini yakni:

1. Menganalisis karakteristik dan persepsi investor terhadap faktor-faktor penentu daya tarik investasi dan keputusan investasi di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menganalisis potensi dan sektor-sektor unggulan perekonomian yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Menganalisis persepsi investor terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang berguna bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam merencanakan, merumuskan strategi kebijakan penanaman modal yang efektif dan berhasil guna dalam meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman.

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian ini adalah kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan analisa data primer dan sekunder. Metodologi penelitian ini diuraikan lebih lanjut dalam Bab II.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini kemudian ditulis dalam bentuk tesis yang akan disusun dalam lima Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : bab ini diberi judul Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : bab ini berisi tentang landasan teoritis yang digunakan dalam menganalisa tujuan penelitian ini dilakukan dengan membagi pada

Universitas Indonesia

tiga sub bagian, yaitu: teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini seperti teori pembangunan dan peranan investasi dalam pembangunan; upaya peningkatan investasi; pengalaman negara/daerah lain dalam mengelola investasi serta studi terdahulu dan terakhir peralatan analisis.

- BAB III : bab ini memuat metode dan tahapan penelitian yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian.
- BAB IV : dalam bab yang diberi judul Gambaran Objek Penelitian ini menceritakan tentang Kabupaten Padang Pariaman secara singkat mulai dari geografis, topografi, demografis, kondisi perekonomian, potensi investasi, sarana prasarana hingga permasalahan sosial budaya yang paling jamak terjadi di Propinsi Sumatera Barat umumnya, yaitu permasalahan Tanah Ulayat kaitannya dengan penanaman modal.
- BAB V : dalam bab ini kemudian dilakukan analisis karakteristik dan persepsi responden, perekonomian, identifikasi dan faktor-faktor penentu daya tarik investasi dengan menggambarkan objek penelitian, perekonomian, sektor unggulan dan kedudukan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan seluruh daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.
- BAB VI : bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dari hasil analisis dan saran-saran kebijakan yang diharapkan dapat berguna untuk peningkatan daya tarik investasi.

BAB II

STUDI LITERATUR

Pada Bab II ini akan dipaparkan konsep-konsep dan teori-teori yang dipergunakan dalam pembahasan penulisan tesis ini terutama Fungsi Investasi dalam Pembangunan, Teori Investasi, Teori Iklim Investasi dan teori-teori lainnya seperti Pelayanan Publik, Persepsi, *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Fungsi Investasi dalam Pembangunan

Azis (1994:96) berpendapat bahwa pembangunan (pertumbuhan) daerah (regional) merupakan pembangunan nasional dalam skala kecil. Akan tetapi, karakteristik yang digunakan dalam menggambarkan perekonomian nasional tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menganalisa perekonomian daerah. Pada dasarnya pembangunan daerah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu, suatu set variabel-variabel seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal- tenaga dan imbalan bagi faktor (*factor returns*), dalam daerah yang dibatasi secara jelas.

Dalam analisis mengenai perekonomian daerah paling tidak terdapat dua kerangka konseptual pembangunan daerah yang dipergunakan secara luas. Pertama, konsep basis ekonomi yang menyatakan bahwa ekspor daerah adalah faktor penentu dalam pembangunan ekonomi. Teori basis ekonomi beranggapan bahwa permintaan terhadap input hanya dapat meningkat melalui perluasan permintaan terhadap output yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non basis (lokal). Permintaan terhadap produksi sektor lokal hanya dapat meningkat apabila pendapatan lokal meningkat.

Konsep kedua beranggapan bahwa perbedaan tingkat imbalan (*rate of return*) lebih disebabkan oleh adanya perbedaan dalam lingkungan dana/atau prasarana daripada ketidakseimbangan rasio modal-tenaga. Dalam kerangka pemikiran ini, daerah adalah terbelakang dikarenakan produktifitasnya yang rendah. Oleh karena itu, investasi sebagai salah satu komponen pembangunan

menjadi penting sebagai sarana pembangunan daerah. Penalaran teoritis bagi efektifitas investasi terletak dalam kaitan antara fungsi produksi agregatif dan produktifitas daerah.

Adapun mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh Teori Pertumbuhan Harrod-Domar, yang menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi diperlukan akumulasi atau pembentukan modal (*capital formation*) melalui tabungan (*saving*). Lebih tegasnya, teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional tergantung pada jumlah pekerja (*labour*), modal (*capital*) dan investasi, sehingga terdapat rasio antara pendapatan nasional dan kapital stok (*capital-output ratio*).

Namun Chenery (Todaro, 2004:98) mengatakan bahwa peningkatan tabungan dan investasi merupakan *necessary condition* dan bukan *sufficient condition* untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan juga memerlukan modal fisik dan sumberdaya manusia serta perubahan struktural. Perubahan struktural yang dimaksud antara lain transformasi produksi, perubahan komposisi dari permintaan konsumen, perdagangan internasional dan sumber alam serta perubahan faktor sosial ekonomi seperti urbanisasi serta pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Selanjutnya Samuelson dan Nordhaus (1990) merumuskan peranan investasi dalam makroekonomi dalam dua peran yaitu: *pertama*, investasi merupakan suatu komponen pengeluaran yang cukup besar dan berubah-ubah sehingga perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan pada akhirnya akan berakibat juga pada *output* dan kesempatan kerja. *Kedua*, investasi menghimpun akumulasi modal. Dengan menghimpun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi *output* potensial suatu bangsa bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Dalam konteks pembangunan daerah, penanaman modal atau investasi menjadi salah satu faktor penentu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB daerah dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi swasta dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Ketersediaan sumberdaya alam yang

berlimpah namun memiliki keterbatasan di masa depan tentunya menjadi pertimbangan untuk menciptakan investasi baru sehingga bermanfaat bagi generasi dalam jangka panjang bukan hanya sekedar memperbesar *output* dalam jangka pendek.

Menurut pandangan para ekonom klasik dan neoklasik, pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) sumberdaya alam, (2) jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja (3) barang-barang modal dan tingkat teknologi, (4) sistem sosial dan sikap masyarakat (5) luas pangsa pasar sebagai sumber pertumbuhan (Sadono Sukirno, 1995).

Sedangkan menurut Lincolin Arsjad (1999) menyatakan bahwa ada 3 faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal, meliputi semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (*human resources*).

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan seseorang yang ditabung kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal (*capital stock*) fiskal suatu negara sehingga pada gilirannya akan memungkinkan tingkat output yang lebih besar.

Ada dua pendekatan besar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendekatan pertama adalah sisi penawaran (*supply side*) seperti model neoklasik. Penekanan dari model ini adalah pengaruh dari faktor-faktor penawaran mendasar seperti pertumbuhan stok modal dan perubahan teknologi. Sedangkan pendekatan dari sisi permintaan (*demand side*) mengacu pada teori basis ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa faktor utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Sehingga sumberdaya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah, sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah. Artinya sumberdaya lokal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia merupakan kunci dalam perekonomian suatu daerah hingga sumberdaya yang ada potensial dikembangkan secara tepat agar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Arsyad menegaskan, faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan industri-industri ekspornya dan kenaikan permintaan (*demand*) yang bersifat ekstern diluar daerahnya, karena pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal untuk ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan lapangan kerja (*job creation*).

2.1.2. Pengertian Investasi

Dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara, investasi adalah komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat setelah komponen konsumsi (*consumption*). Komposisinya akan sangat bergantung pada keadaan perekonomian negara tersebut. Bila perekonomian dalam keadaan baik maka nilai investasi akan meningkat sebaliknya dalam keadaan krisis maka tingkat investasi juga menurun.

Dalam konsep ekonomi makro, penimbunan/pemupukan modal selalu dianggap sebagai investasi. Secara fisik pengertian modal itu sendiri adalah seluruh peralatan dan prasarana fisik yang digunakan dalam proses produksi, seperti tanah, mesin, kendaraan, gedung, jalan, jembatan dan lain-lain.

Menurut Sukirno (1995:121), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan bertambahnya akumulasi barang modal memungkinkan perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa.

Sumantoro (1995) berpendapat, investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut. Senada dengan Sumantoro, Nurfatah (1981) melihat dari sisi bahwa investasi merupakan usaha pembentukan modal untuk mendapatkan keuntungan, terutama dalam bentuk pendapatan atau bunga modal. Ini berarti investasi lebih berdimensi ekonomi, terutama tertuju pada upaya perolehan *benefit* (manfaat).

Sedangkan menurut Suryana (2007), investor dapat berupa siapa saja yang menanamkan uangnya untuk melakukan usaha. Lebih lanjut Syamsuddin

menjelaskan bahwa investasi adalah suatu proses dari upaya mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain dan mempunyai nilai guna lebih tinggi.

Dalam pengertian umum, investasi diartikan sebagai pembelian (dan berarti juga produksi), baik terhadap aktiva fisik seperti membangun rel kereta api, membangun pabrik, pembukaan lahan, dan lain sebagainya, maupun aktiva finansial (keuangan) seperti membeli sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau aktiva kertas, seperti seseorang yang membeli saham atau obligasi.

Sementara itu dalam konsep *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), investasi yang dimaksud adalah total dari pembentukan modal tetap dan stok barang yang terdiri atas gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, stok bahan baku dan sebagainya (BPS Kab. Padang Pariaman, 1999:5).

Nilai yang diperhitungkan dalam investasi mencakup:

1. Pembelian barang modal baru
2. Pembuatan/perbaikan besar barang yang sifatnya menambah umur atau meningkatkan kemampuan
3. Penjualan barang modal bekas
4. Perubahan stok

Nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal dan perbaikannya serta nilai perubahan stok barang dikurangi penjualan barang modal (BPS Kab. Padang Pariaman, 1999:6). Rumusnya dalam bentuk matematis adalah sebagai berikut:

$$I = B + P + R - S$$

Keterangan:

I = Investasi

B = Pembelian barang modal baru, termasuk pematangan tanah

P = Perubahan stok

R = Perbaikan barang modal

S = Penjualan barang modal bekas

Ciri dari barang-barang investasi, antara lain:

1. Umur manfaatnya lebih dari satu tahun, misalnya tanah, mesin, bangunan dan kendaraan
2. Nilainya relatif besar dibandingkan dengan nilai output yang dihasilkan

3. Manfaat dari penggunaan barang tersebut dapat dirasakan untuk jangka waktu yang panjang

Investasi juga dapat dirinci menurut sektor (seperti sektor pertanian, penggalian, industri dan sebagainya) bahkan dapat dirinci menurut komoditi, ataupun menurut institusi yang melakukan investasi (seperti oleh pemerintah, swasta dan rumah tangga). Investasi pemerintah dapat dibedakan menjadi Investasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota), BUMN dan BUMD. Sedangkan Investasi Swasta dan Rumah tangga dapat dibedakan menjadi Investasi Perusahaan Fasilitas (PMA dan PMDN), Investasi Perusahaan Non Fasilitas (IPNF) dan Investasi Rumah tangga.

Mirip dengan pembagian di atas, Syarif, mantan Kepala BKPM Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, dalam sebuah Lokakarya Rancangan Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman (2006) membagi investasi dalam empat jenis, yaitu:

- a. **Investasi Pemerintah**
Investasi ini dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi melalui proyek-proyek APBN, APBD, bantuan dan lain sebagainya.
- b. **Investasi dengan Fasilitas (PMA dan PMDN)**
Investasi jenis ini dilakukan oleh badan usaha swasta dan badan usaha Negara dengan memanfaatkan fasilitas dan kemudahan dari pemerintah baik dalam proses perizinan, keringanan pajak dan kemudahan lainnya.
- c. **Investasi Non Fasilitas**
Investasi ini adalah segala bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak swasta tanpa meminta fasilitas dari pemerintah.
- d. **Investasi Rumah Tangga dan/atau Usaha Perorangan**
Investasi ini adalah semua bentuk investasi yang dilakukan oleh perorangan dan rumah tangga dalam skala kecil dan menengah serta tidak meminta fasilitas dari pemerintah.

Definisi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) menurut BPS mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi,

tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup di sini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu untuk menggantikan bagian dari penyediaan modal yang rusak (*depresiasi*) dan tambahan penyediaan modal yang ada (*investasi netto*). Dalam perhitungan statistik pendapatan nasional, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses dan barang jadi. Dalam konsep ekonomi nasional, perubahan kapital selalu dianggap sebagai investasi.

Dari sekian banyak definisi investasi di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu kegiatan dari pemerintah atau swasta atau kerjasama keduanya dalam menciptakan suatu barang modal yang baru atau memperbaiki yang sudah rusak dengan tujuan mendapatkan imbal balik (jasa atau keuntungan) dari keberadaan investasi tersebut.

2.1.3. Iklim Investasi

Iklim usaha yang sehat merupakan faktor penting bagi kalangan dunia usaha baik dari dalam maupun luar negeri dalam merencanakan dan menetapkan keputusan investasinya, selain juga faktor kemudahan-kemudahan dan kejelasan prosedur pelayanan penanaman modal. Kondisi inilah yang dapat menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta menggerakkan perekonomian daerah melalui investasi.

Menurut Stern dalam Imelda (2006), iklim investasi didefinisikan sebagai kebijakan, lembaga dan kondisi lingkungan usaha, saat ini dan perkiraan masa depan yang berakibat terhadap keuntungan dan resiko dengan investasi.

Williamson dalam Brahmantio (2001) mengungkapkan bahwa salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kondusifnya iklim usaha suatu daerah adalah biaya transaksi. Pengertian biaya transaksi mencakup; *pertama*, biaya untuk memulai/mengembangkan sebuah sistem; *kedua*, biaya yang terukur dalam

nilai pertukaran; *ketiga*, biaya perlindungan hukum; dan *keempat*, biaya penyelenggaraan perjanjian.

Beberapa faktor lainnya yang umumnya mempengaruhi besarnya aliran investasi masuk ke dalam suatu daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh *Center for International Private Enterprise (CIPE)* dari PBB, yang dikutip Mahi dalam Imelda (2006), diurutkan berdasarkan pentingnya peranan faktor-faktor tersebut, yaitu:

1. Karakteristik pasar
2. Akses ke pasar
3. Tenaga kerja
4. Resiko nilai tukar
5. Repatriasi modal
6. Perlindungan hak cipta
7. Kebijakan perdagangan
8. Kebijakan pemerintah
9. Tarif pajak dan insentif
10. Stabilitas politik
11. Kebijakan makroekonomi
12. Infrastruktur

Berdasarkan urutan kriteria di atas, daerah-daerah yang memiliki potensi pasar rendah, akses masuk ke dalam pasar sulit ditambah lagi dengan upah tenaga kerja yang relatif lebih mahal maka tidak akan memiliki daya saing dibanding daerah lain. Untuk itu, penciptaan iklim investasi yang sehat sangat penting diupayakan dalam rangka menarik investor sebanyak-banyaknya datang ke daerah.

2.1.4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dikaitkan dengan organisasi pemerintahan disebutkan bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1997). Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Lembaga Administrasi Negara (1998) mengartikan Pelayanan Umum sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001).

Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan

masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001).

Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah), dengan ciri sebagai berikut:

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit,

Suwarno dan Ikhsan (2006), dua orang dosen STIA memberikan pengertian pelayanan publik sebagai berikut; dalam konteks ke-Indonesia-an, penggunaan istilah pelayanan publik (*public service*) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara *interchangeable*, dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian *service* dalam kamus Oxford (dalam Suwarno, 2006) didefinisikan sebagai “*a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company*”.

Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (*public*), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. *Public* dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), dan *public utility* (perusahaan umum), *public relations* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), *public interest* (kepentingan umum) dll.

Universitas Indonesia

Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara) dan *public sektor* (sektor negara)

Dalam hal ini, pelayanan publik merujuk istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Nurcholish dalam Suwarno (2006) memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Lihat lebih detail di Nurcholis, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Oxford (2000) dijelaskan pengertian *public service* sebagai “*a service such as transport or health care that a government or an official organization provides for people in general in a particular society*”

Jadi, pelayanan publik adalah pelayanan oleh pemerintah berupa pemenuhan kebutuhan (kelangsungan, pertumbuhan dan kesinambungan hidup manusia secara individu maupun sebagai kelompok masyarakat selaku penyandang kepentingan warganegara, yang pada gilirannya kepada kebutuhan dan kelangsungan hidup negara sendiri sebagai organisasi masyarakat secara keseluruhan.) rakyat dan organisasi masyarakat (termasuk dunia usaha) dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dengan menerapkan paradigma pelayanan publik, yaitu: “pelayanan adalah awal keberdayaan publik dalam menjalankan perannya selaku warganegara yang baik”.

2.1.5. Pengertian Persepsi

Dalam Zein (2003), persepsi didefinisikan sebagai suatu proses melalui penyeleksian, pengorganisasian dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui panca indera kita untuk memahami kejadian di sekitar kita.

Definisi ini dikutip oleh Zein dari konsep yang disusun oleh Baron dan Berg dalam bukunya *Behavior in Organizations*.

Persepsi ini bersifat sementara yang dapat berubah bila ada masukan-masukan yang dapat mempengaruhinya (Zein, 2003:16). Perubahan tersebut dapat terjadi antara lain dengan adanya komunikasi yang strategis. Perubahan yang diharapkan tentunya bertujuan untuk melakukan suatu perbaikan sesuai dari tuntutan komunikasi strategis yang dimaksud.

Persepsi didefinisikan oleh Meider (dalam Zein, 2003) adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). Melalui persepsi kita dapat mengenali dunia sekitar kita, yaitu seluruh dunia yang terdiri dari benda serta manusia dengan segala kejadian-kejadiannya.

Dari banyak definisi persepsi yang disusun oleh banyak pakar terlihat bahwa inti dari pengertian persepsi adalah suatu proses yang dicerna panca indera terhadap lingkungan yang mempengaruhi aktivitas dan kesehariannya kemudian diungkapkan dengan bahasa verbal kesukaan atau ketidaksukaan terhadap obyek yang dipersepsikan.

2.2. Upaya Peningkatan Investasi

Menurut Dornbusch (1993) ada lima prinsip yang mempengaruhi daya tarik investasi di negara berkembang, yaitu *pertama*, kesempatan. Tidak semua negara mempunyai kesempatan untuk menjadi daerah tujuan investasi. Beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin yang tergolong miskin, tidak mempunyai sumber daya dan stabilitas kondisi politik yang baik tidak akan menarik investor untuk datang. *Kedua*, prospek. Sebuah negara akan menjadi tujuan investasi apabila prospek ekonomi negara tersebut bisa diandalkan.

Ketiga, koordinasi. Pasca krisis ekonomi pemerintah belum mampu memberikan sinyal positif kepada pengusaha yang terpaksa “memarkir” modalnya di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Suatu usaha membangun kondisi politik dan keamanan yang stabil serta eliminasi ekonomi biaya tinggi bisa menjadi sebuah sinyal positif bagi proses koordinasi ini. *Keempat*, kebijakan pemerintah dan regulasi. Kebijakan pemerintah dalam investasi merupakan hal

Universitas Indonesia

yang mutlak diperlukan. *Kelima*, kondisi keuangan. Kondisi keuangan ini terkait dengan tiga aspek penting yaitu utang pemerintah, masalah APBN dan kondisi sektor keuangan.

Komite Pemantuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam beberapa kali riset mengenai Peningkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (terakhir dirubah menjadi Tata Kelola Ekonomi Daerah, 2007) menggunakan beberapa indikator sebagai alat ukur faktor-faktor yang mempengaruhi investasi sebagai metodologi penelitiannya, yaitu:

1. Akses Lahan
2. Izin Usaha
3. Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha
4. Program Pemda Untuk Pengembangan Usaha Sektor Swasta
5. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota
6. Keamanan dan Penyelesaian Sengketa
7. Biaya Transaksi
8. Kebijakan Infrastruktur Daerah
9. Kualitas Peraturan Daerah

Ke sembilan indikator di atas tidak jauh berbeda dengan indikator-indikator yang dipakai oleh World Bank dalam beberapa penelitiannya seperti yang dapat dibaca dalam ulasan Bank Dunia untuk Grup Konsultasi untuk Indonesia (2006) yang berjudul *Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemulihan*.

Dalam menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, penelitian ini mengadopsi indikator-indikator yang digunakan oleh KPPOD dan World Bank. Indikator yang digunakan KPPOD dan World Bank kemudian disederhanakan menjadi empat faktor utama yaitu:

1. Pelayanan Pemerintah Daerah
2. Keamanan, Politik, Sosial dan Budaya
3. Perekonomian
4. Sumber Daya Manusia dan Produktifitas

2.3. Studi Terdahulu

Studi yang membahas mengenai investasi terutama investasi di daerah dengan menganalisis faktor-faktor penentu atau yang mempengaruhinya dengan berbagai alat analisis cukup banyak dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya.

Seperti misalnya studi Kalo (2003) dalam melihat faktor-faktor penentu investasi di Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET) di wilayah Timur Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder dan primer hasil survei dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif menggunakan bantuan metode statistik sederhana, Kalo menyimpulkan bahwa berdasarkan frekuensi, investasi dipengaruhi oleh:

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat mendukung para investor/pengusaha,
2. Adanya insentif fiskal/perpajakan yang menarik,
3. Jaminan keamanan dan kepastian hukum dan berusaha, khususnya untuk KAPET Biak, pengusaha setempat menyatakan bahwa perlu adanya penanganan masalah stabilitas keamanan, penegakan hukum dan masalah hak ulayat,
4. Sistem perijinan yang terpadu,
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya Imelda (2006) dengan menggunakan uji regresi data panel untuk 26 propinsi selama periode 1984-2002 mencoba melihat korelasi antara faktor-faktor penentu daya tarik investasi antara lain: keterbukaan daerah, panjang jalan, kapasitas sambungan listrik, kapasitas sambungan telepon, kapasitas produksi air bersih, kualitas tenaga kerja, pengeluaran konsumsi pemerintah dan *domestic market size*.

Dari hasil studinya, Imelda menemukan bahwa semua faktor-faktor di atas dapat dikatakan signifikan secara statistik kecuali faktor kapasitas sambungan telepon. Nilai elastisitas terbesar adalah faktor pengeluaran konsumsi pemerintah dengan elastisitas sebesar 0,38, diikuti oleh panjang jalan dengan elastisitas 0,24, kualitas potensi tenaga kerja 0,22, kapasitas sambungan listrik 0,21, tingkat keterbukaan perdagangan 0,09, tingkat *domestic market size* 0,07 dan kapasitas sambungan telepon sebesar 0,01.

Sedangkan studi tentang investasi dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* dengan bantuan perangkat lunak *Expert Choices* guna mencari peringkat faktor-faktor penentu daya tarik investasi daerah telah dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) KADIN bekerjasama dengan The Asian Foundation mulai dari tahun 2001 sampai terakhir tahun 2007.

Penelitian ini oleh KPPOD dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan iklim investasi di berbagai daerah di Indonesia yang kemudian dapat menjadi panduan bagi kalangan dunia usaha atau investor dalam membuat keputusan berinvestasi di daerah mana saja yang ada di Indonesia sedangkan bagi pihak pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengetahui daya tarik daerahnya terhadap investasi ditinjau dari berbagai faktor penentu daya tarik investasi serta dapat menjadi pemicu untuk membuat kebijakan yang mendukung iklim usaha daerahnya.

Pada tahun 2007 KPPOD melakukan perubahan tema umum studi mereka dari Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah menjadi Tata Kelola Ekonomi Daerah tetapi masih tetap memakai alat analisis AHP (KPPOD: 2007). Perubahan tema ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya tuntutan *stake holder* (pemangku kepentingan) terutama pemerintah daerah dalam hal efektifitas reformasi kebijakan yang harus dilakukannya yang memiliki dampak perubahan riil terhadap kinerja ekonomi daerah.

Sementara itu, indikator-indikator studi tahun 2007 ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Studi tahun 2001-2005 menilai daya tarik investasi berdasarkan lima faktor utama, yaitu: kelembagaan, sosial politik, perekonomian daerah, tenaga kerja, produktifitas dan infrastruktur fisik. Sedangkan studi tahun 2007 menggunakan Sembilan kelompok indikator guna mengukur Tata Kelola Ekonomi Pemerintahan Daerah, sebagaimana disebutkan terdahulu.

Berdasarkan nilai indeks akhir yang dihitung KPPOD dengan menggunakan sembilan indikator di atas maka diperoleh sepuluh peringkat terbaik dan terburuk Tata Kelola Ekonomi Daerah-nya dari 234 kabupaten/kota yang diteliti, yaitu terbaik: enam kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur, dua kabupaten di Propinsi Bali dan dua kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan.

Terburuk: tujuh kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, dua kabupaten di Propinsi Riau dan satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada penelitian tahun 2007 ini, KPPOD belum melakukan penelitian di daerah Propinsi Sumatera Barat tetapi direncanakan oleh mereka pada tahun 2008, sehingga belum diperoleh informasi bagaimana tata kelola ekonomi daerah dan iklim investasi kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Namun demikian sebagai acuan umum, tata kelola ekonomi daerah dan iklim investasi di Kepulauan Sumatera bisa dinilai buruk karena ada sembilan kabupaten/kota yang masuk kategori terburuk, yaitu Kabupaten Nias Selatan, Labuhan Batu, Nias, Asahan, Karo, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kota Medan dan Kota Tanjung Balai, sementara hanya dua yang masuk kategori terbaik, yaitu Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kota Prabumulih.

Dengan menggunakan metode AHP juga, Gumpita (2003) menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan responden BKPM, BKPM, DPRD, Gapensi, Caltex dan akademisi. Hasil temuan Gumpita menyebutkan bahwa upaya kebijakan terbaik dalam peningkatan daya tarik investasi di Bengkalis yang perlu dibenahi adalah infrastruktur dengan angka 41,5% disusul dengan perbaikan kondisi sosial politik sebesar 28,4%, faktor perekonomian daerah sebesar 14,7%, pembenahan di sektor ketenagakerjaan dan kelembagaan masing-masing 8,3% dan 6,9%.

Sementara itu, Robi (2006) guna menyusun strategi memasarkan kota Bekasi berdasarkan daya tarik investasi juga menggunakan metode AHP dikombinasikan dengan alat analisa manajemen strategi TOWS.

Dari studinya ini, Robi mendapatkan faktor-faktor berikut sebagai kelompok ancaman (*threatement*) terhadap daya tarik investasi di Kota Bekasi, yaitu: kepastian hukum, kebijakan daerah/peraturan daerah, keamanan, sosial politik, potensi ekonomi, ketersediaan infrastruktur fisik. Sementara faktor aparatur dan pelayanan, keuangan daerah, budaya masyarakat, struktur ekonomi, ketersediaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja dan kualitas infrastruktur fisik sebagai kelompok peluang (*oppourtinity*).

Kemudian Ningsih juga menemukan yang masuk dalam kelompok kelemahan (*weakness*) adalah mutu sumber daya manusia yang rendah, susunan

kelembagaan instansi belum sepenuhnya mendukung visi kota Bekasi, masih kurang peraturan daerah yang mendukung perdagangan dan jasa, masih lemahnya perencanaan dan koordinasi pemerintah. Dan terakhir yang dikelompokkan dalam kekuatan (*strong*) adalah meningkatnya besar APBD per tahun, tersedianya tenaga kerja yang memadai, kemauan politik (*political will*) walikota, tersedianya RTRW 2000-2010 dan dukungan aktif dari DPRD.

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu baik yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, regresi maupun menggunakan metode AHP, pada dasarnya temuan para peneliti bisa dikatakan hampir mendekati kesimpulan yang sama dalam melihat faktor-faktor penentu daya tarik investasi, antara lain disebutkan adalah faktor pengeluaran konsumsi pemerintah, infrastruktur fisik, ketenagakerjaan, tingkat keterbukaan perdagangan, *domestic market size*, kepastian hukum, kebijakan daerah/peraturan daerah, keamanan, sosial politik, potensi ekonomi, struktur ekonomi, keuangan daerah, aparatur dan pelayanan, budaya masyarakat dan lain sebagainya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai *frame* dalam melakukan *research*, analisa data dan penyajian data sehingga terintegrasi dalam satu garis pemikiran dan tidak bias. Beberapa tipe penelitian antara lain penelitian deskriptif, eksplanatif dan eksploratif. Di samping itu ada beberapa jenis penelitian, antara lain penelitian survei, eksperimen, *grounded research*, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan analisa data sekunder (Singarimbun dan Effendi, 1989:13).

Berdasarkan jenis-jenis penelitian yang disebut di atas, metode yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian ini adalah kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan analisa data primer dan sekunder.

3.1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif dijabarkan secara deskriptif dengan cara menggali pendapat-pendapat dari responden dengan melakukan dua tahapan survei sebagai berikut:

1. Karakteristik dan persepsi pelaku usaha (penanam modal) mengenai potensi, faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman serta persepsi mereka terhadap iklim investasi di Kabupaten Padang Pariaman sebelum terjadinya gempa bumi dengan menggunakan bantuan kuesioner.
2. Menangkap persepsi *stakeholder* (pemerintah, asosiasi dan pengusaha) dengan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) setelah terjadinya gempa bumi.

Kedua tahapan survei ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.1.1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang hendak dicapai maka pembahasan permasalahan dalam penelitian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Survei lapangan dilaksanakan di wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu bulan awal Agustus sampai dengan akhir Oktober 2009 dimana di tengah-tengahnya pada tanggal 30 September 2009 terjadi gempa bumi Sumatera Barat. Oleh karenanya titik berat penelitian ini dibedakan ke dalam dua pendekatan, yaitu:
 - a. Sebelum Gempa Bumi Sumatera Barat untuk menganalisis persepsi investor terhadap faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan kuesioner karakteristik dan persepsi investor. Contoh kuesioner terlampir.
 - b. Setelah Gempa Bumi Sumatera Barat untuk menganalisis persepsi investor pasca terjadinya gempa bumi Sumatera Barat dengan menggunakan kuesioner AHP. Contoh Kuesioner terlampir.
2. Identifikasi analisis yang dilakukan bersifat makro dan tidak dimaksudkan untuk membahas aspek-aspek teknis dari setiap dan semua kegiatan usaha atau sektor.
3. Pengertian sektor dalam penelitian ini adalah sektor-sektor dalam PDRB sebanyak Sembilan (9) sektor.

3.1.2. Metode Pemilihan Responden

1. Responden untuk Kuesioner Karakteristik

Dalam pemilihan responden untuk survei karakteristik investor, berdasarkan pendapat Kuncoro (2003:119), ditetapkan secara *Judgment Sampling*. Metode ini adalah salah satu jenis *purposive sampling (non probability sampling)* selain *quota sampling* dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian.

Karakteristik yang diinginkan dari responden penelitian ini adalah investor yang memiliki usaha di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang meliputi investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kedua jenis investor ini dikenal dengan istilah penanaman modal yang mendapatkan fasilitas (Penanaman Modal Fasilitas/PMF). Dan usaha menengah yang memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagai

usaha formal yang terdaftar dalam administrasi pemerintah dengan jumlah semuanya, yang dikenal dengan istilah Penanaman Modal Non Fasilitas (PMNF). Formulasi yang digunakan dalam pemilihan sampel ini adalah:

$$\frac{n}{N} = \frac{d}{+ 1}$$

dimana :

n = sample

N = populasi

d = derajat kepercayaan

Dari formulasi di atas diperoleh jumlah total responden sebanyak 131 responden dengan persentase masing-masing jenis responden yaitu PMF 2 % dan PMNF 98 % atau 3 dan 128 responden.

Berdasarkan asal modal usaha, PMF terdiri dari dua jenis berdasarkan yaitu PMA dan PMDN maka jumlah responden yang dijadikan sampel dibagi sama banyak untuk masing-masing jenis. Untuk PMNF juga dilakukan pengklasifikasian menurut lokasi (wilayah usaha) secara proporsional.

Guna mengetahui perbandingan persepsi antara penanam modal yang sudah beroperasi usahanya dengan yang mengalami kemacetan, maka akan dilakukan survey kepada usaha PMF yang macet sebanyak dua unit usaha (satu PMA dan satu PMDN).

Selanjutnya, hasil survei tersebut ditindaklanjuti dengan "*in depth interviews*" yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian secara "*purposive*". Dari *interview* tersebut diharapkan akan menguraikan secara kualitatif, persepsi-persepsi yang ada pada pemikiran investor dan dapat menjelaskan interpretasi yang ada terhadap parameter faktor-faktor penentu daya tarik investasi yang diteliti.

Responden yang akan dilibatkan dalam *in depth interviews* dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah daerah yang melayani administrasi penanaman modal seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Penanaman Modal (KPM) Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Padang Pariaman, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

(BKPM) Propinsi Sumatera Barat serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terutama mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penanaman modal.

Interview dengan pejabat daerah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan akan menghasilkan penjelasan-penjelasan dari langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang telah ada dan akan dilakukan oleh mereka dalam melayani investor di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan *interviews* dengan pejabat Propinsi Sumatera Barat guna mengetahui secara makro kondisi penanaman modal di Propinsi Sumatera Barat.

2. Responden untuk Kuesioner Persepsi AHP

Permadi (1992) mengungkapkan bahwa AHP dapat dipergunakan untuk kepentingan individual namun dapat pula dipakai dalam sebuah kelompok atau beberapa orang dengan kuesioner yang sama. Disebabkan kurang jelasnya kriteria *expert* dan juga sering timbulnya keragu-raguan akan kualitas seorang *expert*, membuat proses pengambilan keputusan dengan AHP bisa dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu *expert*.

Selain untuk meminimalisir kekhawatiran kurang jelasnya kriteria dan kualitas *expert*, juga untuk memperoleh persepsi dari berbagai sudut pandang maka responden untuk mengisi kuesioner persepsi AHP ditetapkan sebanyak lima orang secara *judgment*, dengan tujuan agar persepsi yang ditangkap melalui metode AHP ini fokus tidak bias atau valid dalam analisa globalnya (Permadi, 1992:33). Responden dimaksud adalah:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Pariaman
- b. Kantor Penanaman Modal (KPM) Kabupaten Padang Pariaman
- c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Padang Pariaman
- d. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Padang Pariaman
- e. Pengusaha PMDN Kabupaten Padang Pariaman.

3.1.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam analisa penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari:

1. Data Primer, diperoleh dari:

Melalui observasi, wawancara ataupun pertanyaan kepada pihak yang berwenang, dengan menggunakan peralatan dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner karakteristik dan persepsi investor serta kuesioner untuk analisa AHP. Data-data tersebut diperoleh antara lain dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Pariaman
- b. Kantor Penanaman Modal (KPM) Kabupaten Padang Pariaman
- c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Padang Pariaman
- d. BPS Kabupaten Padang Pariaman
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi Sumatera Barat
- f. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Padang Pariaman
- g. Pengusaha atau investor yang akan, sudah dan pernah eksis di Kabupaten Padang Pariaman serta instansi lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder, terdiri dari:

- a. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan lapangan usaha berbagai tahun penerbitan, terakhir tahun 2007.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sumatera Barat berdasarkan lapangan usaha berbagai tahun penerbitan, terakhir tahun 2007.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat berbagai tahun penerbitan, terakhir tahun 2007.
- d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Barat Sumatera Barat berbagai tahun penerbitan, terakhir tahun 2007.

- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota se Propinsi Sumatera Barat berdasarkan lapangan usaha berbagai tahun penerbitan, terakhir tahun 2007.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota se Propinsi Sumatera Barat berbagai tahun penerbitan, terakhir tahun 2007.
- g. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota se Propinsi Sumatera Barat Sumatera Barat berbagai tahun penerbitan, terakhir tahun 2007.
- h. Publikasi dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman, BPS Propinsi Sumatera Barat, BPS Pusat, dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.1.4. Metode Pengolahan Data

Data primer yang diperoleh melalui kuesioner survei karakteristik dan persepsi responden diolah secara sederhana dengan cara pengelompokan dan tabulasi melalui perangkat lunak SPSS Versi 12.0 for Windows.

Data primer yang diperoleh melalui kuesioner AHP diolah guna mencari nilai sintesa global dan sintesa masing-masing elemen dengan menggunakan bantuan program perangkat lunak *Expert Choice*. Perangkat lunak ini merupakan alat analisa pengambilan keputusan yang berdasarkan AHP, sebuah teori matematika yang dikembangkan pertama kali oleh Wharton School dengan dimotori oleh Thomas L. Saaty. Perangkat lunak *Expert Choice* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Expert Choice 2000 2nd Edition*.

3.1.5. Metode Analisis dan Penafsiran Data

Analisis pada kuesioner karakteristik akan dilakukan dengan menggunakan *rating scale*, sebagaimana yang diungkapkan Sugiyono (1999:79), bahwa “data mentah dari kuesioner *rating scale* yang berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif”.

Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini menggunakan skala Likert atau skala jumlah (*method of summated ratings*) karena nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan dijumlahkan sehingga mendapat nilai total.

Skala ini menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5 yang diinterpretasikan sebagai berikut: Angka 1 sebagai *sangat baik* (bisa juga

diartikan *sangat membantu, sangat menguntungkan, sangat mudah*); angka 2 sebagai *baik* (bisa juga diartikan *membantu, menguntungkan, mudah*); angka 3 sebagai *biasa saja* atau *netral*; angka 4 sebagai *tidak baik* (bisa juga diartikan *tidak membantu, tidak menguntungkan, tidak mudah*) dan angka 5 sebagai *sangat tidak baik* (bisa juga diartikan *sangat tidak membantu, sangat tidak menguntungkan, sangat tidak mudah*).

Dari jumlah responden yang menjawab dengan memilih salah satu angka skala tersebut, maka akan dihitung jumlah jawabannya dan dipresentasikan dalam hitungan prosentase. Persentase tinggi rendahnya hasil kuesioner merupakan representasi dari tingkat persepsi yang sangat baik atau sangat tidak baik. Selanjutnya hasil tingkat persepsi ini akan diteruskan dengan program *interview* untuk menghasilkan data kualitatif sesuai tujuan penelitian ini.

3.1.6. Metode *Analytical Hierarchy Process*

Permadi (1992) menjelaskan bahwa AHP adalah suatu perangkat yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang dikembangkan pertama kali oleh Thomas L. Saaty (1991) seorang ahli matematika dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat. Dalam perkembangannya AHP tidak hanya digunakan untuk menentukan skala prioritas pilihan-pilihan yang banyak kriteria, tetapi penerapannya telah meluas dan dapat digunakan pada penyelesaian bermacam-macam masalah.

Secara umum AHP banyak dipakai sebagai alat pengambilan keputusan atau alat perumus kebijakan. Adapun ciri khas kegunaan AHP adalah suatu metode yang memperinci keadaan yang kompleks ke dalam suatu bagian atau komponennya menjadi suatu hirarki (Alam, 1992). Prinsip metode AHP ini adalah memberi bobot tiap faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam suatu tujuan pengambilan keputusan.

Metode AHP merupakan suatu teori pengukuran dan dapat digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan yang diskret maupun kontinyu. Perbandingan-perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual dari suatu skala rasio baik dari perbandingan ini atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif. Metode ini juga

memiliki perhatian khusus terhadap penyimpangan dari inkonsistensi, pengukuran dan pada ketergantungan di dalam dan di antara kelompok elemen strukturnya (Mulyono, 1996).

Dalam melakukan analisa menggunakan AHP, ada empat buah aksioma yang harus diperhatikan sebelum menelaah lebih jauh bekerjanya metode AHP (Permadi, 1992), yaitu:

1. Aksioma 1: *Reciprocal Comparison*

Reciprocal Comparison, artinya si pengambil keputusan harus bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Prereferensinya itu sendiri harus memenuhi syarat resiprokal yaitu kalau A lebih disukai dari B dengan skala x , maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$.

2. Aksioma 2: *Homogeneity*

Homogeneity, artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogenous dan harus dibentuk suatu 'cluster' (kelompok elemen-elemen) yang baru.

3. Aksioma 3: *Independence*

Independence, artinya preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh obyektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah ke atas. Artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.

4. Aksioma 4: *Expectations*

Expectations, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka si pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau obyektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap.

Metode AHP adalah salah satu bentuk metode pengambilan keputusan yang berusaha menutupi semua kekurangan dari metode-metode atau model-model pengambilan keputusan sebelumnya (Permadi, 1992). Peralatan utama dari

Universitas Indonesia

AHP adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia yang dianggap memahami dengan baik suatu permasalahan yang muncul, merasakan akibat suatu masalah atau mempunyai kepentingan terhadap masalah tersebut. Persepsi manusia ini diperoleh dari penyebaran kuisioner melalui kegiatan survei dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam satu set kuisioner. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terukur dipecah ke dalam kelompok-kelompoknya dan kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

Dengan menggunakan persepsi manusia yang dianggap *expert* sebagai inputnya inilah yang menjadi keistimewaan model AHP dibandingkan model-model pengambilan keputusan lainnya. Model pengambilan keputusan lainnya umumnya memakai input yang kuantitatif atau berasal dari data sekunder. Otomatis, model tersebut hanya dapat mengolah hal-hal kuantitatif pula. Selain itu, model AHP dapat memecahkan masalah yang '*multiobjectives*' dan '*multicriterias*'. Kelebihan AHP ini lebih disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarkinya.

Sifat fleksibel tersebut membuat model AHP dapat menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau sebuah hirarki. Bahkan model tersebut bisa juga memecahkan masalah yang mempunyai tujuan-tujuan yang saling berlawanan, kriteria-kriteria yang saling berlawanan dan tujuan serta kriteria yang saling berlawanan dalam sebuah model. Karenanya, keputusan yang dilahirkan dari model AHP tersebut sudah akan memperhitungkan berbagai tujuan dan berbagai kriteria yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan satu sama lain. Dengan kondisi tersebut, maka model AHP dapat pula dipergunakan secara fleksibel dalam artian mempunyai bentuk hirarki yang fleksibel. Masalah-masalah seperti konflik, perencanaan, proyeksi, alokasi sumber daya adalah beberapa dari banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan baik oleh model AHP.

Secara ringkas kelebihan-kelebihan metode AHP adalah :

1. Fleksibel dalam arti mampu mencakup seluruh permasalahan dengan tujuan dan kriteria yang beragam. Tujuan yang berbeda bias dimasukkan ke dalam satu level.

2. Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penilaian tidak saja berdasarkan angka absolut, melainkan juga relatif (menggunakan skala).
3. Menggunakan data primer, sehingga tidak menghadapi masalah ketersediaan data.
4. Perhitungan tidak terlalu rumit.
5. Bentuknya yang sederhana membuat AHP bagi para pengambil keputusan tingkat tinggi, yang biasanya orang-orang sibuk, dapat dengan cepat mengerti dan apabila mereka ingin melakukan simulasi adanya perubahan pada salah satu elemen, maka dengan mudah dapat dilakukan analisa sensitivitas.
6. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik suatu Negara, maka AHP bersifat demokratis, dimana masyarakat dimungkinkan turut serta dalam proses perencanaan pembangunan lewat proses pembuatan hierarki dan pengisian kuesioner bersama-sama aparat pemerintah.

Namun demikian, sebagaimana metode dan model pengambilan keputusan lainnya, AHP juga memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:

1. Ketergantungan pada input berupa persepsi seorang *expert* akan membuat hasil akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila si *expert* memberikan penilaian yang keliru.
2. Belum adanya kriteria/ukuran yang jelas dan baku untuk seorang *expert*, membuat orang sering ragu-ragu dalam menanggapi solusi yang dihasilkan model ini apakah persepsi yang dipilihnya sudah mewakili kepentingan orang banyak. Sehingga sering muncul pertanyaan yang meragukan ke-*expert*-an seseorang.
3. Bentuknya yang sederhana membuat pengambil keputusan yang terbiasa dengan model kuantitatif yang rumit menganggap AHP bukanlah model yang cocok untuk pengambilan keputusan.

Mulyono (1996) mengingatkan beberapa prinsip yang harus dipahami dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan AHP, antara lain:

1. *Decomposition*

Setelah didefinisikan suatu masalah maka perlu adanya *decomposition* dengan memecahkan masalah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, unsur-unsur itu dapat dipecah sampai

unsur-unsur tersebut tidak dapat dipecahkan lebih lanjut. Dari unsur-unsur yang terpecah secara rinci akan didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang ada. Tingkatan-tingkatan yang dibentuk inilah yang disebut sebagai hirarki. Hirarki ada dua jenis, hirarki lengkap (sempurna) dan tak lengkap (tidak sempurna), lihat Lampiran 1 dan 2.

Proses penyesuaian hirarki pada diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki atau yang lazim disebut “goal”. Setelah itu penentuan kriteria-kriteria yang diperlukan atau kira-kira sesuai dengan tujuan keseluruhannya tersebut. Kriteria ini biasanya menunjang tercapainya sebuah tujuan “goal” dan masih bersifat umum. Dan terakhir identifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi di bawah sub-sub kriteria. Selain level-level kriteria di atas dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan hirarki dalam menunjang pencapaian “goal”.

2. *Comparative Judgment*

Comparative judgment berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkatan tertentu dalam kaitannya dengan tingkat atas. Penilaian ini merupakan inti dari metode AHP. Hasil penilaian ini disusun ke dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks *pairwise comparison*. Pertanyaan standar yang biasa digunakan untuk penyusunan skala kepentingan adalah “elemen mana yang lebih penting/disukai/diprioritaskan?” Sedangkan skala kepentingan yang biasa dipakai seperti yang dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. *Scale for Pairwise Comparison*

Skala/Tingkat Kepentingan	Definisi
1	<i>Equal importance</i>
3	<i>Moderate importance of one over another</i>
5	<i>Strong or essential importance</i>
7	<i>Very strong or demonstrated importance</i>
9	<i>Extreme importance</i>
2, 4, 6, 8	<i>Intermediate values</i>
<i>Reciprocals</i>	<i>Reciprocals for inverse comparison</i>

Sumber: Permadi S, Bambang. (1992). *AHP*. Jakarta: PAU-EK-UI. Hal. 9.

Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen yang berlaku aksioma *reciprocal* artinya jika elemen A dinilai 3 kali lebih penting (*Moderate importance of one over another*) dibandingkan elemen B, maka elemen B harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding elemen A. di samping itu, perbandingan dua elemen yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya sama penting (*Equal importance*). Dua elemen yang berlainan dapat saja dinilai sama penting.

3. *Synthesis of Priority*

Setiap matriks *pairwise comparison* kemudian dicari *eigenvector*-nya untuk mendapatkan *local priority*. Karena matriks-matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap level maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesa di antara *local priority*. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan *priority setting*.

4. *Logical Consistency*

Pengukuran konsistensi dalam metode AHP dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah mengukur konsistensi setiap matriks perbandingan dan tahap kedua mengukur konsistensi keseluruhan hirarki.

Konsistensi itu sendiri adalah jenis pengukuran yang tak dapat terjadi begitu saja atau mempunyai syarat tertentu. Suatu matriks, misalnya dengan tiga unsur (i, j dan k) dan setiap perbandingannya dinyatakan dengan a, akan konsisten 100% apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

$$a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$$

Dengan syarat tersebut maka matriks A berikut ini dapat dinyatakan konsisten karena:

$$A = \begin{array}{c|ccc} & i & j & k \\ \hline i & 1 & 4 & 2 \\ j & 1/4 & 1 & 1/2 \\ k & 1/2 & 2 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik} \quad \text{-----} \quad 4 \cdot 1/2 = 2 \\ a_{ik} \cdot a_{kj} = a_{ij} \quad \text{-----} \quad 2 \cdot 2 = 4 \\ a_{jk} \cdot a_{ki} = a_{ji} \quad \text{-----} \quad 1/2 \cdot 1/2 = 1/4 \end{array}$$

Apabila ketiga syarat di atas sudah dipenuhi maka bisa dikatakan bahwa matriks A tersebut konsisten 100% atau dapat juga dikatakan tingkat inkonsistensinya 0%.

Sementara itu, indeks konsistensi yang dapat diterima atau ditolak dalam analisa AHP ini tidak ada yang baku (Permadi, 1992). Menurut beberapa eksperimen dan pengalaman, seperti yang dilakukan oleh Oak Ridge National Laboratory dan dilanjutkan oleh Wharton School, tingkat inkonsistensi sebesar 10% ke bawah adalah tingkat inkonsistensi yang masih bisa diterima. Lebih dari itu harus ada revisi penilaian karena tingkat inkonsistensi yang terlalu besar dapat menjurus pada suatu kesalahan.

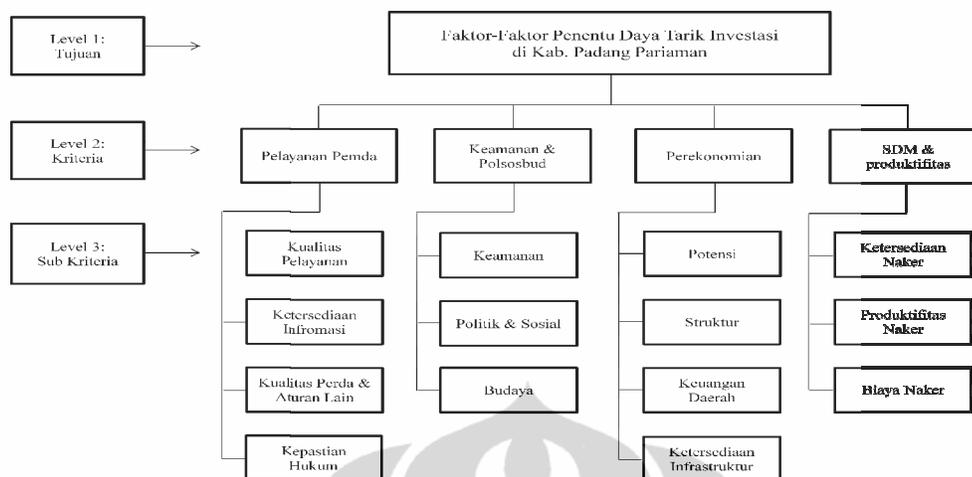
3.1.7. Pembuatan Hirarki AHP

Berdasarkan survei persepsi yang dilakukan sebelumnya maka disusunlah hirarki AHP penelitian ini. Selain dari hasil survei, penyusunan hirarki juga didasarkan dari informasi data sekunder dan hasil diskusi dengan individu-individu yang *concern* memperhatikan kondisi investasi di Kabupaten Padang Pariaman dan terlibat aktif di dalamnya, yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Penanaman Modal (KPM) Kabupaten Padang Pariaman, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Pariaman, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Padang Pariaman pengusaha dan salah seorang pengusaha yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Padang Pariaman.

Struktur hirarki yang disusun dalam penelitian ini ada tiga level yaitu:

1. Level Pertama merupakan Fokus (Tujuan Utama/*Goal*)
2. Level Kedua merupakan Kriteria
3. Level Ketiga merupakan Sub Kriteria

Hirarki ini adalah hirarki tidak sempurna, dimana antara level kedua hanya punya hubungan dengan level ketiga di bawahnya, dalam artian bukan hirarki sempurna yang kesemuanya berhubungan antar variabel. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Hirarki AHP Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi

Pada penelitian ini dipilih lima orang *expert* berdasarkan kelompok dan pelaku yang bisa mewakili *stakeholder* (pemangku kepentingan) di bidang penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

1. Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Pariaman sebagai instansi pemerintah yang resmi bertanggung jawab dan memiliki fungsi koordinator perumusan perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalamnya kebijakan penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Padang Pariaman sebagai instansi pemerintah yang resmi bertanggungjawab dan memiliki fungsi secara teknis menatalaksanakan segala bentuk perizinan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk *One Stop Service* (Pelayanan Satu Atap).
3. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman sebagai instansi pemerintah yang resmi bertanggungjawab dan bergungsi sebagai penatalaksanaan segala bentuk macam proses penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman
4. Pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kabupaten Padang Pariaman sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha di Kabupaten Padang Pariaman

Salah seorang pelaku usaha PMDN yang sudah lama eksis di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang bergerak di bidang industri pembuatan alat-alat mesin pertanian (alsintan).

3.1.8 Penyusunan Kuisisioner dan Penentuan Responden *Expert*

Model AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang mengkombinasikan antara input data sejunder dan primer. Model-model yang sudah ada sebelumnya dalam pengambilan keputusan tergantung input data sekunder, dengan demikian model tersebut hanya dapat mengolah hal-hal yang bersifat kuantitatif.

Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap *expert* sebagai input utamanya untuk dijadikan data primer. Pemakaian model AHP dengan cara pengisian kuisisioner merupakan salah satu cara pencarian data secara primer, namun sebelum penyusunan kuisisioner dilakukan pencarian data sekunder pada objek permasalahan. Disinilah letak perpaduan model AHP yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Bersifat kuantitatif karena persepsi *expert* diolah ke dalam perangkat lunak *Expert Choice* untuk melihat angka-angka prioritas dan bersifat kualitatif karena inputnya tergantung pada persepsi manusia, proses ini dikenal dengan dikuantifisir.

Dalam penentuan responden atau *expert* untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan model AHP harus atau dapat menggunakan lebih dari satu responden atau *expert*. Tujuannya agar menghindari terjadinya bias dan kekeliruan bagi para *expert* dalam memberikan penilaian, selain itu untuk menghindari tingkat keragu-raguan dalam pengambilan keputusan.

Penyusunan hirarki merupakan langkah awal dalam pemecahan masalah pada pendekatan metode AHP. Keberadaan hirarki tersebut mutlak adanya dan hirarki harus sesuai dengan permasalahan yang ada. Suatu model AHP yang akan diaplikasikan terlebih dahulu harus didekati dengan proses dekomposisi masalah. Setelah proses tersebut, suatu hirarki dapat disusun dan digunakan sebagai alat analisis yang ditinjau oleh para *expert*.

Penyusunan hirarki harus relevan dengan permasalahan yang ada, bila penyusunan hirarki dilakukan dengan memasukkan suatu elemen yang kurang tepat akan mengakibatkan bias dan hirarki akan kehilangan sensitivitasnya dari

elemen-elemen yang ada. Hirarki menjadi tidak bermanfaat karena tidak sesuai dengan permasalahan tersebut, sekalipun hirarki tersebut disusun oleh orang yang dianggap *expert* dalam persoalan tersebut.

Dalam penyusunan hirarki tidak ada patokan khusus yang pasti, karena penyusunan hirarki lebih bersifat seni dibandingkan pengetahuan. Pada akhirnya nanti penyusunan hirarki sangat tergantung dari pemahaman dan pengalaman seseorang pada suatu persoalan yang dihadapi kemudian dituangkan dalam hirarki.

3.1.9. Penjelasan Definisi Level dan Elemen dalam Hirarki

Berikut akan dijabarkan definisi masing-masing level dan elemen yang disusun dalam pembuatan hirarki. Definisi ini secara umum mengutip definisi yang digunakan dalam penelitian KPPOD (2007).

Dalam level 1, sasaran hirarki secara umum adalah proyeksi faktor-faktor yang berperan dalam membentuk daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman. Ini berarti kerangka hirarki merupakan kesatuan analisis proyeksi kebijakan bagi faktor-faktor daya tarik bagi investor menanamkan modalnya dan membuka usaha di Kabupaten Padang Pariaman. Berbagai kriteria utama sesuai Gambar di atas dalam mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Pelayanan Pemerintah Daerah
2. Keamanan, Sosial, Politik dan Budaya
3. Perekonomian
4. Sumber Daya Manusia dan Produktifitas

1. Kriteria Pelayanan Pemerintah Daerah

Pelayanan pemerintah daerah adalah fungsi administrasi pemerintah daerah, yaitu menyediakan pelayanan publik, infrastruktur fisik, serta merumuskan peraturan berupa aturan main dari aktivitas dunia usaha dan investasi. kejelasan rantai birokrasi dalam hal pengurusan perizinan dan hal-hal lain terkait dengan dunia usaha serta perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan publik.

a. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah kualitas dan mutu dari pelayanan aparatur pemerintah daerah terhadap pelaku usaha tanpa membedakan orang. Ini

berarti bagaimana profesionalisme aparaturnya pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi utamanya melayani kebutuhan masyarakat.

b. Ketersediaan Informasi

Yang dimaksud dengan ketersediaan informasi adalah tersedia dengan mudah, transparan dan non diskriminasi seluruh informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan investor dalam memperlancar proses penanaman modalnya

c. Kualitas Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya

Yakni bagaimana kualitas dan mutu segala kebijakan atau aturan main secara formal dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas dunia usaha dan investasi. Pada prinsipnya peraturan/kebijakan daerah adalah kerangka acuan/aturan main secara formal yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas dunia usaha dan investasi.

Kebijakan Daerah dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota) yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, prosedur pelayanan kepada masyarakat, perizinan, dan lain-lain. Perda yang mengatur mengenai prosedur pelayanan terhadap dunia usaha/investasi yang menarik para investor antara lain yang memberikan kemudahan dalam birokrasi pelayanan usaha, konsistensi kebijakan, harmonisasi antar produk hukum, tidak adanya hambatan-hambatan birokrasi dan sebagainya.

Peraturan yang memuat pungutan yang baik semestinya tidak hanya sekedar ditujukan untuk peningkatan PAD tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi, filosofi pungutan dan dampak terhadap perekonomian berkelanjutan. Pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut merupakan distorsi bagi kegiatan usaha dan investasi. Distorsi dari pungutan tersebut bisa terjadi pada harga komoditas, hambatan lalu lintas perdagangan antar daerah, biaya produksi, ekonomi biaya tinggi akibat pungutan berganda atau yang melampaui kewajaran, dan sebagainya.

d. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan kepastian hukum disini adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di daerah. Konsistensi peraturan ditunjukkan

dengan adanya peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan. Sedangkan penegakan hukum dilihat dari kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan peraturan dan keputusan sesuai dengan peraturan tanpa membedakan subyek hukum.

Kepastian hukum merupakan kinerja lembaga penegak hukum dan kondisi penegakkan hukum di daerah. Kepastian hukum juga tercermin dari kualitas aparat penegak hukum dalam melakukan penegakkan peraturan dan keputusan pengadilan, independensi peradilan dan intervensi kepentingan kekuasaan.

2. Kriteria Keamanan, Sosial, Politik dan Budaya

Kriteria keamanan, sosial, politik dan budaya ini adalah kondisi riil mengenai keamanan, sosial, politik dan budaya di daerah dan berbagai dampak akibat hubungan timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi hukum dan agama, segi politik dan keamanan serta segi budaya di tengah-tengah segi kehidupan lainnya.

a. Keamanan

Adalah situasi keamanan di daerah yang mempengaruhi kegiatan usaha/investasi, yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas usaha/investasi dan jaminan keselamatan jiwa maupun harta. Kondisi keamanan dapat diukur dari rasa aman dan tingkat gangguan keamanan terhadap dunia usaha maupun terhadap lingkungan masyarakat tempat usaha, serta kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan.

b. Sosial Politik

Kondisi sosial politik adalah keadaan di daerah yang merupakan hasil relasi antar pranata-pranata dalam satu sistem sosial di daerah, baik antar pranata politik dan pemerintahan, antar pranata sosial di masyarakat, maupun antar pranata formal dalam pemerintahan maupun antara elemen-elemen masyarakat. Beberapa aspek yang membentuk kondisi sosial politik daerah diantaranya adalah: keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha

dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya, konflik sosial antar kelompok masyarakat, stabilitas politik, dan kegiatan unjuk rasa.

c. Budaya

Budaya merupakan seperangkat ide atau gagasan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang mendasari atau mengilhami perilaku atau tindakan orang, baik secara individu maupun kolektif dari anggota kelompok tersebut. Yang diperlukan oleh investor yang akan masuk ke suatu daerah adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang terbuka terhadap masuknya dunia usaha, adanya kondisi dimana masyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha. Selain keterbukaan, perilaku nondiskriminatif dari masyarakat setempat dengan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras, agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor. Etos kerja masyarakat, dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untuk berprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga menjadi pertimbangan investor untuk membuka usaha di suatu daerah. Bila masyarakat setempat mempunyai etos kerja yang baik maka akan memudahkan investor dalam rekrutmen pekerja tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat, khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidak mengganggu produktivitas usaha.

3. Kriteria Perekonomian

Kriteria perekonomian merupakan ukuran kinerja sistim ekonomi daerah secara makro. Perekonomian di daerah mencakup beberapa hal, antara lain variabel utama makro ekonomi, seperti potensi, struktur, keuangan daerah dan ditambah dengan kondisi infrastruktur fisik.

a. Potensi

Potensi ekonomi daerah : mencakup potensi fisik dan non fisik suatu daerah/wilayah seperti penduduk/manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya sosial. Faktor penduduk yang dianalisis dalam kaitannya dengan daya tarik investasi daerah pertama adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dilihat dari PDRB perkapita. PDRB perkapita merupakan nilai PDRB atas dasar harga berlaku

dibagi jumlah penduduk di suatu daerah. Kedua, potensi ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, yaitu rata-rata pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai identifikasi potensi ekonomi yang menggambarkan kemampuan masyarakat setempat dalam cakupan yang luas.

b. Struktur

Struktur ekonomi merupakan jumlah nilai bruto kegiatan seluruh sektor perekonomian dalam berkontribusi pada PDRB.

c. Keuangan Daerah

Yang dimaksud Keuangan Daerah dalam penelitian ini adalah kebijakan, strategi, dan teknik yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memperoleh dana, serta pembelanjaan atau pengalokasian dana-dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi atau tugas pemerintahan yang diemban oleh pemda (pelayanan, pembangunan, dan lain-lain). Kebijakan pemerintah daerah dalam menggali dana dan mengelola dana yang telah mereka peroleh untuk peningkatan perekonomian daerahnya tersebut tertuang dalam APBD.

d. Ketersediaan Infrastruktur

Untuk kelancaran kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur fisik seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi (telpon), dan sumber energi (listrik). Infrastruktur fisik yang tersedia belum tentu menjamin kelancaran kegiatan usaha. Untuk itu infrastruktur yang tersedia juga harus berada dalam kondisi baik. Kualitas infrastruktur selain memperlihatkan kondisi fisiknya yang siap dan layak untuk digunakan, juga ditunjukkan dengan kemudahan akses terhadap infrastruktur yang ada.

4. Kriteria Sumber Daya Manusia dan Produktifitas

Kriteria ini merupakan turunan dari faktor produksi tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam pembentukan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi.

a. Ketersediaan Tenaga Kerja

Untuk kegiatan investasi/usaha diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup tersedia, baik yang belum berpengalaman maupun yang sudah berpengalaman. Tenaga kerja tersebut dapat diperoleh dari daerah yang bersangkutan atau dengan mendatangkan dari daerah lain. Ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan usaha dilihat dari rasio jumlah penduduk usia produktif; rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja; maupun tenaga kerja dengan basis pendidikan minimal SLTP yang sudah memiliki pengalaman kerja.

b. Produktifitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi. Secara makro hanya dapat diperoleh produktivitas rata-rata pada sektorsektor ekonomi agregatif, bukan besarnya produksi barang dan jasa tetapi besarnya pertumbuhan ekonomi (PDRB). Produktivitas diukur berdasarkan besarnya PDRB di sektor tertentu dibagi dengan jumlah pekerja di sektor tersebut. Metode ini banyak kelemahan dan kurang akurat, namun demikian cara pengukuran seperti ini masih memadai untuk menunjukkan kecenderungan produktivitas kesempatan kerja.

c. Biaya Tenaga Kerja

Yaitu tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gaji untuk pekerjanya. Pedoman normative pengupahan yang ditetapkan pemerintah UMP/UMK menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam mengkalkulasi bisnisnya. Selain panduan normatif yang ada, investor juga membutuhkan 'pasar' upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan berupa upah yang sebenarnya diterima oleh para pekerja yang mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari UMP/UMK; asumsinya semakin kecil upah menjadi semakin menarik bagi investor.

3.2. Pendekatan Kuantitatif

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga sekaligus melakukan pendekatan dengan cara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini dilakukan sebagai teknik untuk memudahkan analisa kondisi perekonomian daerah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan peranan atau sumbangan (*share*) dari masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB. Dalam lingkup yang lebih jauh akan memperlihatkan bagaimana suatu perekonomian mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di berbagai sektor.

Perubahan struktur produksi yang terjadi pada saat perekonomian tumbuh biasanya ditunjukkan oleh semakin rendahnya peran sektor pertanian dalam perekonomian dan semakin tingginya peran sektor lain di luar sektor pertanian.

Proses perubahan struktur produksi ini dapat diamati dengan mengamati perubahan rasio antara:

- a. Nilai Tambah Bruto sektor Pertanian terhadap PDRB
- b. Nilai Tambah Bruto sektor-sektor non Pertanian terhadap PDRB.

Data yang digunakan untuk menghitung rasio peranan sektor diperoleh dari PDRB menurut lapangan usaha.

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Hal ini pun relevan dilakukan dalam menganalisis daerah (Susanti, dkk., 2000), karena menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu dan pada lokasi tertentu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB/PDRB. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB/PDRB yang digunakan adalah data PDB/PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Dengan menggunakan data ADHK, maka pertumbuhan PDB/PDRB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu. Sebab dengan menggunakan data PDB/PDRB ADHK pengaruh harga terhadap nilai PDB/PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) telah dihilangkan.

Analisis struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ini akan dibahas secara ringkas pada Bab III sebagai bahan informasi mengenal lebih dekat objek penelitian khususnya di sektor perekonomian.

3.2.3. Sektor Unggulan/Basis dengan *Location Quotient* (LQ)

Keunggulan suatu daerah terhadap daerah lainnya atau disebut juga dengan keunggulan komparatif antara lain, dapat dilihat dari lapangan usaha yang ada dalam PDRB. Melalui perhitungan *Location Quotient* (LQ) dapat dilihat indikator awal mengenai sektor mana yang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain dan kapasitas ekspor perekonomian daerah.

Pada dasarnya analisa ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas atau di atasnya guna mengetahui sektor basis/ekspor pada daerah pengamatan mempunyai peranan besar dalam menunjang perekonomian suatu daerah yaitu dengan melihat sektor basis dan non basis.

Dalam perhitungan LQ ini akan dianalisa keunggulan komparatif Kabupaten Padang Pariaman secara relatif terhadap kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat serta di Nasional. Untuk melihat perekonomian suatu daerah dari segi sektor unggulannya dapat dilakukan analisis basis ekonomi.

Dalam pengertian ekonomi regional dikenal adanya pengertian sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang menyebabkan adanya kegiatan menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah (*export*). Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi dari permintaan yang bersifat *exogenous* yang tidak tergantung pada kekuatan/permintaan lokal). Istilah lain dari konsep kegiatan basis ini adalah sektor unggulan.

Kegiatan non basis adalah kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan lokal sehingga permintaannya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Untuk melihat kegiatan basis atau sektor unggulan dan kegiatan non basis ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, antara lain pendekatan langsung, tak langsung (dengan menggunakan asumsi), metode campuran

(campuran antara asumsi dengan menggunakan data sekunder ditunjang dengan survei langsung) dan pendekatan *Location Quotient* (LQ).

Pendekatan LQ merupakan indikator awal apakah suatu daerah mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain dan kapasitas ekspor perekonomian daerah. Pada dasarnya analisa ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas atau di atasnya guna mengetahui sektor basis/ekspor pada daerah pengamatan dengan rumusan sebagai berikut:

$$= \frac{\frac{NTB_{jk}}{PDRB_k}}{\frac{NTB_{jp/n}}{PDRB_{p/n}}}$$

dimana:

- LQ_j = Indeks LQ sektor j di Kabupaten Padang Pariaman
- NTB_{jk} = Nilai tambah bruto sektor j di Kabupaten Padang Pariaman
- NTB_{jp/n} = Nilai tambah bruto sektor j di Propinsi Sumbar/Nasional
- PDRB_k = PDRB Kabupaten Padang Pariaman
- PDRB_{p/n} = PDRB Propinsi Sumbar/Indonesia

Dari rumusan di atas, akan diperoleh informasi apakah sektor j merupakan sektor basis/ekspor atau sektor non basis/impor, apabila:

- LQ > 1; Berarti sektor tersebut adalah sektor basis/ekspor/unggulan atau sektor yang menyebabkan adanya kegiatan menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah (ekspor), dengan kata lain, menunjukkan keunggulan komparatif terhadap daerah di atasnya. Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan karena adanya kegiatan ekspor.
- LQ = 1; berarti sektor tersebut adalah sektor swasembada
- LQ < 1; berarti sektor tersebut adalah sektor non basis/non ekspor atau sektor yang bertujuan memenuhi kebutuhan lokal sehingga permintaannya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan kata lain menyebabkan keluarnya pendapatan ke daerah lain

yang disebabkan daerah bersangkutan harus mengimpor kekurangan atas permintaan di sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh daerah tersebut.

Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghitung koefisien LQ dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja, hasil produksi, nilai tambah atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Cara ini sebenarnya belum bisa memberikan kesimpulan akhir atau masih berupa kesimpulan sementara yang masih harus dikaji lagi dengan pendekatan lain, namun pada tahap awal dapat memberikan gambaran tentang kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati.

Dalam terjemahan Sitohang, Glasson (1990:63) menjelaskan bahwa dalam bahasa akademis, perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor: kegiatan-kegiatan basis dan non basis. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Kegiatan non basis (*non basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang jadi; luas lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah lokal.

3.2.4. *Shift Share*

Analisis ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis data statistik regional, baik berupa data pendapatan perkapita, output maupun tenaga kerja. Teknik ini juga bisa untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya, dengan cara menekankan bagian-bagian pertumbuhan sektor atau industri di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Dengan menggunakan analisis ini akan dapat terlihat bagaimana peran dan prospek suatu sektor di daerah tertentu.

Analisis *shift share* memisahkan (mendekomposisikan) pertumbuhan suatu daerah ke dalam tiga komponen:

- (1) Peran pertumbuhan nasional secara keseluruhan terhadap daerah (*Regional Share*) yang dihitung dengan rumus:

$$= \frac{X_{Rt}}{X_{R0}} - 1 \quad *$$

- (2) Peran pertumbuhan sektoral nasional terhadap daerah (*Proportional Shift*) yang dihitung dengan rumus:

$$= \frac{X_{it}}{X_{i0}} - \frac{X_{Rt}}{X_{R0}} \quad *$$

- (3) Peran pertumbuhan sektoral daerah terhadap pertumbuhan daerah (*Differential Shift*) dengan rumus:

$$= \frac{G_t}{X_{Rt}} \quad *$$

Keterangan notasi:

- = X_{Rt} = PDRB total (tingkat propinsi) tahun t
- = X_{R0} = PDRB total (tingkat propinsi) tahun 0
- = X_{it} = PDRB sektor i (tingkat propinsi) tahun t
- = X_{i0} = PDRB sektor i (tingkat propinsi) tahun 0
- = X_{i0k} = PDRB sektor i (tingkat kabupaten) tahun 0
- = X_{itk} = PDRB sektor i (tingkat kabupaten) tahun t

Pertumbuhan sektor itu sendiri (G) dihitung dengan rumus: $G_t = X_{it} - X_{i0}$, yaitu selisih NTB sektor antara tahun t dengan tahun dasar yang nilainya harus sama dengan penjumlahan: *Regional Share* + *Proportional Shift* + *Differential Shift* atau $G_t = R_t + (Sp + Sd)$.

BAB IV
GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman terkenal dengan sebutan *Piaman Laweh* atau arti harfiahnya dalam bahasa Indonesia menjadi Pariaman yang Luas. Luas wilayah kabupaten ini sebelum terjadi pemekaran pada beberapa waktu terakhir ini memang hampir mendekati sepertiganya wilayah Propinsi Sumatera Barat (data BPS berbagai terbitan). Pada akhir tahun 2007, Kabupaten Padang Pariaman menempati urutan ke-12 berdasarkan luas wilayah seluruh daerah di Sumatera Barat sekaligus sebagai urutan terakhir dari kategori wilayah kabupaten (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Luas Daerah Propinsi Sumatera Barat 2007

Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Rank
1. Kab. Mentawai	6.011,35	1
2. Kab. Pesisir Selatan	5.794,95	2
3. Kab. Solok	3.738,00	4
4. Kab. Sijunjung	3.130,80	8
5. Kab. Tanah Datar	1.336,00	11
6. Kab. Padang Pariaman	1.328,79	12
7. Kab. Agam	2.232,30	10
8. Kab. Lima Puluh Kota	3.354,30	6
9. Kab. Pasaman	4.447,63	3
10. Kab. Solok Selatan	3.346,20	7
11. Kab. Dharmasraya	2.961,13	9
12. Kab. Pasaman Barat	3.387,77	5
13. Kota Padang	694,96	13
14. Kota Solok	57,64	17
15. Kota Sawahlunto	273,45	14
16. Kota Padang Panjang	23,00	19
17. Kota Bukittinggi	25,24	18
18. Kota Payakumbuh	80,43	15
19. Kota Pariaman	73,36	16

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2008, data diolah.

Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman secara resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No. 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah terdiri dari 11 Kabupaten, diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya

Pariaman. Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari atau desa-desa) yang meliputi daerah kewedanaan Air Bangis dan Padang Luar-Kota (sekarang masuk wilayah Kota Padang), Pariaman (sekarang menjadi Kota Pariaman), Lubuk Alung, Mentawai (sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan Nagari-Nagari (desa-desa) Tiku, Sasak dan Katiagan (sekarang ketiganya masuk wilayah administrasi Kabupaten Agam).

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, Propinsi Sumatera tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman (dalam UU 12/1956 nama Kabupaten Padang Pariaman adalah Padang/Pariaman, pakai garis miring).

Berdasarkan UU 12/1956 tersebut Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50.

Sampai akhir tahun 2007 Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 Kecamatan, 46 nagari (setingkat desa). Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan Enam Lingkung yang mempunyai 5 (lima) nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang hanya mempunyai 1 (satu) nagari.

4.2. Letak Geografis

Posisi Kabupaten Padang Pariaman secara astronomis berada $0^{\circ}11,5'-3^{\circ}30'$ LS dan $98^{\circ}36'-100^{\circ}40'$ BT dengan luas wilayah $1.328,79 \text{ km}^2$. Dengan panjang garis pantai 60,50 km dan kewenangan daerah Kabupaten sejauh 4 mil maka luas perairan laut yang menjadi hak kelola Kabupaten Padang Pariaman

seluas 2.551,35 km. Daerah ini memiliki dua buah pulau kecil yaitu Pulau Pieh (3 ha), Pulu Bando (3,5 ha).

Daerah ini berbatasan dengan Kota Pariaman yang terletak di tengah Kabupaten Padang Pariaman; serta berbatasan dengan: sebelah Utara dengan Kabupaten Agam; sebelah Selatan dengan Kota Padang; sebelah Timur dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok; dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia, Kabupaten Mentawai.

Dilihat dari letak geografis, daerah ini sangat strategis dan berpotensi sebagai wilayah pengembangan usaha ekonomi karena daerah ini menjadi lalu lintas perjalanan barang dan manusia antara berbagai daerah di sebelah utara Sumatera Barat dengan Kota Padang sebagai ibukota Propinsi seperti Kabupaten Agam dan Pasaman Barat serta daerah sebelah timur seperti Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman.

Bentuk-bentuk usaha yang mungkin dikembangkan dengan melihat kondisi geografi daerah ini adalah rumah makan sepanjang jalan dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman terutama jalan negara dan propinsi, tempat peristirahatan, souvenir, perbengkelan mobil dan motor, dan lain sebagainya.

4.3. Topografi dan Iklim

Secara umum, topografi wilayah di Kabupaten Padang Pariaman dibagi menjadi dua area, yaitu:

1. Area Dataran Rendah dan Pesisir

Dataran rendah mencakup sekitar 40% dari seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan tersebar di wilayah bagian Barat. Sementara garis pantai dengan panjang 60,50 km merupakan wilayah pesisir yang cukup panjang.

2. Area Dataran Tinggi

Area ini meliputi 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman dengan tekstur daerah bergelombang dan berbukit-bukit hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut dan tersebar di bagian Timur hingga ke bukit barisan. Kondisi wilayah yang berbukit-bukit dan berada di bawah lintasan alur gempa bumi sepanjang pulau Sumatera ini disinyalir

menyebabkan wilayah Kabupaten Padang Pariaman rawan dengan bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak yang diakibatkannya.

Wilayah Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, memiliki dua iklim yaitu musim penghujan dan kemarau. Keadaan alamnya beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin darat dan laut. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, mencapai 2.456 mm – 5.088 mm per tahun, dengan suhu berkisar antara 26,9⁰C hingga 33⁰C dan tingkat kelembaban udara antara 82 – 83%.

Dilihat dari segi kenyamanan dan peluang pengembangan usaha ekonomi produktif, topografi dan iklim daerah ini sangat mendukung dan menunjang karena banyak potensi dan peluang usaha yang bisa dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha ekonomi terutama sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata.

4.4. Demografi dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data BPS yang termuat dalam Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2008 sebanyak 384.536 Jiwa, terbanyak ke empat di Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan penduduk terhitung sebanyak 289,33 jiwa/km² atau berada di urutan ke 7 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat (lihat Tabel 4.2).

Jumlah penduduk yang berada di peringkat empat ini secara tidak langsung dapat menjadi pangsa pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu dari segi kebutuhan tenaga kerja lokal pun sudah pasti tersedia dan tidak akan menemui kesulitan dalam memperolehnya.

Menurut catatan BPS, pada tahun 2007, jumlah orang yang bekerja sebanyak 142.222 orang dengan rincian 83.836 laki-laki dan 58.386 perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Padang Pariaman terbanyak pada tingkat pendidikan tidak tamat SD sebanyak 45.173 orang (31,76%), selanjutnya 36.760 orang (25,85%) pada tingkat pendidikan SD dan sebanyak

29.694 orang (20,88%) berpendidikan sekolah menengah atas dan diploma atau universitas. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 2007

Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	Rank	Kepadatan (Jiwa/Km)	Rank
1. Kab. Mentawai	67.217	16	11	19
2. Kab. Pesisir Selatan	435.960	2	75	14
3. Kab. Solok	351.515	5	94	13
4. Kab. Sijunjung	197.606	10	63	15
5. Kab. Tanah Datar	335.132	6	251	8
6. Kab. Padang Pariaman	384.536	4	289	7
7. Kab. Agam	428.345	3	192	10
8. Kab. Lima Puluh Kota	329.521	7	98	11
9. Kab. Pasaman	253.148	9	57	17
10. Kab. Solok Selatan	130.358	12	39	18
11. Kab. Dharmasraya	175.573	11	59	16
12. Kab. Pasaman Barat	327.788	8	97	12
13. Kota Padang	838.190	1	1.206	4
14. Kota Solok	57.120	17	991	5
15. Kota Sawahlunto	53.913	18	197	9
16. Kota Padang Panjang	52.017	19	2.262	2
17. Kota Bukittinggi	104.278	14	4.132	1
18. Kota Payakumbuh	105.048	13	1.306	3
19. Kota Pariaman	70.499	15	961	6

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2008, data diolah.

Dari data BPS ini didapat kesimpulan bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman adalah kualitas tidak terdidik atau tenaga kasar sebanyak 63,47% selebihnya berpendidikan SMP ke atas.

Tabel 4.3. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2007 (Orang)

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1. Tidak/Belum Sekolah	2.477	5.857	8.334	5,86
2. Tidak/Belum Tamat SD	25.902	19.271	45.173	31,76
3. Sekolah Dasar	24.985	11.775	36.760	25,85
4. SMP/MTs dan Sederajat	13.399	8.862	22.261	15,65
5. SMU/SMA dan Sederajat	14.283	8.662	22.945	16,13
6. Diploma/Akademi	1.158	3.039	4.197	2,95
7. Universitas	1.632	920	2.552	1,79
Jumlah	83.836	58.386	142.222	100,00

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2008, data diolah

Sementara itu, apabila dilihat dari lapangan usaha maka pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Perburuhan dan Kehutanan sebanyak 60.396 orang disusul kemudian sektor Industri Pengolahan

sebanyak 20.535 orang, sektor Perdagangan Besar dan Eceran 20.388 orang, sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 11.807 orang selebihnya menyebar pada berbagai sektor usaha lainnya. Terlihat di sini lapangan pekerjaan masih didominasi diserap oleh sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan, kondisi ini sesuai dengan pembentuk PDRB yang masih didominasi oleh sektor-sektor tersebut.

4.5. Kondisi PMA dan PMDN

Berdasarkan data yang dicatat oleh BKPM Propinsi Sumatera Barat dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, jumlah PMA yang telah beroperasi di Kabupaten Padang Pariaman ada empat (4) buah dan PMDN lima (5) buah, dengan masing-masing realisasi investasi adalah US\$ 37.086,25 dan Rp. 192.006,08 juta. Daftar PMA dan PMDN secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6.

Dari daftar tersebut, terlihat ada dua PMA yang pada mulanya sempat beroperasi kemudian dinyatakan macet oleh BKPM, sedangkan yang macet pada masa persiapan sebanyak tiga perusahaan dan dua dalam masa persiapan pembangunan. Sedangkan untuk PMDN, perusahaan yang macet pada saat persiapan pembangunan tiga buah dan dalam persiapan pembangunan dua buah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kedua instansi pemerintah tersebut, penyebab macetnya perusahaan PMA pada saat sedang beroperasi salah satunya karena krisis moneter tahun 1998 dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pemanfaatan kayu sebagai bahan dasar olahan pabrik pengolahan kayu.

Sementara itu jumlah usaha non fasilitas yang tercatat memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Dinas Koperindag & PKM Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2008 berjumlah 178 buah dengan rincian:

- | | |
|---|-------|
| 1. Berbadan hukum perusahaan perorangan | : 120 |
| 2. Berbadan hukum CV | : 43 |
| 3. Berbadan hukum PT | : 10 |
| 4. Berbadan hukum Koperasi | : 5 |

Badan usaha-badan usaha yang tercatat di atas pada umumnya masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah dan didominasi oleh badan usaha yang bergerak di bidang kontraktor.

4.6. Kondisi Perekonomian

4.6.1. Perkembangan PDRB

Tumbuhnya perekonomian terjadi apabila balas jasa riil secara total yang diterima masyarakat atas penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui apakah pembangunan yang telah dilaksanakan berhasil atau tidak, dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi bersumber dari kenaikan output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang terdapat pada suatu daerah. Dalam teori ekonomi faktor produksi tersebut dapat berupa faktor produksi modal, tenaga kerja, kewirausahaan, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman, dicerminkan oleh pertumbuhan PDRB sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.4.

PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2007 adalah sebesar 4.382,28 milyar rupiah. Pada tahun 2006 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman ADHB sebesar 3.890,12 milyar rupiah, berarti terdapat kenaikan sebesar 492,15 milyar rupiah. Kenaikan produktivitas ekonomi secara riil dapat dilihat dari kenaikan nilai PDRB ADHK tahun 2000. PDRB Kabupaten Padang Pariaman ADHK pada tahun 2007 mencapai 2.489,73 milyar rupiah, naik sebesar 143,37 milyar rupiah dibandingkan tahun 2006. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2007 tumbuh sebesar 6,11%.

Dilihat dari Tabel 4.4, seluruh sektor dalam perekonomian Kabupaten Padang Pariaman tahun 2007 tumbuh positif, dengan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yang hanya tumbuh sebesar 2,34% hal ini disinyalir dampak dari pemberlakuan perda-perda yang melarang penambangan berbagai bahan baik yang termasuk dalam golongan galian C maupun yang tidak seperti batu bintang (obsidian).

Universitas Indonesia

Tabel 4.4. PDRB dan Pertumbuhan Sektorial Kabupaten Padang Pariaman ADHK 2000, menurut Lapangan Usaha 2003-2007 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun					Rata2 P'tmbh
	2003	2004	2005	2006	2007	
1. Pertanian	530,86 (3,85)	556,10 (4,75)	585,87 (5,35)	601,86 (2,73)	625,14 (3,87)	4,11
2. Pertambangan & Penggalian	84,26 (6,14)	90,51 (7,41)	87,55 (-3,27)	86,78 (-0,87)	88,78 (2,30)	2,34
3. Industri Pengolahan	243,91 (5,79)	259,75 (6,49)	267,28 (2,90)	283,29 (5,99)	300,98 (6,24)	5,48
4. Listrik, Gas & Air Bersih	24,16 (7,26)	25,97 (7,51)	28,16 (8,42)	31,45 (11,69)	34,17 (8,68)	8,71
5. Bangunan	93,71 (7,92)	102,61 (9,50)	107,27 (4,54)	114,16 (6,42)	118,51 (3,81)	6,44
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	254,80 (4,82)	267,91 (5,15)	277,49 (3,58)	288,31 (3,90)	300,88 (4,36)	4,36
7. Pengangkutan & Komunikasi	71,52 (3,75)	75,07 (4,97)	189,17 (152,02)	495,36 (161,84)	555,67 (12,17)	66,95
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	44,13 (5,49)	46,37 (5,08)	47,79 (5,22)	51,40 (5,34)	54,24 (5,54)	5,34
9. Jasa-Jasa	355,99 (4,00)	368,74 (3,58)	380,00 (3,05)	393,77 (3,62)	411,36 (4,47)	3,75
PDRB Kab. Padang Pariaman	1.703,34 (4,72)	1.793,03 (5,27)	1.970,58 (9,96)	2.346,38 (19,01)	2.489,73 (6,11)	9,01
PDRB Prop. Sumbar	26.146,78 (5,26)	27.578,14 (5,47)	29.159,48 (5,73)	30.949,69 (6,14)	32.912,68 (6,34)	5,79

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2008, Sumbar Dalam Angka 2008, data diolah.
Keterangan: Angka dalam kurung adalah angka Pertumbuhan dalam %.

Sementara yang tercatat sebagai lima sektor tertinggi pertumbuhan pada tahun 2007 adalah sektor Pengangkutan & Komunikasi; Listrik, Gas & Air Bersih; Industri Pengolahan; Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa. Sedangkan sektor Pertanian hanya menempati peringkat ke tujuh setelah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran. Secara ringkas dijabarkan ke lima sektor tersebut sebagai berikut:

a. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi diantara sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2007 adalah sebesar 12,17%. Pada tahun 2006 sektor pengangkutan dan komunikasi ini juga mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor lain di Kabupaten Padang Pariaman, yakni sebesar 161,84%.

Pertumbuhan yang tergolong tinggi ini selama dua tahun berturut-turut (2005-2007) dikarenakan terdapatnya sub sektor angkutan udara sebagai salah satu sub sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Pertumbuhan sub sektor angkutan udara sendiri pada tahun 2007 adalah sebesar 13,56%.

Pada tahun 2005 kegiatan angkutan udara yang berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman hanya berlangsung dalam lima bulan terakhir tahun 2005 yaitu dari Agustus hingga Desember 2005, sehingga penghitungan nilai tambah untuk kegiatan angkutan udara yang dihasilkan di Kabupaten Padang Pariaman hanya dihitung selama lima bulan tersebut, sedangkan tujuh bulan sisanya merupakan nilai tambah yang dihasilkan di Kota Padang dimana kegiatan angkutan udara tersebut berlangsung selama tujuh bulan pertama tahun 2005.

Pada tahun 2006 dan 2007 kegiatan angkutan udara yang berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman sudah berlangsung sepanjang tahun tersebut, sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan angkutan udara tersebut merupakan penjumlahan dari nilai tambah yang dihasilkan kegiatan angkutan udara dari Januari-Desember tahun 2006 dan 2007. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor angkutan dan komunikasi ini ditengarai salah satunya dipengaruhi dengan adanya investasi besar berupa bandar udara di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum

Pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air minum pada tahun 2007 adalah sebesar 8,68%, sementara pada tahun 2006 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,69%. Nilai tambah sektor listrik dan air minum dibentuk oleh sub sektor listrik dan sub sektor air minum.

c. Sektor Industri Pengolahan

Pertumbuhan sektor industri pengolahan sangat ditentukan oleh naik turunnya usaha industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki serta industri barang dari kayu dan hasil-hasil hutan. Peran kedua kelompok industri tersebut dalam pembentukan nilai tambah sektor industri pengolahan di Kabupaten Padang Pariaman sangat besar, ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan nilai tambah sektor industri pengolahan.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2007 tumbuh sebesar 6,24% angka ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2006 yang tumbuh sebesar 5,99%. Peningkatan nilai tambah pada sektor industri pengolahan ini seiring dengan naiknya jumlah unit usaha pada industri kecil hasil pertanian dan kehutanan baik formal maupun non formal yang mendominasi jumlah unit usaha industri di Kabupaten Padang Pariaman, di samping itu jumlah unit usaha kelompok industri aneka, industri kecil, logam, dan kimia juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2006.

d. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan selama tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 5,54%, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun 2006 sebesar 5,34%. Nilai tambah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dibentuk oleh empat sub sektor, yakni sub sektor bank, sub sektor lembaga keuangan bukan bank, sub sektor sewa bangunan, dan sub sektor jasa perusahaan.

e. Sektor Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan yang sedikit lebih cepat dibandingkan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 4,47%, sedangkan pada tahun sebelumnya sektor jasa-jasa ini tumbuh sebesar 3,62%. Pertumbuhan sektor jasa dibentuk oleh sub sektor pemerintahan umum dan sub sektor swasta.

4.6.2. Analisis Sektoral

Untuk mengetahui sektor-sektor apa yang cukup dominan dalam menopang laju pertumbuhan PDRB atau ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, hal ini amat ditentukan oleh kontribusi sektoral yang menunjukkan peranan sektor-sektor dalam pembentukan PDRB.

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa perekonomian Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2007 masih bertumpu pada sektor Pertanian sebagai sektor andalan. Sektor pertanian pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar 25,117% terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman, turun sekitar setengah poin dibanding tahun 2006 (25,66%). Sub sektor yang paling dominan

memberikan kontribusi pada sektor Pertanian adalah tanaman pangan sebesar 16,73%.

Tabel 4.5. Distribusi Persentase Sektor PDRB Kab. Padang Pariaman ADHK 2000, menurut Lapangan Usaha 2003-2007

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Sektorial (%)				
	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	31,17	31,01	29,72	25,66	25,11
2. Peggalian	4,95	5,05	4,44	3,70	3,57
3. Industri Pengolahan	14,32	14,49	13,56	12,07	12,09
4. Listrik dan Air Minum	1,42	1,45	1,43	1,34	1,37
5. Bangunan	5,50	5,72	5,44	4,87	4,76
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,96	14,94	14,07	12,28	12,08
7. Angkutan dan Komunikasi	4,20	4,19	9,60	21,10	22,32
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,59	2,59	2,47	2,20	2,18
9. Jasa-Jasa	20,90	20,57	19,27	16,78	16,52

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2008.

Kontribusi terbesar ke dua berada pada sektor Pengangkutan & Komunikasi yaitu sebesar 22,23%, dibanding tahun 2006 terjadi kenaikan sekitar 1,22 poin dengan kontribusi sebesar 21,10%. Pada sektor Pengangkutan & Komunikasi ini, sub sektor angkutan udara merupakan penyumbang terbesar yaitu 18,10%. Tingginya kontribusi sub sektor angkutan udara ini disinyalir disebabkan telah beroperasinya Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berada di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sejak Agustus 2005.

Sektor jasa-jasa yang pada tahun 2007 menempati urutan ke tiga sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Padang Pariaman sebesar 16,52% dengan sub sektor pemerintahan umum sebagai penyumbang terbesar yaitu 13,76%, bila dibandingkan tahun lalu terjadi sedikit penurunan kontribusi pada tahun 2006 (16,78%).

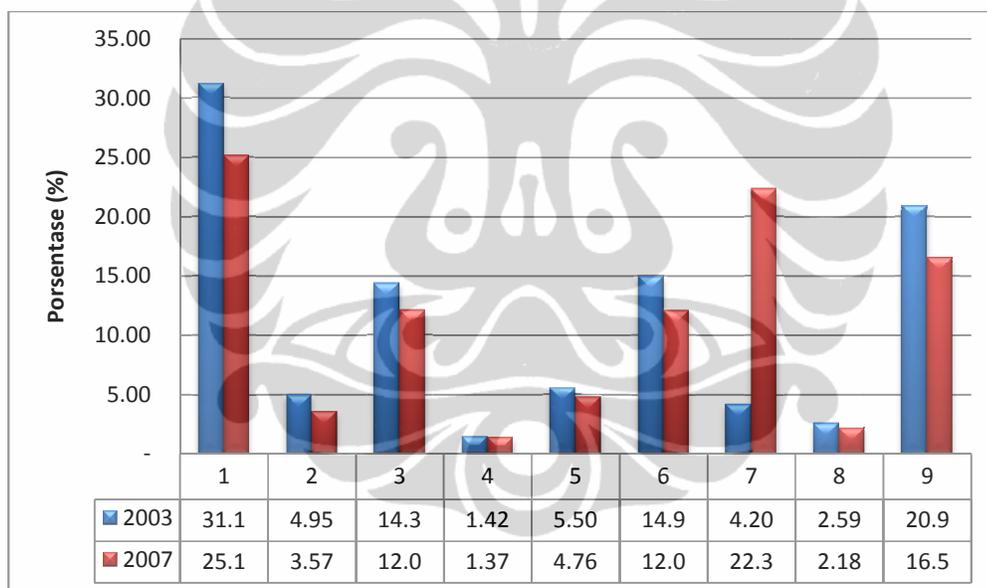
Urutan ke empat penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 12,09%, pada tahun 2006 sektor ini berada pada urutan ke lima dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 12,07%.

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2007 ini menempati urutan ke lima terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 12,08%, bila dibanding tahun lalu sektor ini berada pada

urutan ke empat terbesar yaitu sebesar 12,28% terhadap total PDRB Kabupaten Padang Pariaman, dengan sub sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar sebesar 11,81%.

Berikutnya sektor bangunan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 4,76% terhadap total PDRB Kabupaten Padang Pariaman, sedikit menurun bila dibanding tahun lalu dengan kontribusi sebesar 4,87% terhadap total PDRB Kabupaten Padang Pariaman.

Apabila dilakukan perbandingan PDRB antara tahun 2003 dengan 2007, secara keseluruhan terjadi penurunan di semua sektor PDRB kecuali sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mengalami kenaikan yang cukup drastis dari 4,20% menjadi 22,32% selama kurun lima tahun, seperti terlihat jelas pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman (2003 dan 2007)

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2008, data diolah.

Kelompok sektor primer meliputi kegiatan yang outputnya masih merupakan output proses tingkat dasar. Yang termasuk kelompok sektor primer adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya, sektor yang sebagian besar inputnya berasal dari sektor primer dikelompokkan ke dalam kelompok sektor sekunder. Kelompok sektor sekunder meliputi sektor

industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum serta sektor bangunan. Sedangkan sektor lainnya, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam sektor tersier.

Selama tahun 2007 struktur ekonomi Kabupaten Padang Pariaman masih didominasi oleh sektor tersier, sedangkan andil kelompok sektor primer dan sekunder cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Padang Pariaman semakin bertumpu pada sektor tersier.

Andil kelompok sektor tersier pada tahun 2007 adalah sebesar 53,40% terhadap total PDRB. Pada tahun 2006 kelompok sektor tersier memberikan andil sebesar 52,90%. Nilai tambah pada kelompok sektor tersier sebagian besar bersumber dari sektor angkutan dan komunikasi sebesar 43,92% terhadap total nilai tambah pada kelompok sektor tersier. Kelompok sektor primer selama tahun 2007 memberikan sumbangan nilai tambah sebanyak 29,11% terhadap total PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian besar nilai tambah kelompok sektor ini disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 86,80% dari total nilai tambah pada kelompok sektor primer.

Kelompok sektor yang memberikan nilai tambah paling kecil adalah kelompok sektor sekunder, dengan sumbangan sebesar 17,49% terhadap total PDRB. Sebagian besar nilai tambah kelompok sektor ini disumbangkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 63,20% dari total nilai tambah pada kelompok sektor sekunder. Tabel 4.6 memperlihatkan kontribusi kelompok sektor PDRB dari tahun 2003-2007.

**Tabel 4.6. Kontribusi Kelompok Sektor PDRB
Kabupaten Padang Pariaman ADHB 2003-2007 (%)**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Primer	35,11	35,02	34,92	30,18	29,11
Sekunder	21,78	22,11	19,50	16,92	17,49
Tersier	43,11	42,87	45,57	52,90	53,40
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka, berbagai tahun penerbitan.

Dilihat dari hasil produksi produk-produk pertanian secara lebih detail maka akan dapat dilihat sumber daya lokal mana yang menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman ini terlebih lagi dibandingkan dengan daerah lain dalam Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data BPS Propinsi Sumatera Barat 2008, pada sektor pertanian khususnya hasil produksi Padi Sawah, Kabupaten Padang Pariaman menempati urutan ke enam dari 19 daerah setelah Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten 50 Kota, dengan hasil panen 200.019 ton sementara produksi Ubi Kayu menempati urutan ke lima dengan hasil 10.478 ton.

Tabel 4.7. Hasil Panen Produk-Produk Pertanian Kabupaten Padang Pariaman 2007 (Ton)

Jenis Produk	Hasil Panen	Peringkat di Sumbar
1. Kelapa	33.617	1
2. Kacang Panjang	1.401	1
3. Ketimun	2.733	2
4. Pisang	7.138	2
5. Nenas	16	2
6. Pepaya	1.239	2
7. Kangkung	602	3
8. Bayam	331	3
9. Durian	3.674	3
10. Mangga	423	3
11. Kulit Manis	5.983	3
12. Terung	1.324	4
13. Pala	114	4
14. Cabe	1.794	5
15. Ubi Kayu	10.478	5
16. Rambutan	1.236	5

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2008, data diolah

Tabel 4.7 dijabarkan hasil produk-produk pertanian Kabupaten Padang Pariaman yang menempati urutan lima besar di Propinsi Sumatera Barat. Dari hasil panen produk-produk pertanian di atas sebagian kecil dikonsumsi oleh masyarakat atau industri-industri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan sebagian besar dibawa ke luar Kabupaten Padang Pariaman untuk dijual mentah ke daerah-daerah tetangga Kabupaten Padang Pariaman bahkan sampai ke luar Propinsi Sumatera Barat seperti Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

Di dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman sendiri, produksi buah kelapa ini diserap oleh industri pengolahan kelapa untuk dijadikan minyak kelapa, santan, *nata de coco*, dll. Perusahaan terbesar yang menggunakan hasil panen kelapa ini di Kabupaten Padang Pariaman adalah PT. Bumi Sarimas Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Batang Anai bersebelahan dengan lokasi Padang Industrial Park.

Secara umum, produksi hasil pertanian Kabupaten Padang Pariaman cukup kompetitif dibanding dengan daerah lain dan sangat menguntungkan apabila dijadikan sumber bahan baku pembuatan produk-produk hasil olahan dari hasil pertanian tersebut, misalnya produk olahan sari buah.

Pada sektor Peternakan, ternak Kerbau, Kambing, Ayam Buras, Ikan merupakan jenis ternak terbanyak populasinya dibanding 19 daerah lainnya di Sumatera Barat, sebagaimana terpapar dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Populasi Ternak Kabupaten Padang Pariaman 2007 (Ekor)

Jenis Ternak	Populasi	Peringkat di Sumbar
1. Kerbau	40.302	1
2. Kambing	30.152	1
3. Ayam Buras	829.642	1
4. Ikan Perairan Umum	3.842	1
5. Ikan Budi Daya	19.493	1
6. Ikan Laut Segar	55.296	2
7. Sapi Potong	59.976	2
8. Itik Manila	118.545	2
9. Benih Ikan BBI	2.149	2
10. Benih Ikan Perikanan Rakyat	31.794	3
11. Benih Ikan Perairan Umum	201	4
12. Ayam Ras Pedaging	1.884.037	4
13. Ayam Ras Petelur	355.500	5

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2008, data diolah

Beberapa jenis ternak yang umum dikonsumsi oleh manusia, daerah Kabupaten Padang Pariaman mengungguli beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat dari segi populasi. Melihat jumlah populasi ternak yang begitu signifikan dapat diyakini bahwa usaha bisnis di sektor peternakan ini menjadi investasi yang cukup menggiurkan di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu beberapa bentuk usaha lain mengikuti banyaknya populasi ternak ini pun bisa dimunculkan, misalnya industri pakan ternak, kerajinan kerupuk kulit, dll.

Pada dasarnya sektor-sektor perekonomian dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok sektor, yaitu kelompok sektor primer, sekunder, dan tersier. Pengelompokan kegiatan ekonomi ini didasarkan atas input-output dan atas asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen.

4.7. Keunggulan Komparatif Kabupaten Padang Pariaman

4.7.1. Keunggulan Komparatif Kabupaten Padang Pariaman terhadap Propinsi Sumatera Barat

Sektor unggulan di Kabupaten Padang Pariaman dan kontribusi sektoral dari Kabupaten Padang Pariaman terhadap Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Padang Pariaman terhadap Propinsi Sumatera Barat dan Kontribusi Sektoral ADHK 2000 (2003-2007)

No.	LAPANGAN USAHA	PDRB 2003			PDRB 2005			PDRB 2007		
		Kontrb (%)	LQ	Ket	Kontrb (%)	LQ	Ket	Kontrb. (%)	LQ	Ket
1.	Pertanian	31,17	1,24	B	29,72	1,19	B	25,11	1,03	B
2.	Pertambangan & Penggalian	4,95	1,45	B	4,44	1,36	B	3,57	1,14	B
3.	Industri Pengolahan	14,32	1,08	B	13,56	1,04	B	12,09	0,95	NB
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	1,42	1,30	B	1,43	1,23	B	1,37	1,15	B
5.	Bangunan	5,50	1,13	B	5,44	1,10	B	4,76	0,96	NB
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	14,96	0,82	NB	14,07	0,77	NB	12,08	0,66	NB
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,20	0,35	NB	9,60	0,75	NB	22,32	1,62	B
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,59	0,52	NB	2,47	0,49	NB	2,18	0,42	NB
9.	Jasa-Jasa	20,90	1,23	B	19,27	1,17	B	16,52	1,02	B

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2008, Sumbar Dalam Angka 2008, data diolah.

Dalam Tabel 4.9, terlihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2007 memiliki lima sektor basis dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Listrik, Gas dan Air Bersih
4. Pengangkutan dan Komunikasi
5. Jasa-jasa.

Gambaran ini konsisten sejak tahun 2003 kecuali pada sektor bangunan dan industri pengolahan yang memang dari tahun ke tahun cenderung menurun sehingga pada tahun 2007 tidak menjadi sektor basis lagi.

Untuk sektor Pertambangan & Penggalian dan sektor Listrik, Gas & Air Bersih walaupun merupakan sektor basis, tetapi kontribusinya sangat rendah dibandingkan sektor lain yang non basis seperti sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Bangunan. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi muncul sebagai sektor basis pada tahun 2007, hal ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Sektor-sektor yang dominan membentuk PDRB ini juga cukup mewakili masing-masing sektoral PDRB yaitu, primer, sekunder dan tersier, ini menunjukkan adanya ketergantungan pada sumberdaya alam. Namun kondisi kebiasaan merantau atau sering melakukan perjalanan masyarakat etnis Minangkabau khususnya ditambah dengan kesukaan mereka bekerja di sektor jasa dan perdagangan, maka sektor tersier akan mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten Padang Pariaman.

4.7.2. Keunggulan Komparatif Kabupaten Padang Pariaman terhadap Nasional

Dengan metode yang sama, data PDRB dan kontribusi sektoral dan pertumbuhannya di Kabupaten Padang Pariaman dan PDB Nasional dapat dilakukan penghitungan untuk mencari keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Nasional dengan mengetahui sektor basis dan non basisnya.

Pada Tabel 4.10 terlihat hasil perhitungan LQ dan sektor-sektor yang mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten Padang Pariaman dapat diketahui dari kontribusi sektoral dari analisis sektor basis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Nasional terdapat empat sektor basis di Kabupaten Padang Pariaman. Sektor-sektor tersebut adalah:

1. Pertanian
2. Listrik, Gas dan Air Bersih
3. Pengangkutan dan Komunikasi
4. Jasa-jasa.

Tabel 4.10. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Padang Pariaman terhadap Nasional dan Kontribusi Sektoral ADHK 2000 (2003-2007)

LAPANGAN USAHA	PDRB 2003			PDRB 2005			PDRB 2007		
	Kontrb (%)	LQ	Ket	Kontrb (%)	LQ	Ket	Kontrb. (%)	LQ	Ket
1. Pertanian	31,17	2,04	B	29,72	2,05	B	25,11	1,82	B
2. Pertambangan & Penggalian	4,95	0,47	NB	4,44	0,47	NB	3,57	0,41	NB
3. Industri Pengolahan	14,32	0,51	NB	13,56	0,48	NB	12,09	0,44	NB
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,42	2,16	B	1,43	2,16	B	1,37	1,99	B
5. Bangunan	5,50	0,97	NB	5,44	0,92	NB	4,76	0,77	NB
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	14,96	0,92	NB	14,07	0,84	NB	12,08	0,70	NB
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,20	0,77	NB	9,60	1,54	B	22,32	3,07	B
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,59	0,29	NB	2,47	0,27	NB	2,18	0,23	NB
9. Jasa-Jasa	20,90	2,27	B	19,27	2,10	B	16,52	1,78	B

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2008, Sumbar Dalam Angka 2008, data diolah.

Gambaran ini juga konsisten sejak tahun 2003 kecuali pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang muncul menjadi sektor basis mulai tahun 2005. Kalau dibandingkan dengan hasil penghitungan LQ antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Propinsi Sumatera Barat maka sektor basis pada penghitungan dengan Nasional hanya berkurang satu sektor basis yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian.

Nilai LQ ini jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sektoral Kabupaten Padang Pariaman tertinggi (lihat Tabel 3.4) hanya dua sektor yang sama, yaitu sektor Pengangkutan & Komunikasi dan Listrik, Gas & Air. Sementara sektor Pertanian dan Jasa-jasa pada rata-rata pertumbuhan PDRB sektoral masing-masing berada di peringkat tujuh dan delapan.

Setelah melihat LQ antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional, berdasarkan perhitungan yang sama dapat juga dilihat keunggulan komparatif Kabupaten Padang Pariaman relatif terhadap kabupaten/kota di seluruh Propinsi Sumatera Barat.

Pada Tabel 4.11 dapat dilihat jumlah sektor unggulan Kabupaten Padang Pariaman yaitu berjumlah lima sektor, yaitu: Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Pengangkutan dan Komunikasi dan Jasa-jasa. Pada sektor pertanian, Kabupaten Padang Pariaman bersaing ketat dengan

hampir seluruh kabupaten/kota yang ada terutama di tingkat kabupaten bahkan mendapat nilai LQ paling kecil di antara 13 kabupaten/kota.

Tabel 4.11. Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat ADHK 2000 menurut Lapangan Usaha (2007)

Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah Sektor Unggulan
1. Mentawai	2,20	0,12	0,69	0,10	0,46	1,20	0,42	0,21	0,29	2
2. Pesisir Selatan	2,00	0,72	1,50	0,79	1,22	1,87	0,32	1,22	1,82	6
3. Solok	1,71	1,04	0,56	0,33	1,11	0,77	0,76	0,40	0,91	3
4. Sijunjung	1,14	5,01	0,39	0,78	2,05	0,63	0,51	0,74	1,05	4
5. Tanah Datar	1,52	0,56	0,93	0,73	1,48	0,73	0,42	0,91	1,01	3
6. Padang Pariaman	1,03	1,14	0,95	1,15	0,96	0,66	1,62	0,42	1,02	5
7. Agam	1,40	1,17	1,08	0,79	0,90	0,96	0,34	0,71	0,98	3
8. Lima Puluh Kota	1,40	1,88	0,74	0,35	0,52	1,25	0,35	0,54	0,99	3
9. Pasaman	2,07	0,74	0,35	0,30	0,65	0,68	0,32	0,78	1,06	2
10. Solok Selatan	1,55	1,87	0,79	0,60	1,40	1,01	0,48	0,47	0,61	4
11. Dharmasraya	1,58	1,20	0,53	0,83	2,19	0,63	0,49	0,76	0,98	3
12. Pasaman Barat	1,26	0,30	1,76	0,11	0,63	1,40	0,27	0,39	0,62	3
13. Padang	0,21	0,46	1,29	1,44	0,84	1,20	1,94	1,49	1,00	6
14. Solok	0,37	0,20	0,76	2,51	2,50	0,60	1,66	1,54	1,51	5
15. Sawahlunto	0,28	8,09	0,97	0,55	1,04	0,53	0,63	1,04	1,53	4
16. Padang Panjang	0,46	0,13	0,78	2,15	1,46	0,64	1,59	1,99	1,58	5
17. Bukittinggi	0,11	0,01	0,84	2,11	0,77	1,14	1,79	1,96	1,6	5
18. Payakumbuh	0,45	0,12	0,50	1,21	1,47	1,02	1,58	1,90	1,5	6
19. Pariaman	1,16	0,56	0,97	1,04	1,63	0,64	0,90	1,62	0,97	4

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2008, data diolah.

Keterangan : 1. Pertanian, 2. Pertambangan & Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Listrik, Gas & Air Bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, Hotel & Restoran, 7. Pengangkutan & Komunikasi, 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, 9. Jasa-jasa.

Pada sektor pertambangan dan penggalian bersaing dengan delapan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman sendiri sektor ini sebenarnya tidak bisa lagi dikembangkan lebih jauh lagi, ini bisa dilihat dari rata-rata pertumbuhannya menduduki peringkat terakhir dari semua sektor yang ada.

Sektor ke empat dan ke tujuh atau sektor listrik, gas dan air bersih dan pengangkutan dan komunikasi adalah sektor yang paling unggul bagi Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan 12 kabupaten lainnya, saingan beratnya justru hanya seluruh kota yang ada. Sedangkan sektor jasa-jasa, hampir seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat memiliki keunggulan serupa, hal ini disinyalir kecenderungan masyarakat Sumatera Barat bergerak di usaha sektor jasa.

Dilihat dari segi jumlah, Kabupaten Padang Pariaman cukup bersaing dibandingkan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat di mana Kabupaten Padang Pariaman berada pada tujuh besar daerah yang memiliki sektor unggulan di atas lima dan berada di urutan kedua setelah Kabupaten Pesisir Selatan di kategori kabupaten.

4.8. Analisis *Shift Share*

Analisis Shift-Share merupakan suatu analisis dengan metode yang sederhana dan sering dilakukan oleh praktisi dan pembuat keputusan baik lokal maupun regional di seluruh dunia untuk menetapkan target industri/sector dan menganalisis dampak ekonomi. Analisis ini memungkinkan pelaku analisis untuk dapat mengidentifikasi keunggulan daerahnya dan menganalisis industri/sector yang menjadi dasar perekonomian daerah.

Analisis ini juga merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sector atau industri pada perekonomian regional maupun lokal. Analisis ini menggambarkan kinerja sector-sector di suatu wilayah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Bila suatu daerah memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional, maka akan dapat ditemukan adanya shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah. Selain itu laju pertumbuhan sector-sector di suatu wilayah akan dibandingkan dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional beserta sector-sektornya. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari perbandingan tersebut. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sector dalam wilayah tersebut (Soepono, 1993:44).

4.8.1. Analisis *Shift Share* Kabupaten Padang Pariaman terhadap Propinsi Sumatera Barat

Hasil perhitungan *shift share* Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat menghasilkan nilai seperti Tabel 4.12.

Angka *regional share* (R) 440.759 memiliki arti bahwa besarnya nilai tambah Kabupaten Padang Pariaman seandainya memiliki tingkat laju pertumbuhan yang sama dengan Propinsi Sumatera Barat.

Nilai *proporsional shift* (Sp) Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan adalah negatif sebesar 35.875. Angka negatif ini menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman mempunyai komposisi sektor-sektor industri dengan tingkat pertumbuhan lebih lambat jika dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Tabel 4.12. Nilai *Shift Share* Kabupaten Padang Pariaman 2003-2007 dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat

Lapangan Usaha	G	R	Sp	Sd	S
1. Pertanian	94.285	137.368	(17.417)	(25.667)	(43.083)
2. Pertambangan & Penggalian	4.519	21.803	(9.127)	(8.158)	(17.284)
3. Industri Pengolahan	57.065	63.117	(11.366)	5.314	(6.052)
4. Listrik, Gas & Air Bersih	10.020	6.250	3.107	663	3.770
5. Bangunan	24.798	24.249	1.327	(777)	550
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	46.088	65.932	3.792	(23.635)	(19.844)
7. Pengangkutan & Komunikasi	484.150	18.506	12.264	453.381	465.645
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	10.118	11.418	2.141	(3.440)	(1.300)
9. Jasa-Jasa	55.377	92.117	(20.595)	(16.145)	(36.740)
Jumlah	786.421	440.759	(35.875)	381.536	345.661

Sumber: Sumbang dalam Angka dan Padang Pariaman dalam Angka, dua tahun penerbitan, nilai hasil perhitungan penulis.

Catatan: Angka dalam kurung bernilai negative.

Sedangkan *differential shift* (Sd) sebesar 381.536 menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki keuntungan lokasional dalam hal sumberdaya yang dimilikinya. Ini berarti bahwa Kabupaten Padang Pariaman diuntungkan secara lokasi dari segi sumberdaya dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Nilai-nilai positif pada *differential shift* masing-masing sektor menunjukkan bahwa sektor dimaksud merupakan sektor unggulan Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa sektor unggulan Kabupaten Padang Pariaman dalam skala Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Lapangan Usaha	Keterangan
1. Bangunan 2. Perdagangan, Hotel dan Restoran, 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Sektor favorit untuk skala Propinsi Sumatera Barat, tetapi tidak di Kabupaten Padang Pariaman

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Jasa-jasa	Bukan sektor unggulan untuk skala Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman
<i>Industri Pengolahan</i>	Tidak menjadi sektor unggulan untuk skala Propinsi Sumatera Barat, namun bisa menjadi sektor unggulan Kabupaten Padang Pariaman
1. <i>Listrik, Gas dan Air Bersih</i> 2. <i>Pengangkutan dan Komunikasi</i>	Sektor favorit untuk skala Propinsi Sumatera Barat dan bisa dijadikan sektor unggulan dan terus dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman

4.8.2. Analisis *Shift Share* Kabupaten Padang Pariaman terhadap Nasional
Hasil perhitungan *shift share* Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Nasional menghasilkan nilai seperti Tabel 4.13.

Angka *regional share* (R) 316.143 menunjukkan arti bahwa besarnya nilai tambah Kabupaten Padang Pariaman seandainya memiliki tingkat laju pertumbuhan yang sama dengan Nasional.

Nilai *proporsional shift* (Sp) Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan adalah negatif sebesar 16.838. Angka negatif ini menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman mempunyai komposisi sektor-sektor industri dengan tingkat pertumbuhan lebih lambat jika dibandingkan dengan Nasional secara keseluruhan. Ini menyiratkan bahwa kondisi ini tidak bagus dan tidak menguntungkan bagi Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 4.13. Nilai Shift Share Kabupaten Padang Pariaman 2003-2007 dibandingkan dengan Nasional

Sektor	G	R	Sp	Sd	S
1. Pertanian	94.285	98.530	(46.074)	41.829	(4.245)
2. Pertambangan & Penggalian	4.519	15.639	(9.712)	(1.408)	(11.120)
3. Industri Pengolahan	57.065	45.272	(9.913)	21.706	11.793
4. Listrik, Gas & Air Bersih	10.020	4.483	1.341	4.196	5.537
5. Bangunan	24.798	17.393	7.477	(71)	7.406
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	46.088	47.291	16.424	(17.627)	(1.203)
7. Pengangkutan & Komunikasi	484.150	13.274	20.712	450.165	470.877
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	10.118	8.190	1.310	619	1.929
9. Jasa-Jasa	55.377	66.073	1.597	(12.293)	(10.696)
Jumlah	786.421	316.143	(16.838)	487.115	470.278

Sumber: Statistik Indonesia dan Padang Pariaman dalam Angka, dua tahun penerbitan, nilai hasil perhitungan penulis.
Catatan: Angka dalam kurung bernilai negatif.

Sedangkan *differential shift* (Sd) sebesar 487.115 menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki keuntungan lokasional dalam hal sumberdaya yang dimilikinya.

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat bahwa sektor unggulan Kabupaten Padang Pariaman dalam skala Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Lapangan Usaha	Keterangan
1. <i>Pertanian</i> 2. <i>Industri Pengolahan</i>	Tidak menjadi sektor unggulan untuk skala Nasional, namun sektor unggulan untuk Kabupaten Padang Pariaman
Pertambangan dan Penggalian	Tidak menjadi sektor unggulan untuk skala Nasional dan Kabupaten Padang Pariaman
1. <i>Listrik, Gas dan Air Bersih</i> 2. <i>Pengangkutan dan Komunikasi</i> 3. <i>Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</i>	Sektor ini merupakan sektor favorit untuk skala Nasional dan bisa dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Padang Pariaman.
1. Bangunan 2. Perdagangan, Hotel dan Restoran 3. Jasa-jasa	Sektor ini merupakan sektor favorit untuk skala Nasional namun tidak di Kabupaten Padang Pariaman

4.9. Sarana dan Prasarana

4.9.1. Transportasi Darat

Perhubungan antara daerah perdesaan dan perkotaan dalam Kabupaten Padang Pariaman, serta antara Kabupaten Padang Pariaman dengan daerah lainnya dalam propinsi dan luar propinsi cukup lancar. Kota Pariaman sebagai Ibukota Kabupaten relatif dengan Kota Padang (56 km), Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi dan Lubuk Basung (Kabupaten Agam). Perhubungan antar daerah tersebut melalui perhubungan darat dengan jaringan jalan yang sangat baik dan memadai.

Sistim jaringan jalan raya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman terbentuk oleh arus mobilisasi penduduk dengan pusat-pusat kegiatan dan perekonomian. Jalan-jalan tersebut menghubungkan pelosok-pelosok desa (nagari) dengan pusat-pusat perekonomian di daerah Kabupaten Padang Pariaman

dan antara daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan sekitarnya baik yang berada diwilayah Sumatera Barat maupun dengan propinsi lainnya.

Pada umumnya kondisi jalan di daerah Kabupaten Padang Pariaman cukup baik dengan pengkerasan aspal (*hotmix* dan *macadam*). Jalan tersebut terdiri dari jalan nasional sepanjang 84,30 km, jalan Propinsi 83,65 km, serta jalan Kabupaten sepanjang 1.312,15 km.

Jenis perhubungan darat lainnya adalah kereta api. Jaringan jalan kereta api ini merupakan bagian dari jaringan jalan kereta api Kota Padang - Naras (Kota Pariaman) dan Kota Padang – Kota Padang Panjang – Kota Sawahlunto dengan stasiun persimpangan di Kecamatan Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman). Saat ini angkutan kereta api cukup membantu dalam menunjang perhubungan rutin setiap hari, angkutan wisata dari Kota Padang ke Kota Pariaman (tiap hari minggu) serta angkutan wisata (cateran) dari Kota Padang ke Desa Kandang Ampek (Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman).

Angkutan kereta api mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan menjadi angkutan penumpang dan angkutan barang terutama dari Kota Pariaman ke Kota Padang dan Teluk Bayur sebagai pelabuhan ekspor terbesar di pantai barat Sumatera.

4.9.2. Perhubungan Laut

Untuk perhubungan laut, Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki sarana yang memadai. Untuk angkutan laut baik angkutan penumpang maupun angkutan barang dari Kabupaten Padang Pariaman ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dan daerah lain di Propinsi Sumatera Barat menggunakan fasilitas Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Muara Padang serta Pelabuhan Penyeberangan (ASDP) Bungus yang terdapat di Kota Padang, hal ini dimungkinkan karena jarak daerah ini yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Kota Padang.

4.9.3. Perhubungan Udara

Pelayanan angkutan umum lewat udara melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang melayani angkutan penumpang maupun angkutan barang (kargo). Bandara dengan standar internasional ini berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di Kecamatan Batang Anai, 50 km dari ibukota Kabupaten Padang Pariaman dan 20 km dari Kota Padang.

4.9.4. Listrik

Kabupaten Padang Pariaman mempunyai sumber energi listrik yang cukup tinggi yang berasal dari PLTA Danau Singkarak di Kecamatan Lubuk Alung dengan daya terpasang 175 MW di samping yang berasal dari sumber lain seperti PLTA Danau Maninjau. Dengan demikian daerah Kabupaten Padang Pariaman diperkirakan tidak akan kekurangan pasokan energi listrik dalam jangka panjang. Saat ini hampir seluruh desa telah terlayani fasilitas kelistrikan.

4.9.5. Telekomunikasi

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat enam STO yang terletak di Kota Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung, Sicincin (Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung), Kayu Tanam (Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam), Sungai Limau (Kecamatan Sungai Limau) serta Pauh Kamar (Kecamatan Nan Sabaris). Dengan demikian hampir seluruh Ibu Kota Kecamatan serta lebih dari 50% daerah Kabupaten Padang Pariaman telah dijangkau oleh saluran telepon.

4.9.6. Sumber Daya Air

Sumber air tanah dan sungai di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2007 tercatat sebanyak 11 buah dengan tersedia sumber air yang cukup melimpah dengan kualitas air yang baik dan penyebaran yang cukup merata. Sumber air ini sebagian telah digunakan oleh industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) seperti merek Sling, Elbi dan Asia Bagus, dan untuk saluran irigasi bagi pertanian dan perikanan darat serta sumber air bersih PDAM yang disalurkan untuk kebutuhan industri dan perumahan. Namun sumber air lainnya masih tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup banyak.

4.9.7. Perbankan/Lembaga Keuangan

Sebagai pendukung dan penggerak ekonomi, di Kabupaten Padang Pariaman terdapat tiga buah Bank yaitu BNI, BRI dan Bank Nagari (BPD) dengan beberapa kantor cabang dan unit. Di samping itu juga masih terdapat BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di beberapa ibukota kecamatan. Sebagai daerah yang dekat dan berbatasan langsung dengan Kota Padang maka bank-bank dan lembaga keuangan lainnya yang terdapat di Kota Padang juga sangat menunjang kegiatan ekonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pada akhir tahun 2007, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendirikan sebuah lembaga perbankan milik daerah yang diberi nama PT. Bank Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman (PT. BPKPP), dengan saham mayoritas berasal dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Keberadaan bank ini pun turut serta menggairahkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman.

4.9.8. Kawasan Industri

Kegiatan investasi dan perekonomian juga ditunjang dengan fasilitas Kawasan Industri (Padang Industrial *Park*) yang berlokasi di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai, perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Padang, saat ini sudah terdapat industri besar dan sedang di lokasi ini. Lokasi Kawasan Industri ini sangat strategis karena terdapat di perbatasan Kota Padang dan dekat dengan Pelabuhan Teluk Bayur, maupun Bandara Internasional Minangkabau di Nagari Ketaping.

Di samping itu juga terdapat beberapa industri besar di luar kawasan industri seperti industri makanan dan minuman dan beberapa industri lainnya. Di samping industri besar dan menengah juga terdapat kegiatan industri rumah tangga dan kerajinan dengan produknya yang cukup terkenal seperti emping melinjo (Kecamatan Ulakan Tapakis); konveksi/bordir (Kecamatan Sungai Limau); kerajinan dari kulit (Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan VII Koto); kerajinan anyaman pandan (Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, dll); batu bata (di hampir seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman); serta beberapa industri lainnya.

4.10. Kebijakan Daerah dan Instansi Pelayanan

Kebijakan daerah terhadap peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman tidak bisa dilepaskan dari koordinasi pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui instansi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Barat Bidang Investasi Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Aim Zein pernah mengatakan bahwa implementasi layanan satu atap diperlukan untuk menciptakan efisiensi. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat harus segera mendorong implementasi *one*

stop service (layanan satu atap) sebagai alternatif dalam memangkas hambatan izin investasi pariwisata di Propinsi Sumatera Barat (Harian Bisnis Indonesia, 2 Januari 2007).

Lebih lanjut Aim Zein mengatakan, pelayanan terpadu itu juga perlu untuk efektivitas birokrasi pemerintahan dalam pengurusan investasi. "Implementasi *one stop service* di tingkat kabupaten dan kota sangat mendesak, tapi Pemprov Sumbar harus mendorongnya dengan memberikan panduan teknis implementasi di tingkat kabupaten dan kota," (Zein, 2007).

Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia itu menjelaskan banyak masalah yang dihadapi investor yang akan berinvestasi di sektor pariwisata. Sebagai gambaran, pada tahap survei saja, calon investor kesulitan mendapatkan data yang akurat untuk dijadikan referensi dalam membuat proposal.

Masalah legalitas tanah juga menjadi momok yang sangat menakutkan bagi investor untuk berinvestasi di Sumbar. Sementara itu, pemerintah daerah belum mampu memberikan jaminan hak atas tanah bagi investor. Setelah investasi terealisasi, hambatan itu masih berlanjut seperti pungutan liar, masalah keamanan dan kenyamanan dari warga sekitar, infrastruktur yang tidak mendukung dan retribusi yang relatif mahal. "Pemerintah harus berani memberikan insentif kepada investor dan pengusaha daerah ini dalam rangka meningkatkan daya saing" (Zein, 2007).

Seiring dengan desakan dunia usaha terhadap kinerja pemerintah Propinsi Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga tidak tinggal diam untuk menyegerakan perbaikan iklim investasi melalui kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap investor sesuai dengan peraturan-peraturan penanaman modal yang telah ditetapkan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah propinsi.

Pada bulan April 2007 setelah melalui berbagai pertimbangan dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun disahkanlah Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang

Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Hal ini dilakukan karena UU yang lama tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Mencermati perkembangan perundang-undangan ini di tingkat nasional, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga jauh hari sebelumnya telah mengambil anjang-ancang merumuskan peraturan daerah dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan UU 25/2007 tersebut.

Dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga telah menetapkan Pengembangan Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah melalui Penciptaan Iklim yang Kondusif bagi Investasi sebagai salah satu prioritas pembangunannya di tahun 2010.

Sebagai tahap proses menuju prioritas pembangunan dimaksud, pemerintah daerah telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan penanaman modal sebagai tujuan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Padang Pariaman.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah merumuskan Prosedur Tetap (Protap) Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman yang berguna sebagai panduan penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman. Prosedur ini dikukuhkan oleh Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2006 dan dibukukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman penanaman modal di wilayah Kabupaten Padang Pariaman sebelum hadirnya aturan hukum yang lebih kuat dan mengikat berupa Peraturan Daerah.

Selanjutnya Protap ini pun ditindaklanjuti dengan perumusan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal sebagai hasil *breakdown* dari UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Hanya saja sampai saat ini peraturan daerah tersebut belum juga rampung diselesaikan oleh SKPD terkait dengan alasan terhambat dengan aturan yang sama dan belum rampung di tingkat Propinsi.

Dari segi institusi, pada akhir 2007 Kabupaten Padang Pariaman telah membentuk institusi baru yang khusus melayani penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman dengan status kantor yang bertujuan untuk dapat melayani proses penanaman modal bagi investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman dengan nama Kantor Penanaman Modal (KPM).

4.10.1. Prosedur Tetap Pelayanan Penanaman Modal

Prosedur Tetap (Protap) Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman yang disahkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 tahun 2006 dengan lima bab dan 13 pasal, merupakan prosedur standar yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh calon investor dalam menanamkan modalnya di wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman.

Pada intinya, protap ini mengacu kepada prosedur pelayanan penanaman modal yang disusun oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia yang juga masih mengacu kepada perundang undangan sebelum UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Prosedur standar yang termuat dalam Protap Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman secara sederhana dilukiskan dalam alur dan proses perizinan penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman seperti dapat dilihat pada Lampiran 10.

Secara ringkas, tahapan penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan rencana investasi yang dilengkapi proposal dan pengisian formulir yang diperlukan (PMDN/PMA), serta surat pernyataan di atas kertas segel kepada Bupati Padang Pariaman cq. Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMK) rangkap dua.
2. Permohonan tersebut kemudian dibahas dan diolah oleh Tim Koordinasi Penanaman Modal (TKPM) dan setelah 10 hari kerja, IPMK mengeluarkan Surat Persetujuan (SP). Selanjutnya, setelah 30 hari kerja IPMK mengeluarkan Izin Usaha Tetap (IUT) yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen perizinan yang diperlukan (dalam bidang tertentu).

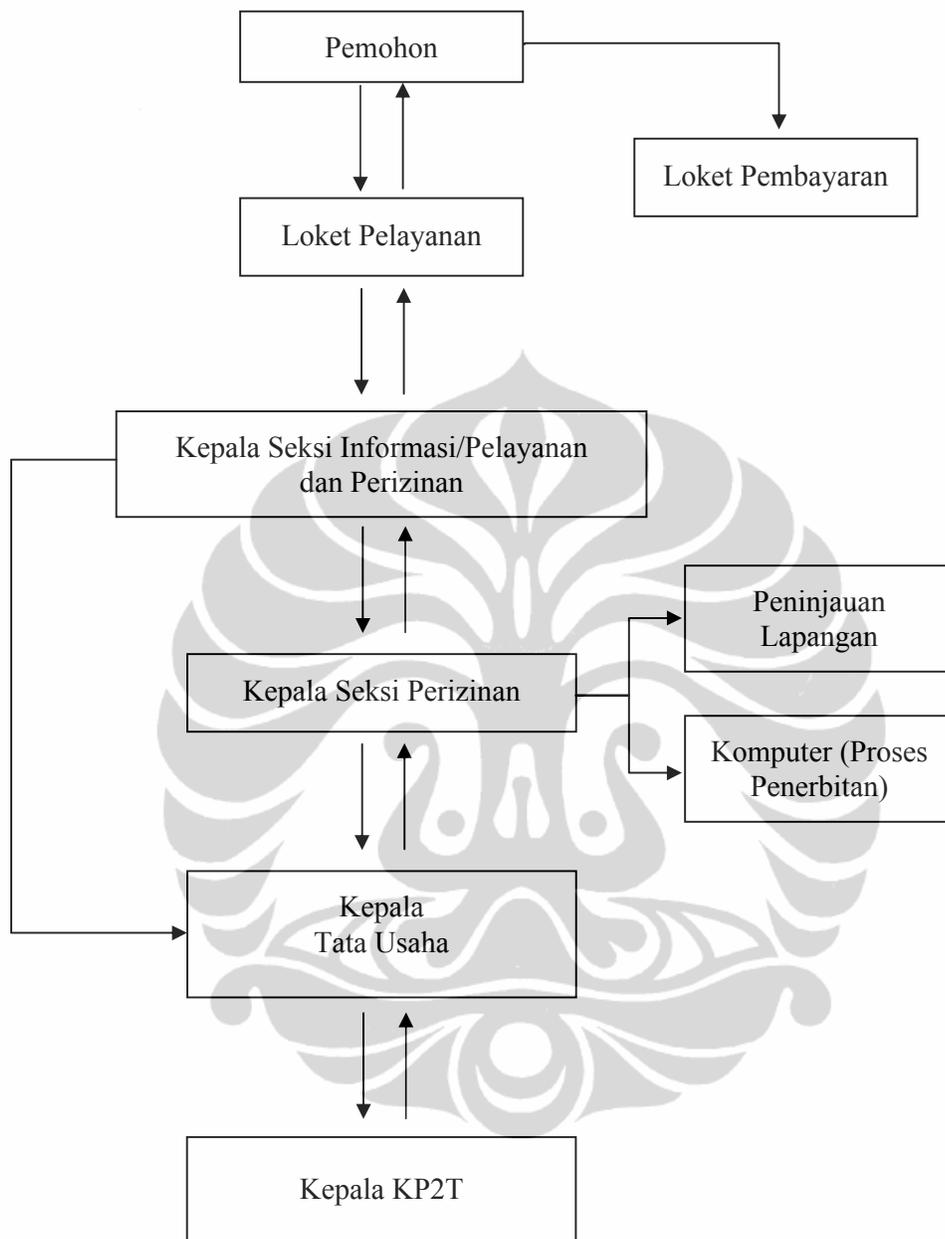
3. Selanjutnya TKPM yang beranggotakan Dinas/Badan/Kantor terkait di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan masing-masing dan menyerahkannya kepada IPMK.

4.10.2. Pedoman Prosedur Pelayanan Perizinan

Selain buku Protap Pelayanan Penanaman Modal, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga telah menetapkan dan menerbitkan buku Pedoman Prosedur Pelayanan Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman yang disusun oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T). Buku pedoman ini juga telah disahkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman pada bulan Juni 2009 dan menjadi payung hukum dalam memproses segala izin dan aturan penanaman modal dan perizinan usaha/non usaha di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan buku pedoman prosedur pelayanan perizinan tersebut, pengelolaan pelayanan terutama masalah perizinan dikelola di bawah satu atap di KP2T sehingga dapat mempermudah serta mempersingkat birokrasi pelayanan perizinan. Dengan demikian pelayanan diharapkan dapat lebih praktis dan mudah.

Dalam pengurusan semua jenis dokumen perizinan dilakukan di KP2T dengan tahapan sebagaimana digambarkan dalam diagram Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Alur Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman

Sumber: Buku Pedoman Prosedur Pelayanan Perizinan Kabupaten Padang Pariaman diterbitkan oleh KP2T, 2009, hal. 10.

Tahapan pengurusan perizinan di KP2T di atas secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Pemohon, mengisi formulir permohonan perizinan serta melampirkan persyaratan yang diperlukan di loket pelayanan perizinan.
2. Petugas loket pelayanan perizinan menerima dan meneliti surat permohonan izin beserta persyaratan yang diperlukan, jika sudah lengkap persyaratannya langsung diserahkan berkas permohonan ke Kasi Informasi Pelayanan dan Perizinan.
3. Kasi Informasi Pelayanan dan Perizinan, meneliti surat permohonan perizinan beserta persyaratan yang diperlukan dan meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Tata Usaha dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk didisposisi setelah itu diserahkan ke Kasi Perizinan.
4. Kasi Perizinan, melakukan proses penghitungan penetapan biaya setelah didapat kemudian Kasi Informasi Pelayanan dan Perizinan memberitahukan kepada pemohon izin berapa biayanya dan si pemohon langsung menyetorkan ke Bendaharawan pembantu Pemegang Kas Khusus Pendapatan sebanyak yang sudah ditetapkan.
5. Untuk izin-izin yang menyangkut teknis akan dilakukan pengecekan ke lapangan oleh tenaga teknis atas perintah Kasi Perizinan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait sebagai penentu dalam kelayakan perizinan.
6. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke operator komputer untuk diolah (dibuatkan SK-nya) setelah itu diserahkan ke Kasi Perizinan untuk diteliti kembali kemudian dilanjutkan ke Kepala Tata Usaha dan dilanjutkan ke Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memeriksa kembali sebelum SK tersebut ditandatanganinya atas nama Bupati, kecuali untuk Izin Prinsip dan Izin Lokasi, SK nya ditandatangani oleh Bupati.
8. Setelah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau Bupati, SK tersebut dikembalikan ke Seksi Perizinan untuk pemberian nomor SK izin, kemudian diturunkan kembali ke loket pelayanan
9. Si pemohon mengambil SK tersebut di loket pelayanan pada waktu yang telah ditentukan.

4.11. Kondisi Sosial Budaya

Faktor sosial dan budaya suatu daerah perlu dipertimbangan dalam mencermati permasalahan investasi. Pada umumnya, faktor ini selalu berada pada posisi berhadap-hadapan dengan kegiatan investasi, dalam artian saling tidak mendukung atau selalu memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat juga tidak terlepas dari permasalahan sosial dan budaya dalam kaitannya dengan investasi. Salah satu permasalahan yang selalu muncul pada saat proses penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman, seperti juga terjadi di seluruh wilayah di Propinsi Sumatera Barat, adalah konflik Tanah Ulayat.

Suhendri (2005) menyatakan bahwa tanah ulayat adalah aset di Sumatera Barat yang tidak ternilai harganya, dan kewajiban semua orang untuk menjaga dan memeliharanya agar tidak hilang digilas oleh perkembangan zaman. Ada ungkapan dalam adat Minangkabau (suku terbesar di Propinsi Sumatera Barat) yang pesannya menyampaikan kepada para generasi, bahwa semua orang berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan tanah ulayat agar tidak habis. Bunyi pepatah tersebut adalah "*Nan ketek dipagadang, Nan hanyut dipintasi, Nan hilang dicari, Nan patah ditimpa, Nan sumbiang dititik, Nan buruak dipaelok*".¹ Dalam pepatah ini terkandung makna yang sangat mendalam, betapa berharganya tanah ulayat bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Tanah ulayat merupakan pengikat bagi masyarakat adat di Sumatera Barat agar hubungan antara sesama suku tetap terjaga dengan utuh.

Tanah ulayat merupakan sumber daya dan asset nagari yang penting di Sumatera Barat. Tanah ulayat memiliki nilai ekonomi yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat nagari, di dalamnya terkandung berbagai potensi sumber daya alam yang mulai dari kulit bumi yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pertanian, hasil hutan dan sampai ke dalaman tanah dalam bentuk tanah dan bebatuan sebagai bahan baku industri. Kulit bumi atau tanah merupakan asset masyarakat yang selalu dijaga, dipelihara dan dimanfaatkan secara subsisten dalam kelangsungan kehidupannya. Di samping itu pada tanah ulayat juga melekat nilai-nilai sosial sebagai ikatan, kesatuan sistem kepemilikan dan

¹ Yang kecil diperbesar, yang hanyut dipintas, yang hilang dicari, yang patah disambung, yang sumbing ditutup/diperbaiki, nan jelek diperbaiki.

pengelolaan bersama masyarakat adat terhadap tanah, yang diyakini sebagai suatu titipan Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara secara baik.

Tanah ulayat di Propinsi Sumatera Barat pada umumnya dimaknai sebagai tanah adat yang memiliki aturan penggunaan dan pengelolaan yang diatur tersendiri dalam aturan adat masyarakat Sumatera Barat dan sudah mempunyai sistem dan mekanisme tersendiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Paling tidak pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat ini telah pernah diterapkan di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Limapuluh Kota (Suhendri, 2005).

Pengaturan tanah ulayat diatur dalam Peraturan Nagari No. 1 Tahun 2003. tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat. Dalam peraturan nagari ini mengatur tentang pemanfaatan tanah nagari dan luas yang dapat diberikan, hak dan kewajiban si pemanfaat tanah ulayat nagari dan ketentuan sanksi yang diberikan bila si pemanfaat yang menyalahgunakan pemanfaatan tanah ulayat ini. Di Nagari Simarasok juga diatur, melalui pernak No. 1 Tahun 2002 tentang Teritorial dan Ulayat Nagari Simarasok, dalam pernak ini mengatur tentang pengelolaan terhadap hak ulayat nagari termasuk tanah ulayat. Dan banyak lagi nagari-nagari di Sumatera Barat yang sudah mempunyai aturan tersendiri dalam mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat menurut ketentuan hukum adat.

Begitu juga di Kabupaten Padang Pariaman sendiri, setiap nagari pada umumnya telah memiliki Peraturan Nagari yang mengatur tata cara pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan tanah ulayat. Bahkan di tingkat kabupaten pun sudah mulai disusun Peraturan Daerah yang mengatur tanah ulayat.

Kenapa tanah ulayat ini begitu penting dibuatkan aturan dalam pengelolaannya, hal ini tak lain untuk melindungi hak-hak komunal masyarakat Sumatera Barat yang menyatu dalam eksistensi tanah ulayat. Setiap individu masyarakat terikat erat dalam tanah ulayat ini bahkan setiap individu di Sumatera Barat sangat dihargai begitu tinggi apabila kaumnya masih memiliki tanah ulayat. Sementara itu, eksistensi tanah ulayat ini semakin “terancam” oleh perkembangan zaman dan pembangunan.

Begitu pentingnya tanah ulayat ini dilindungi baik oleh peraturan nagari maupun peraturan di tingkat kabupaten/kota dan propinsi, memunculkan *trade off*

kalau dilihat dari sisi kepentingan pemerintah. *Trade off* dimaksud adalah di satu sisi tanah ulayat dilindungi dari salah penggunaan dan peruntukan, di sisi lain, menghambat rencana kegiatan investasi.

Setiap penanaman modal dipastikan membutuhkan tanah sebagai modal produksi baik sebagai lahan perkebunan, lahan pabrik maupun kantor. Sedangkan penggunaan, pemakaian bahkan pembelian lahan di Sumatera Barat selalu terbentur oleh hak kepemilikan tanah ulayat dari pemilik lahan. Tanah ulayat adalah hak komunal maka izin pemakaian bahkan penjualannya harus diputuskan secara bersama-sama dan kondisi inilah yang selalu menghambat proses penanaman modal.

Namun demikian, Rektor Universitas Andalas (Unand) Padang, Marlis Rahman, pernah membantah anggapan berbagai pihak yang "menyalahkan" keberadaan tanah ulayat sebagai salah satu kendala masuknya investasi asing ke Sumbar. "Anggapan tanah ulayat sebagai penghambat tidak bisa dibenarkan, karena dalam kenyataan sebaliknya, para ninik mamak (pemuka adat) pemilik tanah ulayat justru rela menyerahkan tanahnya untuk kegiatan investasi," ujarnya (dimuat di situs majalah Gatra, 2002)

Substansi masalah dalam kegiatan investasi selama ini adalah pemerintah dan investor tidak begitu menghargai tanah ulayat milik masyarakat, padahal kalau tanah sawah mereka dihargai, masyarakat justru rela menyerahkan tanah ulayatnya untuk pembangunan. Kunci masalahnya bukan pada status tanah ulayat, tetapi terletak pada pendekatan pihak pemerintah dan investor terhadap masyarakat pemilik tanah ulayat. Bila masyarakat pemilik tanah ulayat dirangkul tidak akan ada masalah.

Kegiatan investasi dengan melakukan ganti rugi kepada tanah dan sawah masyarakat seperti yang terjadi pada masa lalu tidak efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif bagi iklim investasi. Perlu ditempuh cara-cara pendekatan yang persuasif dan transparan dalam memanfaatkan tanah ulayat masyarakat. Cara lain juga bisa saja dilakukan sepanjang masyarakat tidak berada pada pihak yang dirugikan.

BAB V

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Survei Persepsi Investor terhadap Iklim Investasi

Survei persepsi investor terhadap iklim investasi ditujukan untuk mengetahui persepsi pengusaha atau investor yang telah beroperasi atau yang akan beroperasi di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dari 131 responden yang direncanakan, hanya bisa dipenuhi 21 responden, mengingat terjadinya gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009. Ke 21 responden tersebut seluruhnya adalah investor yang masuk dalam kelompok kecil dan menengah dari sektor industri, jasa dan perdagangan (lihat penjelasan dan Gambar 5.1.)

5.1.1. Karakteristik Responden

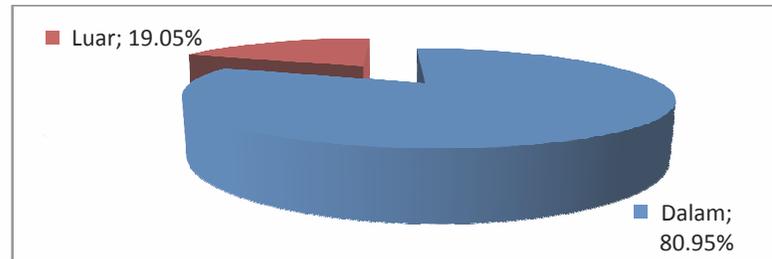
Investor yang menjadi responden penelitian ini berjumlah 21 orang dengan komposisi responden laki-laki berjumlah 18 orang atau 85,71% dan perempuan 3 orang atau 14,29%. Lihat Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

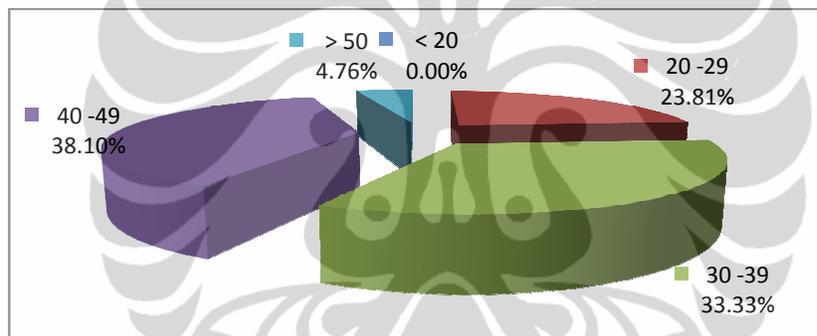
Berdasarkan daerah asal, Investor dibagi antara dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman dan luar Kabupaten Padang Pariaman. Investor yang berasal dari dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman ada 17 orang (80,95%) dan luar daerah 4 orang (19,05%) masing-masing berasal dari Kota Padang dua orang dan Kota Pariaman dua orang. Lihat Gambar 5.2.



Gambar 5.2. Pengelompokan Responden Berdasarkan Asal Daerah

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

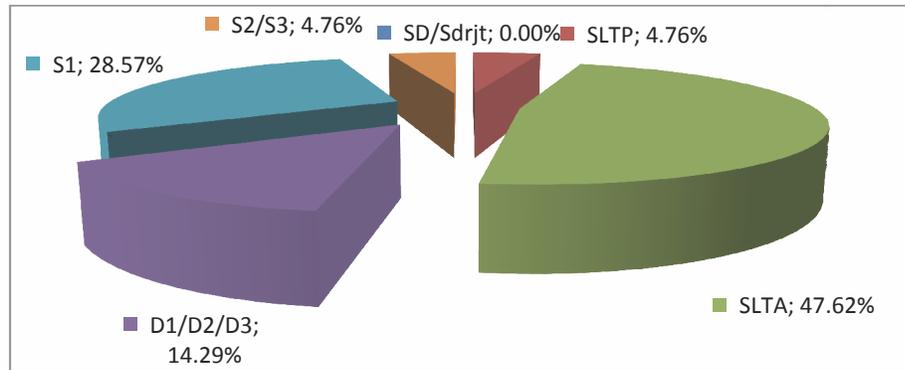
Pengelompokan investor berdasarkan umur adalah sebagai berikut: kelompok usia kurang dari 20 tahun, 20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun dan lebih dari 50 tahun. Responden terbanyak adalah kelompok usia 40-49 tahun sebanyak 8 orang (38,1%). Lihat Gambar 5.3.



Gambar 5.3. Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

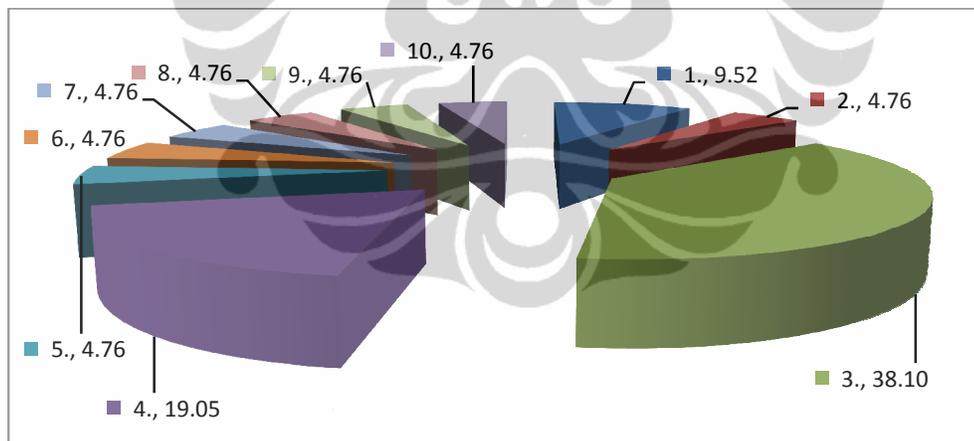
Pengelompokan investor berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: SD atau sederajat, SLTP, SLTA, D1/D2/D3, S1 dan S2/S3. Responden terbanyak adalah yang berpendidikan SLTA sebanyak 10 orang atau 47,62% dari total responden. Data ini menunjukkan bahwa secara umum, informasi yang diperoleh dari responden cukup baik, karena tingkat pendidikan mereka sebagian besar adalah SLTA ke atas yakni 95% lebih. Hanya sekitar 4,76% responden yang yang lulusan SLTP. Secara rinci, data responden berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

Pengelompokan investor berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut: sektor bengkel; tekstil/border; kontraktor; biro travel; industri alsintan; konsultan informasi dan teknologi; transportasi darat; stasiun radio komersil; distributor gas alam, dan perdagangan. Responden terbanyak adalah yang bergerak di bidang kontraktor sebanyak 8 orang atau 38,10% dari total responden. Lihat Gambar 5.5. Dengan demikian sektor usaha responden cukup beragam.



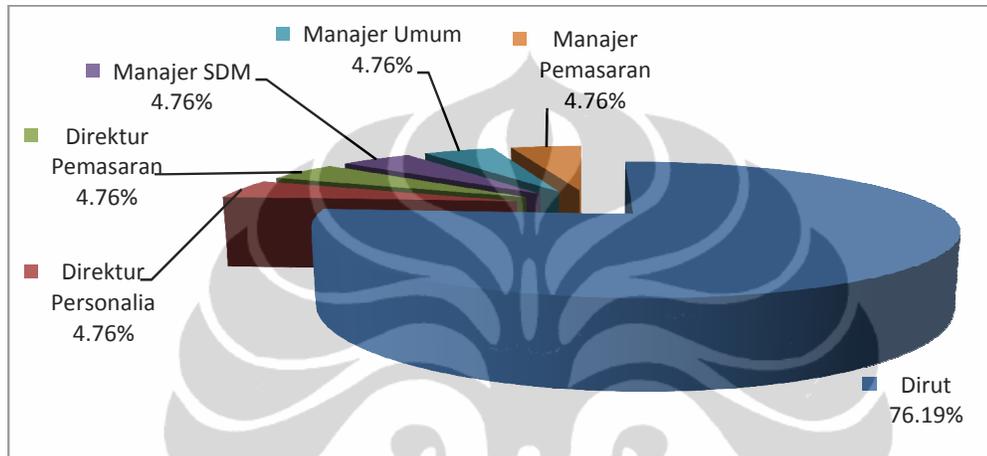
Gambar 5.5. Pengelompokan Responden Berdasarkan Sektor Usaha

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

Keterangan: 1. Bengkel, 2. Tekstil/Bordir, 3. Kontraktor, 4. Biro Travel, 5. Industri Alsintan, 6. Konsultan Informasi & Teknologi, 7. Transportasi Darat, 8. Stasiun Radio Komersil, 9. Distributor Gas Alam, 10. Perdagangan.

Responden dari survei persepsi ini diisi oleh direktur utama, direktur personalia, direktur pemasaran, manajer SDM, manajer umum dan manajer

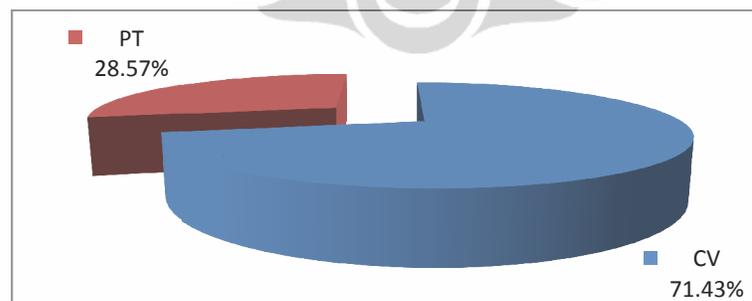
promosi. Jabatan responden terbanyak adalah direktur utama dengan jumlah 16 orang atau 76,19% dari total responden. Data ini menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh dalam survei ini merupakan cerminan pendapat pelaku usaha, karena 100% perusahaan yang disurvei, posisi respondennya adalah mereka yang paham betul mengenai seluk beluk perusahaan, karena mereka adalah pemilik (*owners*) dan manajer. Lihat Gambar 5.6.



Gambar 5.6. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jabatan

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

Bentuk badan hukum investor yang disurvei hanya ada dua bentuk yaitu PT dan CV. Badan hukum CV adalah responden terbanyak dengan jumlah 15 responden atau setara dengan 71,43% dari total responden. Lihat Gambar 5.7.

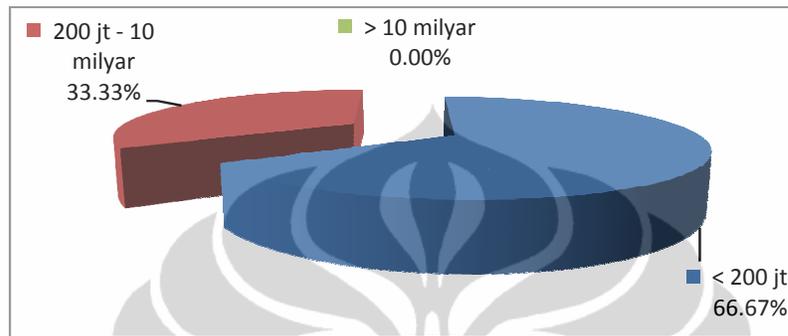


Gambar 5.7. Pengelompokan Responden Berdasarkan Badan Hukum Usaha

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

Dalam melihat seberapa besar usaha investor yang disurvei dari segi aset usaha, dikelompokkanlah sebagai berikut: kurang dari Rp. 200 juta, antara Rp.

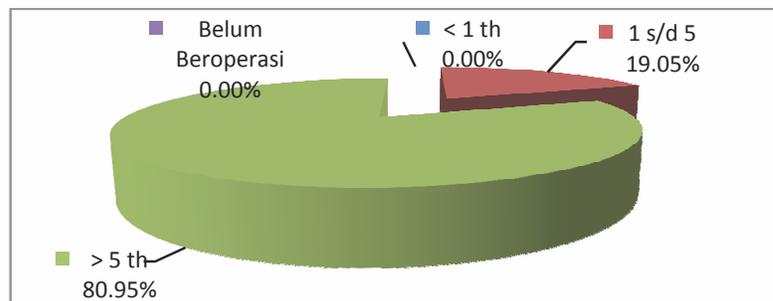
200 juta sampai dengan 10 milyar dan lebih dari 10 milyar. Ternyata responden yang memiliki aset usaha kurang dari Rp. 200 juta merupakan responden terbanyak yaitu 14 orang atau 66,67%. Lihat Gambar 5.8. Ini berarti usaha yang sedang dijalankan oleh responden adalah usaha menengah kecil dengan aset kurang dari 200 juta.



Gambar 5.8. Pengelompokan Responden Berdasarkan Aset Usaha

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

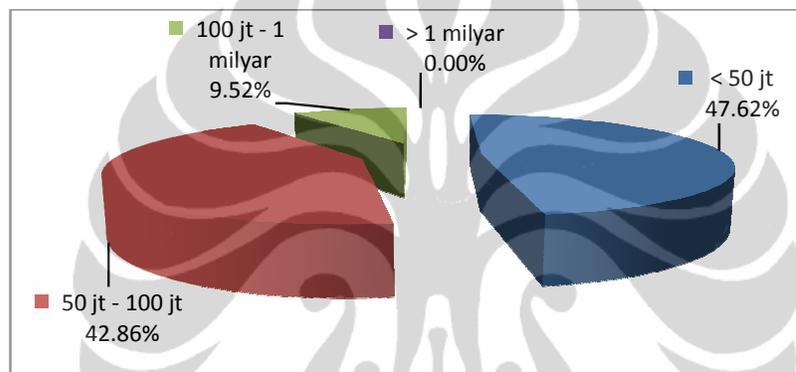
Pengelompokan investor berdasarkan umur operasional usaha adalah sebagai berikut: kurang dari 1 tahun, antara 1 sampai dengan 5 tahun, lebih dari 5 tahun dan belum beroperasi. Usaha dengan umur lebih 5 tahun merupakan responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu sebanyak 17 responden setara dengan 80,95% dari total responden. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa sampel survei ini cukup mengenal persoalan dunia usaha dan hubungannya dengan berbagai kebijakan di pemerintahan daerah. Secara rinci dapat dilihat Gambar 5.9.



Gambar 5.9. Pengelompokan Responden Berdasarkan Umur Operasional Usaha

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

Pengelompokan investor berdasarkan jumlah omzet usaha adalah sebagai berikut: kurang dari Rp. 50 juta, antara Rp. 50 sampai dengan 100 juta, antara Rp. 100 juta sampai dengan 1 milyar dan lebih dari 1 milyar. Omzet usaha adalah kondisi keuntungan perusahaan apakah mengalami keuntungan atau kerugian dan sangat bergantung pada ukuran usaha. Dari hasil pengumpulan data, omzet usaha responden terbanyak adalah kurang dari Rp. 50 juta sebanyak 10 responden atau setara dengan 47,62%. Dari 21 perusahaan yang disurvei terlihat bahwa omzet yang diperoleh perusahaan hampir 91% meraup keuntungan di bawah 100 juta. Rinciannya dapat dilihat pada Gambar 5.10.



Gambar 5.10. Pengelompokan Responden Berdasarkan Omzet Usaha

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

Dari informasi mengenai karakteristik investor, dapat disimpulkan bahwa mayoritas investor adalah laki-laki, berasal dari dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman, berusia antara 40-49 tahun, berpendidikan SLTA, bergerak di sektor usaha kontraktor, menduduki jabatan sebagai Direktur Utama, bentuk badan usaha CV, memiliki asset usaha di bawah 200 juta, sudah beroperasi lebih dari 5 tahun dan memiliki omzet usaha di bawah 50 juta.

Kesimpulan dari survei karakteristik investor ini, jika dilihat dari jumlah rencana sampel yang hendak disurvei kurang memenuhi target yang direncanakan bahkan tidak sampai seperempatnya, sudah barang tentu hasil survei ini sangat tidak valid kalau diuji secara statistik. Untuk itu, survei ini dilanjutkan dengan melakukan survei persepsi investor dengan menggunakan alat analisis AHP. Namun sebagai informasi awal dalam setidaknya-tidaknya hasil survei ini bisa

menjadi gambaran awal persepsi investor terhadap iklim investasi di Kabupaten Padang Pariaman sebelum terjadinya musibah gempa bumi di ranah Minang.

5.1.2. Persepsi Investor terhadap Iklim Investasi

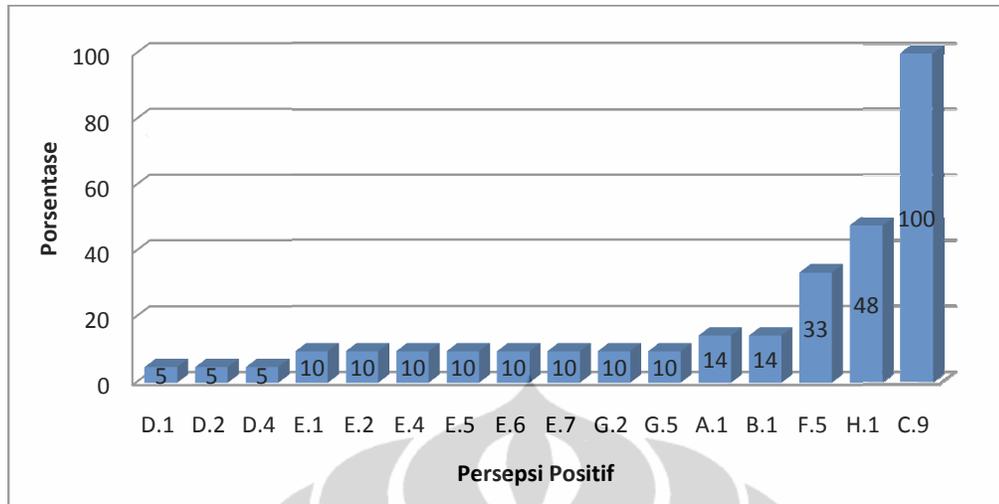
Pada tahap penggalan informasi tentang persepsi investor, responden diberikan pilihan jawaban sangat baik, baik, netral, tidak baik atau sangat tidak baik. Pilihan kunci “baik” juga bisa diartikan sebagai membantu, menguntungkan, mudah dan murah tergantung tujuan pertanyaan yang diajukan begitu sebaliknya dengan tidak baik.

Persepsi investor yang digali mengenai faktor-faktor penentu daya tarik investasi Kabupaten Padang Pariaman adalah pelayanan pemerintahan daerah, peraturan dan pengurusan ijin/dokumen usaha, infrastruktur fisik, bahan baku, keamanan, perekonomian, politik, sosial, budaya dan sumber daya manusia serta produktifitas.

Selain itu investor juga digali informasinya mengenai permasalahan umum yang dihadapi ketika membuka usaha pertama kali di Kabupaten Padang Pariaman, alasan kenapa mau membuka usaha di Kabupaten Padang Pariaman, dan pendapat-pendapat lainnya yang berhubungan dengan iklim dan daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman. Tabel persepsi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Gambar 5.11. berikut adalah grafik persepsi investor yang menyatakan “sangat baik” dan “baik” masing-masing point pertanyaan faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman dan dipilih persentase tertinggi pada masing-masing faktor.

Dari Gambar 5.11. terlihat bahwa seluruh responden sepakat menyatakan persepsi positif terhadap faktor infrastruktur fisik khususnya kondisi jalan negara/nasional (C9). Disusul kemudian faktor sumber daya manusia dan produktifitas khususnya pada point ketersediaan tenaga kerja lokal (H1) sebanyak 10 orang atau 47,62%.



Gambar 5.11. Porsentase Persepsi Positif (Sangat Baik dan Baik) Responden terhadap Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

Keterangan:

- D1 = Ketersediaan bahan baku
- D2 = Kualitas bahan baku
- D4 = Akses memperoleh bahan baku
- E1 = Tingkat keamanan daerah dikaitkan dengan keamanan dan kenyamanan berusaha
- E2 = Tingkat keamanan daerah dihubungkan dengan prospek usaha dan pengembangan usaha
- E4 = Peranan aparat keamanan (Polri dan TNI) dalam menjaga kenyamanan berusaha
- E5 = Peranan perangkat pemerintah terendah (Nagari) dan atau kecamatan dalam menjaga kenyamanan berusaha
- E6 = Peranan tokoh masyarakat dalam menjaga kenyamanan berusaha
- E7 = Peranan pemuda dalam menjaga kenyamanan berusaha
- G2 = Kapasitas dan integritas Kepala Daerah (Bupati) dalam menjamin kenyamanan berusaha
- G5 = Adat istiadat/budaya dikaitkan dengan usaha
- A1 = Pelayanan aparat Pemd berkeanaan dengan pengurusan dokumen-dokumen usaha
- B1 = Kemudahan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- F5 = Iklim (*climate*), suhu udara, curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan kenyamanan dan prospek usaha
- H1 = Ketersediaan tenaga kerja lokal
- C9 = Jalan Negara

Dari perhitungan porsentase persepsi positif di atas terdapat hanya satu persepsi yang memperoleh nilai di atas 50% yaitu faktor infrastruktur fisik khususnya kondisi jalan negara/nasional, sedangkan selebihnya memperoleh nilai di bawah angka 50%. Hal ini menjelaskan bahwa semua responden memiliki persepsi positif yang rendah terhadap semua faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman terkecuali terhadap jalan negara/nasional yang

disepakati oleh seluruh responden sebagai faktor yang sangat memuaskan dari daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Temuan ini pada awalnya sudah diperkirakan karena memang kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa kondisi dan kualitas jalan negara/nasional yang melintasi Kabupaten Padang Pariaman sepanjang 84,30 km dalam kondisi sangat baik dan selalu mendapat decak kagum dari pengguna jalan raya yang melewatinya. Bahkan kondisi baik jalan negara/nasional ini juga diikuti oleh jalan propinsi dan kabupaten masing-masing dengan panjang 83,65 km dan 1.312,15 km.

Sementara itu, jika diperhatikan dari temuan yang ada terlihat faktor keamanan dengan hampir seluruh point-nya memperoleh persepsi positif sangat rendah dibandingkan faktor lainnya, hal ini memperlihatkan bahwa faktor keamanan yang merupakan faktor paling krusial dalam pengambilan keputusan penanaman modal menjadi faktor yang paling lemah menjadi penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Temuan ini semakin meyakinkan semua pihak bahwa ternyata kurangnya minat investor masuk ke Kabupaten Padang Pariaman karena tidak adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

Selain faktor keamanan, ternyata faktor bahan baku juga menjadi perhatian khusus bagi responden karena pada umumnya responden menilai ketersediaan, kualitas dan akses terhadap bahan baku di Kabupaten Padang Pariaman sangat rendah, oleh karenanya faktor ini mendapat penilaian positif yang sangat sedikit dengan arti kata lain mendapatkan persepsi negatif yang sangat banyak.

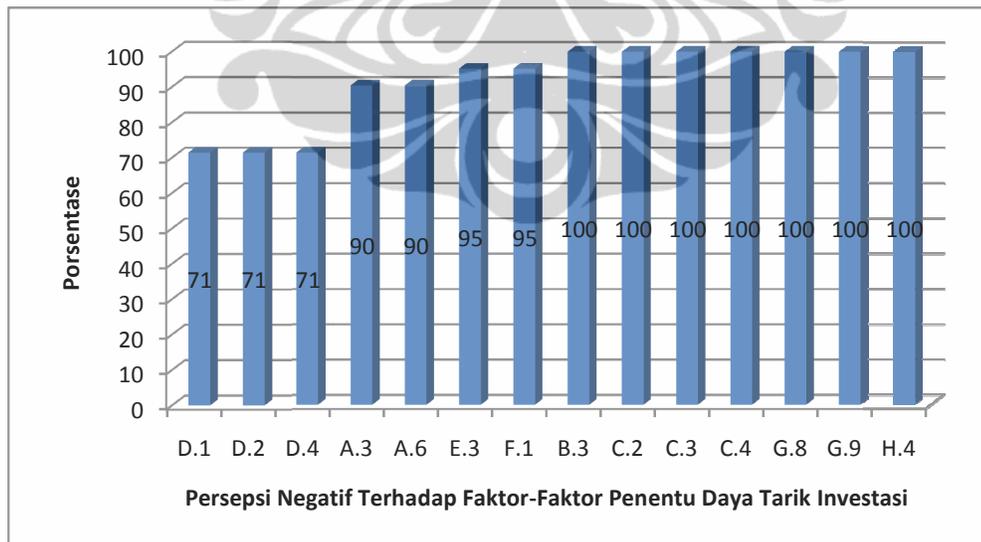
Jika dilihat berdasarkan masing-masing faktor maka secara berturut-turut faktor-faktor berikut mendapatkan persepsi positif dengan nilai rata-rata masing-masing:

1. Infrastruktur fisik	40,87%
2. Perekonomian	10,12%
3. Sumber daya manusia dan produktifitas	9,52%
4. Keamanan	8,16%
5. Pelayanan pemerintah daerah	6,19%
6. Peraturan dan pengurusan ijin/dokumen usaha	5,82%
7. Bahan baku	3,57%
8. Politik, sosial dan budaya	3,33%

Universitas Indonesia

Berdasarkan persepsi masing-masing faktor maka terlihat bahwa responden menilai infrastruktur fisik yang paling mendukung daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman diikuti oleh perekonomian, sementara faktor lain dianggap sangat kurang. Namun mengingat nilai dari infrastruktur fisik hanya 40,87% maka bisa disimpulkan bahwa daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman masih dianggap kurang memadai bagi responden.

Di sisi lain, persepsi negatif responden atau yang menyatakan persepsi “tidak baik” dan “sangat tidak baik” dapat dilihat pada Gambar 5.12. Pada Gambar 5.12. terlihat bahwa secara bersama-sama faktor sumber daya manusia dan produktifitas point biaya tenaga kerja lokal, faktor politik sosial dan budaya, point pemahaman masyarakat terhadap dunia usaha dengan segala aturan dan prosedural yang berlaku di dalamnya dan point kewajiban donasi resmi baik yang ditetapkan mulai dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai Pemerintahan Nagari/Desa, faktor infrastruktur fisik point pelabuhan laut, terminal angkutan udara dan terminal bongkar muat barang serta faktor peraturan dan pengurusan ijin/dokumen usaha point penegakkan hukum atau konsistensi peraturan sama-sama mendapatkan nilai negatif paling tinggi karena dipilih oleh seluruh responden.



Gambar 5.12. Porsentase Persepsi Negatif (Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik) Responden Terhadap Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi

Sumber: Hasil survei karakteristik dan persepsi investor terhadap iklim investasi Kab. Padang Pariaman, 2009.

Keterangan:

- D1 = Ketersediaan bahan baku
- D2 = Kualitas bahan baku
- D4 = Akses memperoleh bahan baku
- A3 = Ketersediaan informasi potensi dan peluang bisnis
- A6 = Respon aparatur Pemda dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan seputar gangguan atau kendala usaha
- E3 = Kemampuan aparat Pemda dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan usaha dengan masyarakat sekitar lokasi
- F1 = Kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan prospek usaha
- B3 = Penegakkan hukum atau konsistensi peraturan
- C2 = Pelabuhan laut
- C3 = Terminal angkutan darat
- C4 = Terminal bongkar muat barang
- G8 = Pemahaman masyarakat terhadap dunia usaha dengan segala aturan dan prosedural yang berlaku di dalamnya
- G9 = Kewajiban donasi resmi baik yang ditetapkan mulai dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai Pemerintahan Nagari/Desa
- H4 = Biaya tenaga kerja lokal

Selanjutnya berturut-turut faktor perekonomian point kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan prospek usaha dan faktor keamanan point kemampuan aparat Pemda dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan usaha dengan masyarakat sekitar lokasi sama-sama mendapatkan persepsi negatif dari 20 orang responden atau sama dengan 95,24% dari total responden. Kemudian faktor pelayanan pemda pada point ketersediaan informasi potensi dan peluang bisnis dan respon aparatur Pemda dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan seputar gangguan atau kendala usaha juga sama-sama mendapatkan persepsi negatif dari 19 responden atau setara dengan 90,48%.

Terakhir, persepsi negatif diperoleh oleh faktor bahan baku dalam tiga point yaitu ketersediaan bahan baku, kualitas bahan baku dan akses memperoleh bahan baku, dimana masing-masing point ini mendapatkan persepsi negatif oleh 15 orang responden atau setara dengan 71,43%.

Dari Gambar 5.12 terlihat bahwa ada tujuh point dari empat faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman yang mendapatkan persepsi negatif sebesar 100% dari responden. Keempat faktor tersebut adalah faktor infrastruktur fisik (point pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan terminal bongkar muat barang), faktor politik sosial dan budaya (point pemahaman masyarakat terhadap dunia usaha dengan segala aturan dan prosedural yang berlaku di dalamnya dan kewajiban donasi resmi baik yang ditetapkan mulai dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai

Pemerintahan Nagari/Desa), faktor peraturan dan pengurusan ijin/dokumen usaha (point penegakkan hukum atau konsistensi peraturan) dan faktor sumber daya manusia dan produktifitas (point biaya tenaga kerja lokal).

Hal yang dapat disimpulkan dari kondisi di atas adalah bahwasanya keempat faktor di atas terutama pada point-point khususnya tersebut mendapatkan persepsi negatif seluruh responden dan bisa berarti hal-hal tersebutlah yang selama ini mengganggu para investor dan mengurangi daya tarik investasi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Jika dilihat berdasarkan masing-masing faktor maka secara berturut-turut faktor-faktor berikut mendapatkan persepsi negatif dengan nilai rata-rata masing-masing:

1. Pelayanan pemerintah daerah	81,43%
2. Politik, sosial dan budaya	71,90%
3. Bahan baku	70,24%
4. Keamanan	67,35%
5. Peraturan dan pengurusan ijin/dokumen usaha	66,67%
6. Sumber daya manusia dan produktifitas	63,81%
7. Perekonomian	62,50%
8. Infrastruktur fisik	35,71%

Dari nilai rata-rata masing-masing faktor ini terlihat bahwa faktor pelayanan pemerintah daerah menempati urutan tertinggi dipersepsikan negatif oleh responden dibandingkan dengan faktor lainnya sebesar 81,43%. Secara keseluruhan seluruh faktor mendapatkan persepsi negatif di atas 50% kecuali infrastruktur fisik yang hanya memperoleh persentase 35,71%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman dipersepsikan negatif oleh responden, kecuali faktor infrastruktur fisik.

Kesimpulan yang diperoleh pada survei pendahuluan melalui mengetahui persepsi investor terhadap faktor-faktor penentu daya tarik investasi di atas maka persepsi negatif dan karaktersistik responden dijadikan dasar penentuan dalam pembentukan hirarki dalam penelitian menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process*. Pada hasil persepsi negatif diambil faktor-faktor berikut sebagai pembentuk hirarki dasar AHP:

1. Pelayanan pemerintah daerah dipilih sebagai kriteria level 2

2. Politik, sosial dan budaya digabung dengan keamanan dipilih sebagai kriteria level 2
3. Peraturan dan pengurusan ijin/dokumen usaha dimasukkan sebagai sub kriteria level 3 di bawah kriteria pelayanan pemerintah daerah
4. Sumber daya manusia dan produktifitas dijadikan kriteria level 2
5. Perekonomian dijadikan kriteria level 2
6. Infrastruktur fisik dijadikan sub krietaria level 3 di bawah kriteria perekonomian.
7. Sementara faktor bahan baku dimasukkan secara implisit ke dalam kriteria perekonomian pada sub kriteria potensi perekonomian.

5.2. Analisis Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi dengan AHP

5.2.1. Hasil Analisis AHP

Hasil jawaban perbandingan setiap sel matriks perbandingan (*pairwise comparison*) tersebut diolah dengan bantuan perangkat lunak *Expert Choice*. Sintesa akhir dari setiap *expert* dan total persepsi para *expert* dengan rata-rata ukur (*geomean*) dipaparkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Hasil Akhir AHP dengan Lima *Expert*

Prioritas	Sintesa per Elemen dari Setiap Responden Expert					
	A	B	C	D	E	Rata2 Ukur
Goal terhadap						
Pelayanan Pemda	0,564	0,557	0,428	0,575	0,634	0,592
Keamanan & Politik Sosial Budaya	0,256	0,096	0,428	0,106	0,088	0,167
Perekonomian	0,134	0,268	0,072	0,276	0,223	0,181
SDM & Produktifitas	0,046	0,079	0,072	0,043	0,054	0,060
<i>Inconsistency</i>	0,080	0,070	0,100	0,090	0,100	0,030
Kriteria Pelayanan Pemda						
Kualitas Pelayanan	0,626	0,157	0,190	0,477	0,548	0,386
Ketersediaan Informasi	0,225	0,490	0,540	0,221	0,082	0,319
Kualitas Perda & Aturan Lain	0,076	0,093	0,120	0,119	0,092	0,136
Kepastian Hukum	0,074	0,260	0,150	0,183	0,278	0,159
<i>Inconsistency</i>	0,090	0,090	0,100	0,060	0,090	0,020
Kriteria Keamanan & Politik Sosial Budaya						
Keamanan	0,498	0,498	0,498	0,733	0,731	0,493
Politik dan Sosial	0,367	0,367	0,367	0,199	0,188	0,311
Budaya	0,135	0,135	0,135	0,068	0,081	0,196
<i>Inconsistency</i>	0,090	0,090	0,90	0,090	0,060	0,050
Kriteria Perekonomian						
Potensi	0,292	0,369	0,292	0,617	0,256	0,377
Struktur	0,239	0,210	0,239	0,063	0,072	0,155
Keuangan Daerah	0,159	0,123	0,159	0,043	0,059	0,112
Ketersediaan Infrastuktur	0,311	0,298	0,311	0,277	0,613	0,356
<i>Inconsistency</i>	0,090	0,070	0,090	0,090	0,070	0,070
Kriteria SDM & Produktifitas						
Ketersediaan Naker	0,610	0,499	0,610	0,709	0,674	0,745
Produktifitas Naker	0,166	0,105	0,166	0,060	0,101	0,099
Biaya Naker	0,225	0,396	0,225	0,231	0,226	0,156
<i>Inconsistency</i>	0,090	0,050	0,090	0,070	0,080	0,050

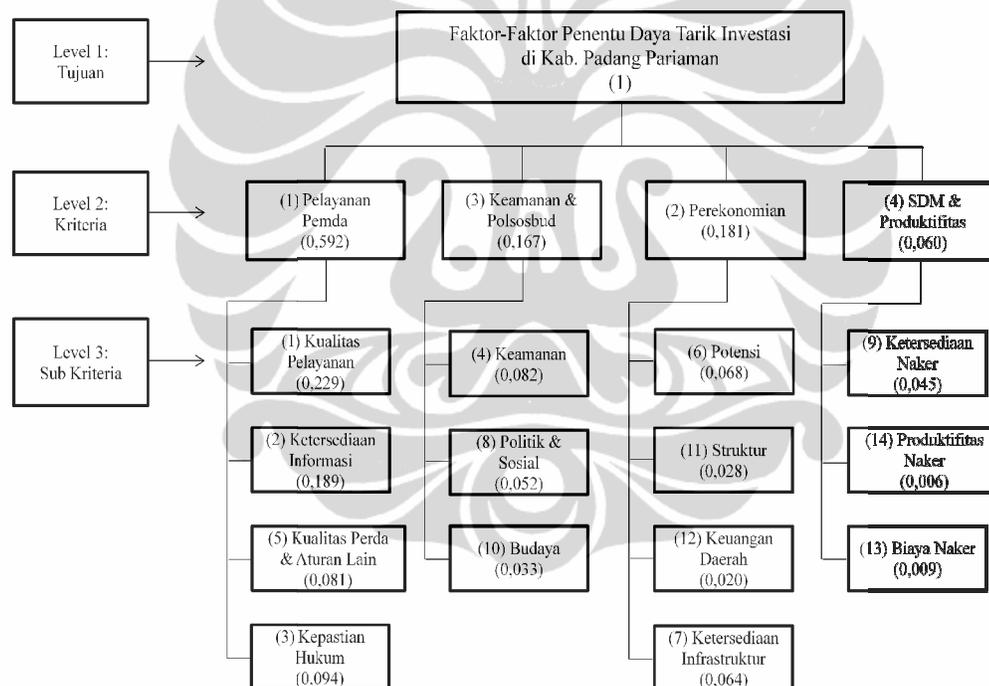
Sumber: Hasil survei persepsi investor thdp iklim investasi Kab. Padang Pariaman AHP, 2009.

Keterangan Elemen dan Notasi dalam Tabel 5.1.:

- A = Kepala Bappeda Kabupaten Padang Pariaman
- B = Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman
- C = Kepala Seksi (Kasi Pelayanan Penanaman Modal)
- D = Pengurus KADIN Kabupaten Padang Pariaman
- E = Pengusaha PMDN di Kabupaten Padang Pariaman

Dari perhitungan AHP dengan menggunakan *Expert Choice* diperoleh sebuah matriks perbandingan baru. Karena itu, bobot global setiap elemen dari hasil rata-rata (geomean) merupakan penentu utama analisis dari hirarki.

Adapun hirarki dengan bobot dan sintesa global akhir dari rata-rata ukur yang memiliki inkonsistensi 3% digambarkan dalam Gambar 5.13.

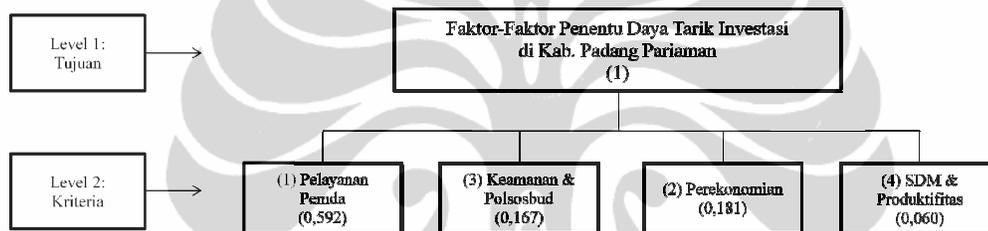


Gambar 5.13. Hirarki AHP dengan Bobot dan Sintesa Global Masing-Masing Elemen

Dari Gambar 5.13. tersebut berdasarkan hasil prioritas global dari penilaian akhir. Sintesa akhir atas hirarki AHP tersebut telah memenuhi syarat karena derajat inkonsistensinya kurang dari 10%. Hal ini berarti, hasil sintesa akhir secara global telah memenuhi asumsi penting dalam metode AHP bahwa

inkonsistensi di bawah 10% masih bisa diterima atau hirarki tersebut dinyatakan masih baik atau tidak menjerus pada kesalahan.

Untuk melihat gambaran perbandingan masing-masing nilai kriteria dapat dilihat pada Gambar 5.14. Berdasarkan hasil bobot prioritas pada Gambar 5.14 terlihat bahwa faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman, kriteria yang menjadi penentu adalah pelayanan pemerintah daerah yakni dengan nilai 59,2%. Ini menandakan bahwa, kondisi riil di Kabupaten Padang Pariaman selama ini, pelayanan pemerintah daerah dalam proses penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman belum memuaskan dan disinyalir menghambat proses penanaman modal serta mengurangi daya tarik dan iklim investasi.



Gambar 5.14. Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman

Pelayanan pemerintah daerah ini berhubungan dengan sistim aturan yang diberlakukan mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah di tingkat kecamatan. Dimana aturan-aturan ini banyak dikeluhkan oleh investor yang dirasa memberatkan apalagi kemudian diperparah lagi dengan pemberlakuan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah membuat aturan-aturan di daerah (seperti Peraturan Daerah) yang bertujuan meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi.

Kondisi yang paling menjengkelkan investor adalah ketika aturan dinilai sudah terlalu berat, kualitas pelayanan aparat pemerintah daerah pun kurang memuaskan, tidak professional ditambah lagi dengan permintaan-permintaan pungutan di luar ketentuan berlaku. Tentu saja hal ini memperburuk citra iklim investasi di daerah ini.

Apabila dibandingkan hasil survei persepsi sebelumnya, maka terlihat perbedaan hubungan yang sangat erat antara hasil survei dengan analisa AHP

pada faktor atau kriteria pelayanan pemerintah daerah atau dengan kata lain bahwa persepsi negatif pelayanan pemerintah daerah pada saat survei dilakukan dijawab sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai faktor utama penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara pada kriteria keamanan malah terjadi perubahan dibandingkan dengan hasil survei. Persepsi responden pada survei menunjuk faktor politik sosial dan budaya sebagai persepsi negatif peringkat kedua sedangkan pada AHP menjadi prioritas ketiga. Sedangkan yang menduduki prioritas kedua dalam AHP ini adalah kriteria perekonomian. Hal ini bisa dijelaskan bahwa pasca gempa bumi persepsi *stakeholder* lebih kepada kondisi perekonomian dibandingkan keamanan, politik, sosial dan budaya. Logika sederhana adalah bahwa dalam situasi dominan *recovery* daerah, setiap orang lebih mementingkan bagaimana memperbaiki perekonomian dibanding hal-hal lain seperti politik dan budaya.

Keadaan ini juga memiliki arti bahwa dalam pengambilan keputusan berinvestasi, oleh investor, kriteria utama dalam melihat kelayakan sebuah usaha dan daerah untuk diputuskan adalah perekonomian. Hal ini berhubungan dengan analisa keuntungan dan biaya yang musti mendapatkan rasio yang positif dari segi keuntungan. Salah satu variabel yang sangat diperhatikan oleh pengusaha adalah daya beli konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan sekaligus kemampuan daya serap pasar di daerah yang bersangkutan atau yang dikenal dengan pangsa pasar.

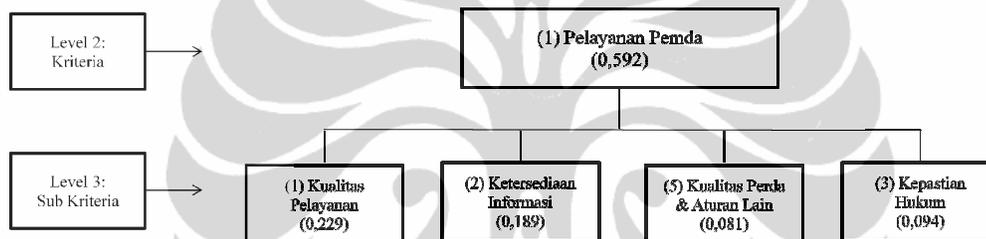
Melihat analisa perekonomian pada bagian sebelumnya, di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman termasuk memiliki kondisi perekonomian di atas rata-rata sehingga layak untuk dijadikan lokasi penanaman modal.

Kriteria terakhir yang mendapatkan nilai 6% adalah sumber daya manusia dan produktifitas. Walaupun dari data kondisi riil sumber daya manusia di Kabupaten Padang Pariaman kurang begitu memuaskan karena dari sisi produktifitas yang dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan, namun faktor ini bukanlah faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman. Bisa jadi ini disebabkan bahwa investor lebih mempertimbangkan murahness biaya

tenaga kerja dibandingkan tingkat produktifitas. Secara umum tidak terjadi perubahan berarti antara AHP dengan hasil survei pada kriteria sumber daya manusia dan produktifitas ini.

Pada kriteria faktor pelayanan pemerintah daerah ada empat sub kriteria yang menjadi faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu kualitas pelayanan, ketersediaan informasi, kualitas peraturan daerah & aturan lain serta kepastian hukum.

Pada penghitungan bobot global masing-masing elemen sub kriteria, keempat sub kriteria pelayanan pemerintah daerah menduduki posisi paling tinggi dibandin sub kriteria lainnya kecuali sub kriteria kualitas peraturan daerah pada poisisi kelima. Lebih jelasnya lihat Gambar 5.15.



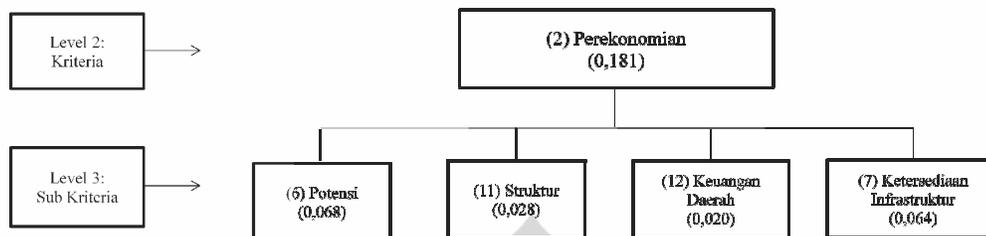
Gambar 5.15. Kriteria Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Melihat Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman

Dibanding dengan hasil survei ternyata persepsi responden dengan AHP terjadi perubahan yang cukup signifikan kecuali pada sub kriteria ketersediaan informasi. Pada survei, sub kriteria ketersediaan informasi dan kepastian hukum merupakan salah satu persepsi yang mendapat penilaian negatif tertinggi dari responden, masing-masing sebesar 71 dan 100%, sementara sub kriteria lainnya tidak terlalu dipersepsi responden.

Bobot prioritas paling tinggi dari sub kriteria pelayanan pemerintah daerah adalah kualitas pelayanan yang bernilai 22,9%, hal ini seiring dengan bobot kriteria pelayanan pemerintah daerah yang paling tinggi dari empat kriteria faktor penentu. Secara psikologis, investor menginginkan pelayanan yang memuaskan, profesional, tepat waktu, tepat aturan dan tepat biaya, sehingga sub kriteria kualitas pelayanan ini menjadi yang paling tinggi nilainya.

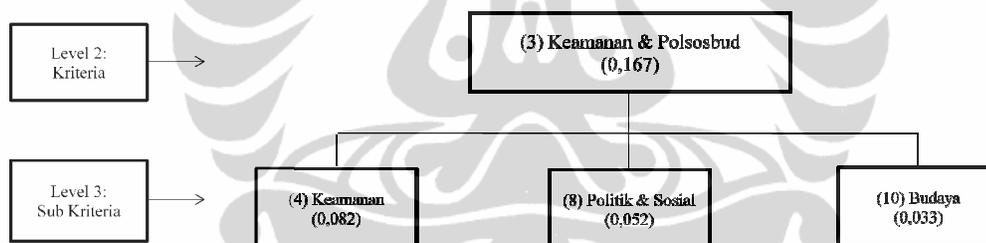
Kriteria dengan bobot prioritas kedua adalah perekonomian. Pada kriteria ini hanya dua sub kriteria yang menduduki posisi sepuluh teratas yaitu sub kriteria

potensi dan ketersediaan infrastruktur masing-masing pada posisi enam dan tujuh dengan bobot 6,8 dan 6,4%. Sementara sub kriteria struktur dan keuangan daerah menempati urutan 11 dan 12.



Gambar 5.16. Kriteria Perekonomian dalam Melihat Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman

Jika dilakukan perbandingan dengan hasil survei maka kriteria perekonomian memperlihatkan hubungan yang saling berkaitan dengan persepsi negatif terbesar dengan harapan yang dilihat dari analisa AHP terutama pada sub kriteria potensi dan ketersediaan infrastruktur yang mendapatkan nilai persepsi negatif 71 sampai dengan 100%. Lebih jelasnya lihat Gambar 5.17.

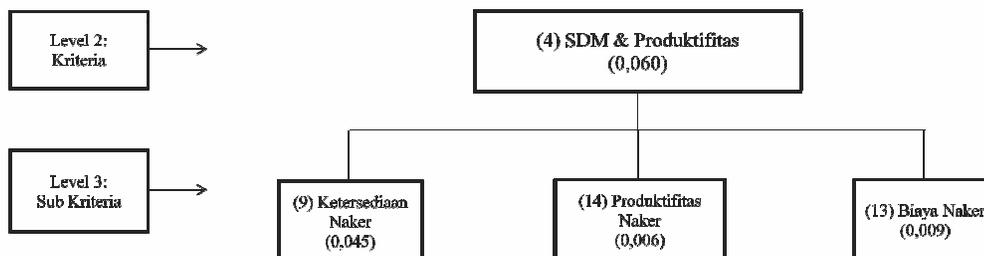


Gambar 5.17. Kriteria Keamanan, Politik, Sosial dan Budaya dalam Melihat Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman

Kriteria dengan bobot ketiga terbanyak adalah kriteria keamanan, politik, sosial dan budaya dengan bobot prioritas sebesar 16,7%. Pada kriteria ini, sub kriteria keamanan berada pada posisi keempat dalam besaran bobot prioritas yaitu sebesar 8,2%, sementara sub kriteria politik dan sosial serta budaya masing-masing berada di urutan kedelapan dan kesepuluh dari 14 sub kriteria yang dianalisa.

Apabila dibandingkan dengan hasil survei maka terlihat kesinambungan persepsi dalam survei dan hasil AHP khususnya sub kriteria kemanan. Pada hasil

survei persepsi keamanan nilai faktor keamanan mendapatkan persentase 67,35% disikapi negatif oleh responden. Lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 5.18.



Gambar 5.18. Kriteria SDM dan Produktifitas dalam Melihat Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi di Kabupaten Padang Pariaman

Kriteria terakhir mendapatkan bobot prioritas adalah kriteria SDM dan produktifitas. Pada kriteria ini terlihat perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan hasil survei terutama pada sub kriteria biaya tenaga kerja yang mendapatkan persepsi negatif 100% tetapi pada hasil AHP mendapatkan bobot paling rendah kurang 1%. Lebih jelas dapat dilihat Gambar 5.19.

5.2.2. Analisis Per Responden

Hal yang menarik dari kelima *expert* sebagai *stakeholder* dilihat dari Tabel 5.2. adalah terdapatnya perbedaan yang cukup mencolok dalam melihat faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman pada kriteria pelayanan pemerintah daerah.

Tabel 5.2. Analisis AHP per Bobot Elemen Faktor pada Level 3 Kriteria Pelayanan Pemerintah Daerah

Prioritas	Sintesa per Elemen dari Setiap Responden Expert					
	A	B	C	D	E	Rata-rata Ukur
<i>Kriteria Pelayanan Pemda</i>						
Kualitas Pelayanan	0,626	0,157	0,190	0,477	0,548	0,386
Ketersediaan Informasi	0,225	0,490	0,540	0,221	0,082	0,319
Kualitas Perda & Aturan Lain	0,076	0,093	0,120	0,119	0,092	0,136
Kepastian Hukum	0,074	0,260	0,150	0,183	0,278	0,159
<i>Inconsistency</i>	<i>0,090</i>	<i>0,090</i>	<i>0,100</i>	<i>0,060</i>	<i>0,090</i>	<i>0,020</i>

Sumber: Hasil survei persepsi investor terhadap iklim investasi Kabupaten Padang Pariaman dengan AHP, 2009.

Pada kriteria pelayanan pemerintah daerah ini, Bappeda dan dua orang pengusaha sama-sama memiliki prioritas terhadap kualitas pelayanan sementara

KPPT dan KPM lebih memprioritaskan ketersediaan informasi. Yang menarik adalah kedua instansi yang memprioritaskan ketersediaan informasi ini adalah ujung tombak pemerintah daerah dalam meningkatkan faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Kondisi ini bisa jadi disebabkan persepsi yang berbeda antara dua instansi ini dengan tiga responden lainnya dalam menilai kinerja instansi pelayanan penanaman modal dan perizinan. Menurut kedua instansi ini, kualitas pelayanan yang mereka berikan selama ini sudah optimal dibandingkan dengan informasi yang mereka sediakan.

Pada Tabel 5.3, dapat dilihat analisis AHP per bobot kriteria keamanan dan politik sosial budaya. Pada tabel terlihat bahwa pada sub kriteria keamanan mendapat bobot yang sama besar oleh kedua investor, yaitu 73,3 dan 73,1% sementara ketiga instansi pemerintah mengikuti dari belakang. Pada umumnya semua responden sepakat memberikan prioritas lebih kepada sub kriteria keamanan.

Tabel 5.3. Analisis AHP per Bobot Elemen Faktor pada Level 3 Kriteria Keamanan, Politik Sosial dan Budaya

Prioritas	Sintesa per Elemen dari Setiap Responden Expert					
	A	B	C	D	E	Rata-rata Ukur
<i>Sub Kriteria Keamanan & Politik Sosial Budaya</i>						
Keamanan	0,498	0,498	0,498	0,733	0,731	0,493
Politik dan Sosial	0,367	0,367	0,367	0,199	0,188	0,311
Budaya	0,135	0,135	0,135	0,068	0,081	0,196
<i>Inconsistency</i>	<i>0,090</i>	<i>0,090</i>	<i>0,90</i>	<i>0,090</i>	<i>0,060</i>	<i>0,050</i>

Sumber: Hasil survei persepsi investor terhadap iklim investasi Kabupaten Padang Pariaman dengan AHP, 2009.

Kriteria berikutnya adalah kriteria perekonomian. Kriteria ini mendapatkan bobot prioritas yang sangat variatif dari responden. Bappeda, KPM dan pengusaha memberikan prioritas tertinggi kepada sub kriteria ketersediaan infrastruktur sementara KPPT dan pengurus Kadin cenderung kepada sub kriteria potensi. Lebih jelasnya lihat Tabel 5.4.

Kondisi ini disinyalir sebagai persepsi yang berbeda dalam memandang faktor penentu daya tarik investasi dari berbagai responden tergantung kepada visi mereka terhadap usaha bisnis.

**Tabel 5.4. Analisis AHP per Bobot Elemen Faktor pada Level 3
Kriteria Perekonomian**

Prioritas	Sintesa per Elemen dari Setiap Responden Expert					
	A	B	C	D	E	Rata-rata Ukur
Sub Kriteria Perekonomian						
Potensi	0,292	0,369	0,292	0,617	0,256	0,377
Struktur	0,239	0,210	0,239	0,063	0,072	0,155
Keuangan Daerah	0,159	0,123	0,159	0,043	0,059	0,112
Ketersediaan Infrastruktur	0,311	0,298	0,311	0,277	0,613	0,356
<i>Inconsistency</i>	<i>0,090</i>	<i>0,070</i>	<i>0,090</i>	<i>0,090</i>	<i>0,070</i>	<i>0,070</i>

Sumber: Hasil survei persepsi investor terhadap iklim investasi Kabupaten Padang Pariaman dengan AHP, 2009.

Kriteria terakhir adalah kriteria SDM dan produktifitas. Pada kriteria ini semua pihak sepakat menyatakan bahwa ketersediaan tenaga kerja adalah prioritas utama dalam faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman. Lebih jelas lihat Tabel. 5.5.

**Tabel 5.5. Analisis AHP per Bobot Elemen Faktor pada Level 3
Kriteria SDM dan Produktifitas**

Prioritas	Sintesa per Elemen dari Setiap Responden Expert					
	A	B	C	D	E	Rata-rata Ukur
Kriteria SDM & Produktifitas						
Ketersediaan Naker	0,610	0,499	0,610	0,709	0,674	0,745
Produktifitas Naker	0,166	0,105	0,166	0,060	0,101	0,099
Biaya Naker	0,225	0,396	0,225	0,231	0,226	0,156
<i>Inconsistency</i>	<i>0,090</i>	<i>0,050</i>	<i>0,090</i>	<i>0,070</i>	<i>0,080</i>	<i>0,050</i>

Sumber: Hasil survei persepsi investor terhadap iklim investasi Kabupaten Padang Pariaman dengan AHP, 2009.

5.2.3. Analisis Sensitivitas

Hasil analisis AHP menunjukkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam melihat faktor-faktor penentuan daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman. Daftar pertanyaan dalam kuisisioner telah diisi oleh responden dari semua *stakeholder*. Kemudian diolah dengan program *Expert Choice* dengan tingkat inkonsistensi di bawah 10%, artinya dengan demikian hirarki kurang sensitive terhadap perubahan prioritas, sekalipun terjadi perubahan penilaian, perubahannya tidak terlalu besar.

Dari grafik pada Lampiran 9 terlihat jika prioritas sekarang adalah pelayanan pemerintah daerah dalam kriteria faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman maka yang menjadi alternatif pilihan kriteria selanjutnya berturut-turut adalah perekonomian, keamanan, politik sosial dan budaya dan SDM.

Jika kriteria keamanan, politik sosial dan budaya lebih dipentingkan maka akan meningkatkan bobot prioritasnya maka akan terjadi pada penurunan pada kriteria pelayanan pemerintah daerah, perekonomian dan SDM produktifitas, berturut-turut menjadi prioritas kedua, ketiga dan keempat.

Maka dengan hasil analisis sensitivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif kebijakan yang paling tepat harus diambil dalam menetapkan faktor-faktor penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman adalah keamanan, politik, sosial dan budaya terutama di sektor keamanan.

Dari pembahasan-pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan investasi di Kabupaten Padang Pariaman untuk jangka pendek pasca gempa bumi adalah memperbaiki infrastruktur fisik yang rusak akibat gempa bahkan menyediakan infrastruktur yang belum tersedia dan sangat dibutuhkan oleh investor seperti pelabuhan laut, terminal angkutan darat dan terminal bongkar muat barang. Selanjutnya memperbaiki pelayanan pemerintah daerah kaitannya dengan prosedur penanaman modal dan perizinan. Untuk mempercepat pemulihan kepercayaan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Padang Pariaman adalah memberikan fasilitas kemudahan berinvestasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan tahun 2007 cenderung mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan dengan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebagai penyumbang utama (12,17%).
2. Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share*, sektor-sektor dalam perekonomian Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki keunggulan komparatif selama tahun 2003 sampai dengan 2007 terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat dan Nasional pada umumnya sama kecuali Pertambangan & Penggalian dikomparatifkan dengan Nasional, yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Listrik, Gas & Air Bersih, Pengangkutan & Komunikasi dan Jasa-jasa. Sedangkan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor Pertanian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, Air Bersih; Pengangkutan dan Komunikasi.
3. Berdasarkan survei persepsi, yang dianggap paling positif ditanggapi responden adalah faktor infrastruktur fisik terutama jalan negara. Sedangkan yang dianggap paling negatif ditanggapi oleh responden adalah pelayanan pemerintah daerah. Kedua temuan ini sesuai dengan hasil AHP yang juga memberikan prioritas tertinggi untuk pelayanan pemerintah daerah dan ketersediaan infrastruktur fisik yang merupakan sub kriteria dari kriteria perekonomian.
4. Terdapat perbedaan antara hasil survei dengan analisa AHP pada faktor atau kriteria pelayanan pemerintah daerah atau dengan kata lain bahwa persepsi negatif pelayanan pemerintah daerah pada saat survei dilakukan, dijawab sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh

pemerintah daerah sebagai faktor utama penentu daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara pada kriteria keamanan terjadi perubahan dibandingkan dengan hasil survei. Persepsi responden pada survei menunjuk faktor politik sosial dan budaya sebagai persepsi negatif peringkat kedua sedangkan pada AHP menjadi prioritas ketiga.

5. Secara umum tidak terjadi perubahan berarti antara AHP dengan hasil survei pada kriteria sumber daya manusia dan produktifitas.

6.2. Saran dan Implikasi Kebijakan

Akibat yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi Sumatera Barat tanggal 30 Desember 2009 sangat besar baik yang diderita oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Pada konteks penanaman modal, usaha yang selama ini dibangun dalam rangka perbaikan iklim investasi menjadi hancur brantakan. Namun tidak ada kata menyerah dengan keadaan dalam memperbaiki dan menata kembali perekonomian Kabupaten Padang Pariaman khususnya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mempertimbangkan kondisi yang ada, penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah untuk:

1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk lebih memprioritaskan sektor-sektor pengembangan sektor-sektor potensial Kabupaten Padang Pariaman seperti pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; pengangkutan dan komunikasi; dan jasa-jasa.
2. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pemerintah daerah dalam proses penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan bisa dimotori oleh KPM sebagai pintu masuk pertama calon investor dengan menciptakan berbagai terobosan terutama dari segi kecepatan waktu pelayanan, kemudahan informasi, keringanan biaya dan prosedur lainnya. Bahkan kalau perlu memfasilitasi calon investor dengan kemudahan-kemudahan survei lapangan dan proposal pendirian perusahaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

3. Memperbaiki iklim investasi dengan memperbaiki faktor-faktor penentu daya tarik investasi lainnya seperti keamanan, infrastruktur fisik dan lain sebagainya. Faktor keamanan adalah faktor salah satu paling krusial di wilayah Kabupaten Padang Pariaman terutama dari segi pungutan-pungutan resmi maupun tidak resmi dari lembaga resmi maupun tidak resmi. Sedangkan infrastruktur fisik adalah menyediakan sarana prasarana yang belum tersedia seperti terminal angkutan darat, terminal bongkar muat barang dan pelabuhan laut.
4. Keterbatasan penelitian ini adalah karena terjadinya bencana gempa bumi yang menghambat dan merubah desain awal penelitian ini sehingga jumlah responden yang ditargetkan tidak terpenuhi. Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut pada waktu dan situasi yang sudah normal guna melihat kebijakan apa yang bisa diambil dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang rusak akibat gempa bumi dengan karakteristik dan persepsi investor yang telah disurvei dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, Dipo. (1992). *Aplikasi Metoda Ekonometrika, Dinamika Sistim dan Analisis Proses Hirarki*. Jakarta: PAU-EK-UI.
- Azis, Iwan Jaya. (1994). *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Dornbusch, Rudiger, Fischer, Stanley & Startz, Richard. (2001). *Macroeconomics*. (8th Edition). New York: McGraw-Hill.
- Dornbusch, Rudiger (1993). *Stabilization, Debt and Reform*. Harvester Wheatsheaf, Manchester.
- Gumpita. (2003). *Analisis Perekonomian dan Kebijakan Peningkatan Daya Tarik Investasi di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau*. Tesis. Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Imelda. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Daerah dan Hubungannya Terhadap Pembangunan Ekonomi Regional*. Tesis. Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kalo, Nita Yiswa Sampe. (2002). *Faktor-Faktor Penentu Investasi di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Berdasarkan Preferensi Investor*. Tesis. Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara. (1994). *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN.
- Mulyono, Sri. (1996). *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurcholish, Hanif. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Permadi S, Bambang. (1992), *AHP*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rasyid, Ryaas. (1997). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: P.T. Yarsif Watampone.
- Robi, Ningsih. (2006). *Strategi Memasarkan Kota Bekasi Berdasarkan Daya Tarik Investasi*. Tesis. Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Saaty, Thomas. (1991). *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Jakarta: PT. Pusaka Binaman Pressindo.
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William. (1990). *Ekonomi*. Terjemahan Jaka Wasana. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sitohang, Paul. (1990). *Pengantar Perencanaan Regional (Bagian Satu dan Dua)*. Terjemahan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, Sadono. (1995). *Pengantar Makro Ekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumantoro. (1995). *Pengantar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryana, Ahmad Syamsuddin, & Marsuki. (2007). *Iklm Investasi Daerah: Buku Panduan untuk Membangun Iklm Investasi di Daerah*. Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ).
- Suparmoko, M. (2002) *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Susanti, Hera, dkk. (2000). *Indikator-indikator Makroekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tanjung, Afniwaty. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Daerah (1999-2004)*. Tesis Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Today, Michael P. & Stephen C. Smith. (2004). *Economic Development. Ninth Edition*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Zein, Renaldi. (2003). *Persepsi Investor Asing Mengenai Iklm Investasi di Indonesia*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Perundang Undangan

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Buku Prosedur Tetap Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman tahun 2006.

Buku Pedoman Prosedur Pelayanan Perizinan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009.

Working Paper

Aritonang, Dinoroy. (2008). *Kebijakan Investasi Sebagai Bagian Pembangunan Ekonomi*. Tulisan yang dimuat dalam situs <http://www.scribd.com/doc/2413665/Kebijaka-investasi-dalam-hal-pembangunan-ekonomi-writing>

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan The Asia Foundation. Laporan Penelitian Tata Kelola Ekonomi Daerah, 2007.

Laporan Bank Dunia untuk Grup Konsultasi untuk Indonesia. (2006). *Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemulihan*. Jakarta: World Bank.

Setyawan, Anton Agus dan Fatchurrohman, *Investasi, Ekspor dan Masalah De-Industrialisasi di Indonesia*. Paper yang disampaikan dalam Seminar Nasional Akademik Tahunan Ekonomi I: “Perubahan Struktural dalam Rangka Penyehatan Ekonomi”, kerjasama Pascasarjana UI dan ISEI, Jakarta, 8-9 Desember 2004.

Suhendri. S., Jomi (2005). *Pentingkah Tanah Ulayat Diatur Dengan Perda?*. Artikel Harian Padang Ekspres tanggal 18 Oktober 2005.

Suwarno, Yogi dan M. Ikhsan. (2006). *Standar Pelayanan Publik di Daerah*. Tulisan yang dimuat dalam salah satu Bab pada *handbook* Manajemen Pemerintahan Daerah. Jakarta: PKKOD-LAN.

Tambunan. (2005). *Overview of Spatial Mapping on Investment and Local Economic Development in Indonesia*. Paper.

Williamson, Mont dan Qudri dalam Brahmantio. (2001). *Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya Terhadap Kondusifitas Iklim Usaha Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia: Laporan Penelitian*. Jakarta: Center for Economic and Social Studies (Cess).

Situs Resmi

<http://gempa.padangpariamankab.go.id> Pusat Informasi Gempa Kabupaten Padang Pariaman yang dimuat dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

<http://www.gatra.com/2002-08-19/artikel.php?id=19844>. *Tanah Ulayat Bukan Halangan Masuknya Investasi*. Padang, 19 Agustus 2002.





PETUNJUK UMUM

Bapak/Ibu Pelaku Usaha/Investor/Pemerhati Investasi yang saya hormati.

Daftar pertanyaan dalam kuisisioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau mendapat gambaran mengenai persepsi Bapak/Ibu terhadap segala sesuatunya yang berhubungan dengan iklim penanaman modal/investasi di wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini dilaksanakan oleh **Andri Satria Masri**, mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FEUI) untuk memperoleh bahan guna penyusunan tesis.

Bapak/Ibu dimohon kesediannya untuk menjawab pertanyaan dalam kuisisioner ini sebagaimana adanya. Setiap jawaban yang diberikan akan sangat berarti dan berguna bagi tercapainya tujuan penelitian ini.

Penelitian ini semata-mata hanya untuk kepentingan studi (ilmiah), oleh karena itu kerahasiaan identitas dan jawaban yang diberikan dijamin sepenuhnya, dan nama Bapak/Ibu tidak akan disebutkan dalam pengolahan dan penganalisaan data maupun hasil laporan penelitian ini.

Data dan saran-saran dari hasil penelitian ini diusahakan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten guna perbaikan iklim penanaman modal/investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu membantu survei ini.

Hormat Saya,

ANDRI SATRIA MASRI
PENELITI

Jawaban kuisisioner ini juga dapat dikirimkan kepada Peneliti melalui jasa pos dengan tujuan: **ANDRI SATRIA MASRI, d/a Korong Buluh Kasok, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman** atau via e-Mail: andri.masri@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Peneliti melalui Nomor Handphone: 0813-7400-1167

I. UNTUK KEPENTINGAN TABULASI MOHON DIISI DENGAN TULISAN ATAU BERI TANDA SILANG (X) SESUAI JAWABAN BAPAK/IBU PADA KOTAK YANG TERSEDIA

1. Nama Responden : _____
2. Jenis kelamin : L / P (Lingkari salah satu)
3. Umur : _____ tahun
4. Daerah Asal : _____
5. Alamat Usaha :
 a. Kab. Padang Pariaman : _____

 b. Luar Kab. Padang Pariaman : _____

6. Tingkat pendidikan terakhir:
 SD/Sederajat SLTP SLTA D1/D2/D3
 S1 S2/S3 Lainnya, sebutkan _____
7. Sektor usaha yang sedang dijalankan
 Perkebunan Peternakan Makanan Industri
 Lain-lain, sebutkan _____
8. Jabatan dalam usaha
 Direktur Utama Direktur _____
 Manajer _____ _____
9. Umur usaha yang sedang dijalankan
 < 1 tahun 1 s/d 5 tahun > 5 tahun Belum beroperasi
10. Peredaran usaha (omzet) yang sedang dijalankan (dalam rupiah)
 < 10 Juta 10 - 49 Juta 50 juta - 99 Juta
 1 - 49 Milyar 50 - 499 Milyar > 500 Milyar
11. Besarnya asset usaha sekarang (dalam rupiah)
 < 50 Juta 50 - 99 Juta 100 - 499 Juta
 500 Juta - 999 Juta > 1 Milyar
12. Lama hari pengurusan dokumen-dokumen usaha yang telah diperoleh
 a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) _____ hari
 b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) _____ hari
 c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO _____ hari
 d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) _____ hari
 e. Izin Lokasi _____ hari
 f. Sertifikat Tanah _____ hari
 g. Lain-lain, sebutkan _____ hari
13. Asal Tenaga Kerja:
 a. Dalam Kab. Padang Pariaman _____ orang
 b. Luar Kab. Padang Pariaman _____ orang
 c. Asing _____ orang

II. PETUNJUK PENGISIAN UNTUK PERTANYAAN A SAMPAI DENGAN H

Mohon dibaca pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, kemudian berilah jawaban yang sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu untuk setiap pertanyaan dengan memberi tanda X pada pilihan angka ① s.d ⑤.

Bapak/Ibu juga bisa menambahkan item pertanyaan pada ruang yang sengaja dikosongkan, apabila ada persepsi Bapak/Ibu yang belum tercakup dalam daftar pertanyaan yang diberikan.

Keterangan Pilihan Angka:

- ① berarti sangat baik / sangat membantu / sangat menguntungkan / sangat mudah / sangat murah
- ② berarti baik / membantu / menguntungkan / mudah / murah
- ③ berarti biasa saja / netral / ragu-ragu
- ④ berarti tidak baik / tidak membantu / tidak menguntungkan / tidak mudah / tidak murah
- ⑤ berarti sangat tidak baik / sangat tidak membantu / sangat tidak menguntungkan / sangat tidak mudah / sangat tidak murah

DAFTAR PERTANYAAN:

BAGAIMANA PERSEPSI BAPAK/IBU,

A. TENTANG PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

1.	Pelayanan aparatur Pemda berkenaan dengan pengurusan dokumen-dokumen usaha	① ② ③ ④ ⑤
2.	Kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal	① ② ③ ④ ⑤
3.	Ketersediaan informasi potensi dan peluang bisnis	① ② ③ ④ ⑤
4.	Kualitas informasi potensi dan peluang bisnis	① ② ③ ④ ⑤
5.	Kemudahan untuk memperoleh penjelasan dan menghubungi aparatur Pemda mengenai peraturan dan layanan penanaman modal	① ② ③ ④ ⑤
6.	Respon aparatur Pemda dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan seputar gangguan atau kendala usaha	① ② ③ ④ ⑤
7.	Tingkat pemahaman aparatur Pemda terhadap masalah dunia usaha	① ② ③ ④ ⑤
8.	Fasilitas kemudahan penanaman modal	① ② ③ ④ ⑤
9.	Pembinaan usaha dari Pemda	① ② ③ ④ ⑤
10.	Pengawasan usaha dari Pemda	① ② ③ ④ ⑤
11.		① ② ③ ④ ⑤

B. TENTANG PERATURAN DAN PENGURUSAN IJIN/DOKUMEN USAHA

1.	Kemudahan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	① ② ③ ④ ⑤
2.	Kualitas Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur prosedur penanaman modal atau berbisnis	① ② ③ ④ ⑤
3.	Penegakkan hukum atau konsistensi peraturan	① ② ③ ④ ⑤
4.	Kemudahan mengetahui prosedur/aturan yang berlaku	① ② ③ ④ ⑤
5.	Besaran biaya resmi pengurusan dokumen-dokumen usaha	① ② ③ ④ ⑤
6.	Pengenaan biaya di luar ketentuan resmi (pungli) dikaitkan dengan kenyamanan pengurusan dokumen-dokumen usaha dan dalam menjalankan proses usaha	① ② ③ ④ ⑤

7.	Kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh Pemda yang berhubungan secara langsung dengan usaha yang dijalankan	① ② ③ ④ ⑤
8.	Kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh Pemda yang berhubungan secara tidak langsung dengan usaha yang dijalankan	① ② ③ ④ ⑤
9.	Sosialisasi peraturan-peraturan baru dalam bidang penanaman modal atau perekonomian	① ② ③ ④ ⑤
10.		① ② ③ ④ ⑤

C. TENTANG INFRASTRUKTUR FISIK

1.	Pelabuhan udara	① ② ③ ④ ⑤
2.	Pelabuhan laut	① ② ③ ④ ⑤
3.	Terminal angkutan darat	① ② ③ ④ ⑤
4.	Terminal bongkar muat barang	① ② ③ ④ ⑤
5.	Listrik	① ② ③ ④ ⑤
6.	Air bersih	① ② ③ ④ ⑤
7.	Saluran telepon kabel (PSTN)	① ② ③ ④ ⑤
8.	Jaringan/signal telepon satelit (telepon selular)	① ② ③ ④ ⑤
9.	Jalan Negara	① ② ③ ④ ⑤
10.	Jalan Propinsi	① ② ③ ④ ⑤
11.	Jalan Kabupaten	① ② ③ ④ ⑤
12.	Jalan Kecamatan/Desa	① ② ③ ④ ⑤
13.		① ② ③ ④ ⑤

D. TENTANG BAHAN BAKU

1.	Ketersediaan bahan baku	① ② ③ ④ ⑤
2.	Kualitas bahan baku	① ② ③ ④ ⑤
3.	Nilai ekonomis bahan baku dibandingkan dengan daerah lain	① ② ③ ④ ⑤
4.	Akses memperoleh bahan baku	① ② ③ ④ ⑤
5.		① ② ③ ④ ⑤

E. TENTANG KEAMANAN

1.	Tingkat keamanan daerah dikaitkan dengan keamanan dan kenyamanan berusaha	① ② ③ ④ ⑤
2.	Tingkat keamanan daerah dihubungkan dengan prospek usaha dan pengembangan usaha	① ② ③ ④ ⑤
3.	Kemampuan aparat Pemda dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan usaha dengan masyarakat sekitar lokasi	① ② ③ ④ ⑤
4.	Peranan aparat kewan (Polri dan TNI) dalam menjaga kenyamanan berusaha	① ② ③ ④ ⑤
5.	Peranan perangkat pemerintah terendah (Nagari) dan atau kecamatan dalam menjaga kenyamanan berusaha	① ② ③ ④ ⑤
6.	Peranan tokoh masyarakat dalam menjaga kenyamanan berusaha	① ② ③ ④ ⑤

7.	Peranan pemuda dalam menjaga kenyamanan berusaha	① ② ③ ④ ⑤
8.		① ② ③ ④ ⑤

F. TENTANG PEREKONOMIAN

1.	Kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan prospek usaha	① ② ③ ④ ⑤
2.	Kestabilan makroekonomi daerah dikaitkan dengan keberlangsungan dan prospek usaha	① ② ③ ④ ⑤
3.	Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan skala ekonomi usaha dan lokasi pasar	① ② ③ ④ ⑤
4.	Kondisi geografis Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan skala ekonomi dan lokasi pasar	① ② ③ ④ ⑤
5.	Iklim (<i>climate</i>), suhu udara, curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan kenyamanan dan prospek usaha	① ② ③ ④ ⑤
6.	Pertumbuhan ekonomi daerah dikaitkan dengan prospek usaha	① ② ③ ④ ⑤
7.	Akses terhadap lembaga pendanaan/perbankan	① ② ③ ④ ⑤
8.	Akses memperoleh lahan usaha atau Hak Penguasaan Tanah	① ② ③ ④ ⑤
9.		① ② ③ ④ ⑤

G. TENTANG POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA

1.	Kondisi politik daerah dikaitkan dengan usaha	① ② ③ ④ ⑤
2.	Kapasitas dan integritas Kepala Daerah (Bupati) dalam menjamin kenyamanan berusaha	① ② ③ ④ ⑤
3.	Hubungan eksekutif-legislatif Kabupaten Padang Pariaman kaitannya dengan usaha	① ② ③ ④ ⑤
4.	Kondisi sosial kemasyarakatan dikaitkan dengan usaha	① ② ③ ④ ⑤
5.	Adat istiadat/budaya dikaitkan dengan usaha	① ② ③ ④ ⑤
6.	Aktivitas rutin sosial kemasyarakatan dikaitkan dengan kenyamanan usaha (mis: kewajiban membayar iuran goro atau ronda bagi pemilik usaha)	
7.	Aktivitas rutin kepemudaan dikaitkan dengan kenyamanan usaha (mis: kewajiban membayar iuran/sumbangan memperingati hari-hari besar)	① ② ③ ④ ⑤
8.	Pemahaman masyarakat terhadap dunia usaha dengan segala aturan dan prosedural yang berlaku di dalamnya	① ② ③ ④ ⑤
9.	Kewajiban donasi resmi baik yang ditetapkan mulai dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai Pemerintahan Nagari/Desa	① ② ③ ④ ⑤
10.	Donasi non resmi yang dipungut dan ditetapkan sepihak oleh oknum/kelompok masyarakat sekitar lokasi usaha	① ② ③ ④ ⑤
11.		① ② ③ ④ ⑤

H. TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA & PRODUKTIFITAS

1.	Ketersediaan tenaga kerja lokal	① ② ③ ④ ⑤
2.	Kualitas tenaga kerja lokal	① ② ③ ④ ⑤

3.	Peraturan ketenagakerjaan	①	②	③	④	⑤
4.	Biaya tenaga kerja lokal	①	②	③	④	⑤
5.	Kewajiban memakai tenaga kerja lokal/sekitar lokasi usaha	①	②	③	④	⑤
6.		①	②	③	④	⑤

III. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAN DI BAWAH INI:

1. Apa permasalahan umum yang dihadapi ketika saat pertama kali membuka usaha di Kabupaten Padang Pariaman?

2. Sewaktu akan memutuskan untuk menanamkan modal, faktor-faktor apa yang membuat Bapak/Ibu akhirnya mengambil keputusan untuk berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman?

3. Jelaskanlah, apa alasan mendasar Bapak/Ibu akhirnya memutuskan menanamkan modal/berusaha di Kabupaten Padang Pariaman?

7. Silakan tuliskan pendapat/komentar/tanggapan/persepsi Bapak/Ibu mengenai iklim investasi di Kabupaten Padang Pariaman selain yang belum disebutkan di atas?

8. Darimanakah Bapak/Ibu mengetahui informasi potensi unggulan Kabupaten Padang Pariaman (beri tanda silang x, boleh lebih dari 1)

<input type="checkbox"/> Televisi	<input type="checkbox"/> Pameran/Expo Investasi	<input type="checkbox"/> Pemda Sumbar
<input type="checkbox"/> Koran/Majalah	<input type="checkbox"/> Teman asal Kab. Pdg. Pariaman	<input type="checkbox"/> BKPM Sumbar
<input type="checkbox"/> Internet	<input type="checkbox"/> Aparat Pemkab Padang Pariaman	<input type="checkbox"/> BKPM Jakarta
<input type="checkbox"/> Teman lain	<input type="checkbox"/> Cari sendiri dari berbagai sumber	<input type="checkbox"/> _____

IV. BERILAH PERINGKAT TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN BERINVESTASI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DI BAWAH INI

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Peringkat
1. Pelayanan Pemerintah Daerah	
2. Peraturan Dan Pengurusan Ijin/Dokumen Usaha	
3. Infrastruktur Fisik	
4. Bahan Baku	
5. Keamanan	
6. Perekonomian	
7. Politik dan Sosial Budaya	
8. Sumber Daya Manusia dan Produktifitas	

V. TANDAILAH SEKTOR USAHA YANG PALING MENGUNTUNGKAN

Menurut Bapak/Ibu, sektor usaha apa yang **PALING** menguntungkan dijalankan di Kabupaten Padang Pariaman (boleh lebih dari 1 dengan memberi tanda urutan prioritas pada bagian sebelah kanan)

Sektor Usaha	Prioritas
1. Tanaman Bahan Makanan	
2. Tanaman Perkebunan	
3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	
4. Kehutanan dan Hasil-hasilnya	
5. Perikanan Darat	
6. Perikanan Laut	
7. Penggalian Bahan Tambang	
8. Makanan Basah dan Kering	
9. Minuman (Air Minum Dalam Kemasan)	
10. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	
11. Barang Kayu dan Hasil Hutan lainnya	
12. Kertas dan Barang Cetak	
13. Penyewaan Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	
14. Bangunan/Konstruksi	
15. Perdagangan Besar dan Eceran	
16. Hotel/Wisma/Penginapan	
17. Perumahan/Real Estate	
18. Restoran/Rumah Makan	
19. Angkutan Darat	
20. Angkutan Laut	
21. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
22. Bank	
23. Lembaga Keuangan bukan Bank	
24. Rumah Kontrakan/Kost	
25. Sewa Bangunan/Ruko	
26. Jasa Konsultasi, Advokat, Notaris	
27. Jasa Pelayanan Kesehatan, Dokter, Perawat	
28. Jasa Perawatan Tubuh (SPA)	
29. Hiburan dan Rekreasi	
30. Warung Telekomunikasi	
31. Warung Internet	
32. Lainnya, sebutkan:	

PENGANTAR

KUESIONER *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* (AHP) BAGI RESPONDEN EXPERT ATAS FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAYA TARIK INVESTASI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Daftar pertanyaan dalam kuisisioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau mendapat gambaran mengenai persepsi Bapak/Ibu terhadap segala sesuatunya yang berhubungan dengan iklim penanaman modal/investasi di wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini menggunakan analisis *Analytic Hierarchy Process* (AHP) sebagai metode yang dinilai cocok dalam upaya menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh *expert* (orang-orang yang memahami masalah-masalah dalam penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman) atas pemilihan berbagai macam alternatif kebijakan dalam rangka peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Bertolak dari pemikiran ini, maka para *expert* yang dipilih adalah para ahli dan praktisi yang berwenang dan memahami permasalahan investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Tujuan utama dari hasil pengolahan kuisisioner ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu daya tarik investasi yang nantinya dapat digunakan untuk menyusun prioritas kebijakan penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman ke depan.

Penelitian ini dilaksanakan oleh **Andri Satria Masri**, mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FEUI) untuk memperoleh bahan guna penyusunan tesis.

Data dan saran-saran dari hasil penelitian ini diusahakan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten guna perbaikan iklim penanaman modal/investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu membantu survei ini.

Hormat Saya,

ANDRI SATRIA MASRI
PENELITI

I. DATA RESPONDEN EXPERT

- 1. Nama Responden : _____
- 2. Instansi/Pekerjaan : _____
- 3. Alamat/Telepon : _____

II. PETUNJUK PENGISIAN

Kuesioner dalam pendukung analisis AHP. Adapun kuesioner yang digunakan adalah sistem ranking yang menilai besarnya pengaruh antara satu elemen faktor dengan lainnya. Dengan kata lain setiap responden *expert* dapat memilih jawaban yang berada di sisi kanan atau pun di sisi kiri menurut bobot kepentingan. Setiap responden memilih jawaban dengan membandingkan tingkat prioritas kepentingan antara 1 s/d 9 dari kedua elemen faktor dengan membubuhkan tanda (X) pada satu kolom bobot nilai tersebut dengan contoh sebagai berikut:

Conoh Pengisian:

Pilihan Faktor A									Pilihan Faktor B									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
← Lebih Penting A									●	→ Lebih Penting B								

Pilihan Faktor A									Pilihan Faktor B								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Jawaban: Lebih Penting A dengan Bobot 9
 Artinya, pilihan A “Lebih Penting 9 kali” dibanding Pilihan B.

Pilihan Faktor A									Pilihan Faktor B								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

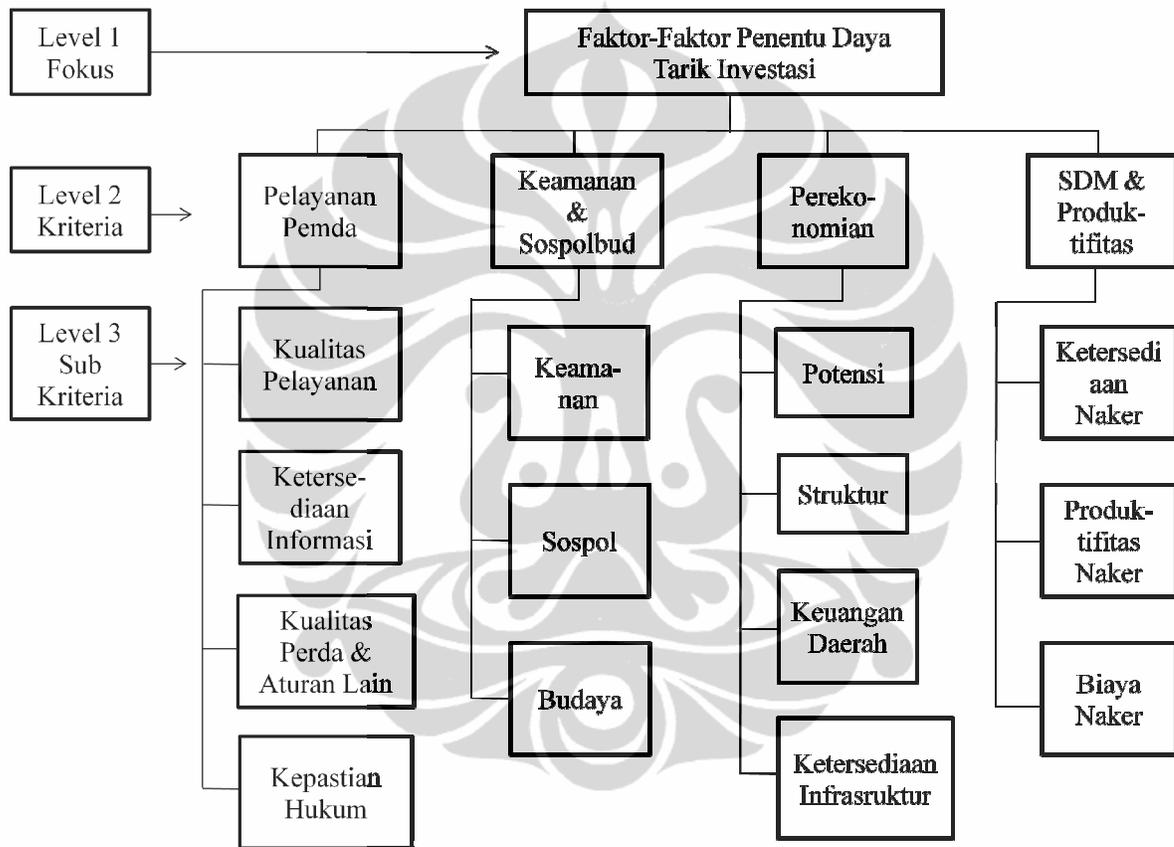
Artinya, pilihan A “Sama Pentingnya” dengan Pilihan B.

Bobot nilai yang dipakai dalam pertanyaan-pertanyaan ini diberikan definisi verbal sebagai berikut:

- Nilai Bobot = 1 artinya “Sama Pentingnya”
- Nilai Bobot = 3 artinya “Sedikit Agak Penting”
- Nilai Bobot = 5 artinya “Lebih Penting”
- Nilai Bobot = 7 artinya “Sangat Penting”
- Nilai Bobot = 9 artinya “Mutlak Penting”
- Nilai Bobot = 2, 4, 6 dan 8 “Ragu-ragu” dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7.

Struktur hierarki dalam bagan berikut terdiri dari jenjang tujuan atau *goal* (Level 1 Fokus) yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan daya tarik investasi di Kabupaten Padang Pariaman dan jenjang sub kriteria (Level 2 Kriteria) dari faktor-faktor yang menjadi masalah pada setiap kriteria faktor-faktor penentu daya tarik investasi.

HIERARKI AHP



Keterangan:

1. **Sospol (Sosial Politik)** = Kondisi sosial politik adalah keadaan di daerah yang merupakan hasil relasi antar pranata-pranata dalam satu sistem sosial di daerah, baik antar pranata politik dan pemerintahan, antar pranata sosial di masyarakat, maupun antar pranata formal dalam pemerintahan maupun antara elemen-elemen masyarakat. Beberapa aspek yang membentuk kondisi sosial politik daerah diantaranya adalah: keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya, konflik sosial antar kelompok masyarakat, stabilitas politik, dan kegiatan unjuk rasa.
2. **Budaya** = Budaya merupakan seperangkat ide atau gagasan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang mendasari atau mengilhami perilaku atau tindakan orang, baik secara individu maupun kolektif dari anggota kelompok tersebut. Yang diperlukan oleh investor yang akan masuk ke suatu daerah adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang terbuka terhadap masuknya dunia usaha, adanya kondisi

dimana masyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha. Selain keterbukaan, perilaku nondiskriminatif dari masyarakat setempat dengan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras, agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor. Etos kerja masyarakat, dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untuk berprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga menjadi pertimbangan investor untuk membuka usaha di suatu daerah. Bila masyarakat setempat mempunyai etos kerja yang baik maka akan memudahkan investor dalam rekrutmen pekerja tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat, khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidak mengganggu produktivitas usaha.

3. **Potensi** = masuknya dunia usaha, adanya kondisi dimana masyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha. Selain keterbukaan, perilaku nondiskriminatif dari masyarakat setempat dengan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras, agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor. Etos kerja masyarakat, dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untuk berprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga menjadi pertimbangan investor untuk membuka usaha di suatu daerah. Bila masyarakat setempat mempunyai etos kerja yang baik maka akan memudahkan investor dalam rekrutmen pekerja tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat, khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidak mengganggu produktivitas usaha.
4. **Struktur** = Nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, digunakan untuk melihat struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Basis struktur perekonomian terlihat dari kontribusi sektor-sektor ekonomi tertentu terhadap nilai bruto seluruh sektor yang ada di daerah tersebut (nilai tambah sektoral). Berdasarkan kontribusi sektoral tersebut dapat dilihat apakah struktur ekonomi daerah yang bersangkutan berbasis sumber daya alam (primer), sudah terbiasa dalam kegiatan ekonomi produktif dan industrialisasi (sekunder), dan pada perdagangan, jasa, dan perbankan (tersier). Indikator-indikator struktur ekonomi tersebut penting bagi investor untuk mengetahui kegiatan ekonomi yang telah berkembang di daerah yang bersangkutan.
5. **Keuangan Daerah** = Yang dimaksud Keuangan Daerah dalam penelitian ini adalah kebijakan, strategi, dan teknik yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memperoleh dana, serta pembelanjaan atau pengalokasian dana-dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi atau tugas pemerintahan yang diemban oleh pemda (pelayanan, pembangunan, dan lain-lain). Kebijakan pemerintah daerah dalam menggali dana dan mengelola dana yang telah mereka peroleh untuk peningkatan perekonomian daerahnya tersebut tertuang dalam APBD.
6. **Biaya Tenaga Kerja** = Yaitu tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gaji untuk pekerjanya. Pedoman normatif pengupahan yang ditetapkan pemerintah UMP/UMK menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam mengkalkulasi bisnisnya. Selain panduan normatif yang ada, investor juga membutuhkan 'pasar' upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan berupa upah yang sebenarnya diterima oleh para pekerja yang mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari UMP/UMK; asumsinya semakin kecil upah menjadi semakin menarik bagi investor.

Pertanyaan 1:

Dari beberapa faktor di bawah ini, manakah menurut Bapak/Ibu yang **paling penting** sebagai **Faktor Penentu Daya Tarik Iklim Investasi** di Kabupaten Padang Pariaman?

Penentu Daya Tari Investasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penentu Daya Tari Investasi
Pelayanan Pemda																		Keamanan & Sospolbud
Pelayanan Pemda																		Perekonomian
Pelayanan Pemda																		SDM & Produktifitas
Keamanan & Sospolbud																		Perekonomian
Keamanan & Sospolbud																		SDM & Produktifitas
Perekonomian																		SDM & Produktifitas

Pertanyaan 2:

Dari beberapa faktor **Pelayanan Pemda** di bawah ini, manakah menurut Bapak/Ibu yang **paling penting** sebagai **Faktor Penentu Daya Tarik Iklim Investasi** di Kabupaten Padang Pariaman?

Pelayanan Pemda	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pelayanan Pemda
Kualitas Pelayanan																		Ketersediaan Informasi
Kualitas Pelayanan																		Kualitas Perda & Aturan Lain
Kualitas Pelayanan																		Kepastian Hukum
Ketersediaan Informasi																		Kualitas Perda & Aturan Lain
Ketersediaan Informasi																		Kepastian Hukum
Kualitas Perda & Aturan Lain																		Kepastian Hukum

Lampiran 2. Kuisisioner *Analytic Hierarchy Process*

Pertanyaan 3:

Dari beberapa faktor **Keamanan & Sospolbud** di bawah ini, manakah menurut Bapak/Ibu yang **paling penting** sebagai **Faktor Penentu Daya Tarik Iklim Investasi** di Kabupaten Padang Pariaman?

Keamanan & Palsosbud	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Keamanan & Palsosbud
Keamanan																		Sosial Politik
Keamanan																		Budaya
Sosial Politik																		Budaya

Pertanyaan 4:

Dari beberapa faktor **Perekonomian** di bawah ini, manakah menurut Bapak/Ibu yang **paling penting** sebagai **Faktor Penentu Daya Tarik Iklim Investasi** di Kabupaten Padang Pariaman?

Perekonomian	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perekonomian
Potensi																		Struktur
Potensi																		Keuangan Daerah
Potensi																		Ketersediaan Infrastruktur
Struktur																		Keuangan Daerah
Struktur																		Ketersediaan Infrastruktur
Keuangan Daerah																		Ketersediaan Infrastruktur

Lampiran 2. Kuisisioner *Analytic Hierarchy Process*

Pertanyaan 5:

Dari beberapa faktor **SDM & Produktifitas** di bawah ini, manakah menurut Bapak/Ibu yang **paling penting** sebagai **Faktor Penentu Daya Tarik Iklim Investasi** di Kabupaten Padang Pariaman?

SDM & Produktifitas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM & Produktifitas
Ketersediaan Tenaga Kerja																		Produktifitas Tenaga Kerja
Ketersediaan Tenaga Kerja																		Biaya Tenaga Kerja
Produktifitas Tenaga Kerja																		Biaya Tenaga Kerja

SARAN-SARAN:

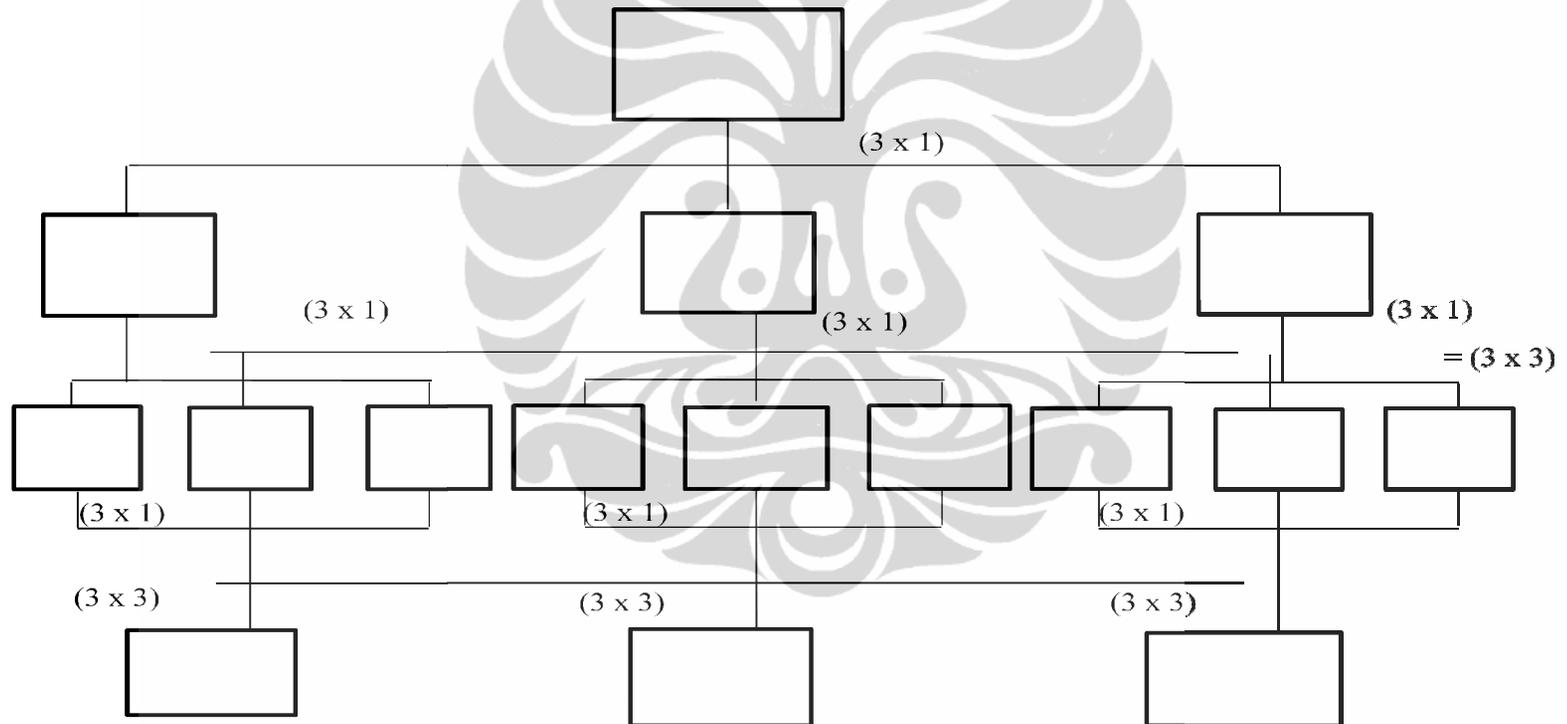
Lampiran 3: Diagram Operasi Matrik Hirarki Sempurna



Sumber: Bambang Permadi S. (1991). *AHP*. PAU-EK-UI. Hal 27

Lampiran 4: Diagram Operasi Matrik Hirarki Tidak Sempurna

Operasi Matrik Hirarki Tidak Sempurna



Sumber: Bambang Permadi S. (1991). *AHP*. PAU-EK-UI. Hal 29

Lampiran 5: Daftar PMA dan PMDN di Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2007

Nama Perusahaan PMA		Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US \$)	Keterangan (Kondisi)
1.	PT. Sumatera Tropical Spices	Industri bumbu masak & penyedap masakan	11.959,56	Produksi komersil
2.	PT. Coca Cola Amatil Indonesia	Industri minuman ringan	2.191,35	Produksi komersil
3.	PT. Padang Industrial Park	Kawasan industri	703,32	Produksi komersil
4.	PT. Usaha Inti Padang	Industri pengolahan inti sawit	16.029,94	Produksi komersil
5.	PT. Malenggang Alam	Industri air minum dalam kemasan	1.370,00	Produksi komersil (Macet)
6.	PT. Andalas Lumber Product	Industri pengolahan kayu	4.237,92	Produksi komersil (Macet)
7.	PT. Pariaman Lion Corn	Perkebunan jagung dan gandum	-	Persiapan pembangunan (Macet)
8.	PT. Waskita Colas	Industri aspal panas	-	Persiapan pembangunan (Macet)
9.	PT. Surya Malindo Fishery	Penangkapan ikan & penggaraman	226,97	Persiapan pembangunan (Macet)
10.	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Peternakan ayam & itik	367,19	Persiapan pembangunan
11.	PT. RCON Resources	Jasa penunjang pertambangan umum	-	Persiapan pembangunan
Jumlah			37.086,25	
Nama Perusahaan PMDN		Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Keterangan (Kondisi)
1.	PT. Jaya Sentrikon	Industri tiang beton	6.077,60	Produksi komersil
2.	PT. Prizaco Gasindo	Pengisian/pembotolan & pengangkutan LPG	12.933,86	Produksi komersil
3.	PT. Bumi Sarimas Indonesia	Industri minyak kasar (minyak makan dari nabati & hewani); berbagai macam tepung dari padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya; minuman ringan; pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran; susu; mie; kembang gula, roti dan sejenisnya.	172.039,62	Produksi komersil
4.	CV. Citra Dragon	Industri alat dan mesin pertanian	955,00	Produksi komersil
5.	PT. Nusantara Beta Farma	Industri farmasi	NA	Produksi komersil
6.	PT. Bumi Desantara	Pertambangan & pengolahan obsidian	-	Persiapan pembangunan (Macet)
7.	PT. Citra Mandiri Widia Nusa	Perkebunan kelapa sawit dan industrinya	-	Persiapan pembangunan (Macet)
8.	PT. Prizaco Indogas	Pengisian/pembotolan & pengangkutan LPG	-	Persiapan pembangunan (Macet)
9.	PT. Multiphala Agrinusa	Indusri pakan ternak	-	Persiapan pembangunan
10.	PT. Semesta Berjaya	Perkebunan tebu terpadu dgn industri gula	-	Persiapan pembangunan
Jumlah			192.006,08	

Sumber: Statistik Penanaman Modal Propinsi Sumatera Barat 2008 oleh BKPM Sumatra Barat dan Data Investasi/Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman tahun 2008 oleh Bagian Perekonomian Setdakab Padang Pariaman

Lampiran 6: Hasil Olah Data Karakteristik Responden dengan Bantuan Perangkat Lunak SPSS 12

Frequencies

		Statistics									
		Badan Hukum	Jenis Kelamin	Umur	Asal	Tingkat Pendidikan	Sektor Usaha	Jabatan	Jmur Usaha	Amzet Usaha	Aset Usaha
N	Valid	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		1,2857	1,1429	3,2381	1,1905	3,8095	4,2381	1,7143	2,8095	1,6190	1,3333
Median		1,0000	1,0000	3,0000	1,0000	3,0000	3,0000	1,0000	3,0000	2,0000	1,0000
Mode		1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00
Std. Deviation		,46291	,35857	,88909	,40237	1,07792	2,44754	1,48805	,40237	,66904	,48305
Skewness		1,023	2,202	-,045	1,700	,416	1,075	2,054	-1,700	,626	,763
Std. Error of Skewness		,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501
Minimum		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
Sum		27,00	24,00	68,00	25,00	80,00	89,00	36,00	59,00	34,00	28,00
Percentiles	25	1,0000	1,0000	2,5000	1,0000	3,0000	3,0000	1,0000	3,0000	1,0000	1,0000
	50	1,0000	1,0000	3,0000	1,0000	3,0000	3,0000	1,0000	3,0000	2,0000	1,0000
	75	2,0000	1,0000	4,0000	1,0000	5,0000	5,5000	1,5000	3,0000	2,0000	2,0000

Badan Hukum

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid CV	15	71,4	71,4	71,4
PT	6	28,6	28,6	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Asal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dalam Kab. Padang Pariaman	17	81,0	81,0	81,0
Luar Kab. Padang Pariaman	4	19,0	19,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	18	85,7	85,7	85,7
Perempuan	3	14,3	14,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTP	1	4,8	4,8	4,8
SLTA	10	47,6	47,6	52,4
D1/D2/D3	3	14,3	14,3	66,7
S1	6	28,6	28,6	95,2
S2/S3	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20 - 29	5	23,8	23,8	23,8
30 - 39	7	33,3	33,3	57,1
40 - 49	8	38,1	38,1	95,2
> 50	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Sektor Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Bengkel	2	9,5	9,5	9,5
Tekstil	1	4,8	4,8	14,3
Kontraktor	8	38,1	38,1	52,4
Biro Travel	4	19,0	19,0	71,4
Industri Alsintan	1	4,8	4,8	76,2
Konsultasn IT	1	4,8	4,8	81,0
Transportasi Darat	1	4,8	4,8	85,7
Stasiun Radio	1	4,8	4,8	90,5
Distributor Gas Alar	1	4,8	4,8	95,2
Perdagangan	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Umur Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 s/d 5 tahun	4	19,0	19,0	19,0
> 5 tahun	17	81,0	81,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Omzet Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 50 juta	10	47,6	47,6	47,6
50 - 100 juta	9	42,9	42,9	90,5
100 juta - 1 milya	2	9,5	9,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Direktur Utama	16	76,2	76,2	76,2
Direktur Personalia	1	4,8	4,8	81,0
Direktur Pemasaran	1	4,8	4,8	85,7
Manajer SDM	1	4,8	4,8	90,5
Manajer Umum	1	4,8	4,8	95,2
Manajer Pemasaran	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Aset Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 200 juta	14	66,7	66,7	66,7
200 juta - 10 milya	7	33,3	33,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Lampiran 7: Hasil Olah Data Persepsi Responden terhadap Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten Padang Pariaman dengan Bantuan Perangkat Lunak SPSS 12

Frequencies

		Statistics										
		Pelayanan aparatur Pemda berkenaan dengan pengurusan dokumen-usaha	Kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal	Ketersediaan informasi potensi dan peluang bisnis	Kualitas informasi potensi dan peluang bisnis	Pemda mengenai peraturan dan layanan penanaman modal	Kemudahan untuk memperoleh penjelasan dan menghubungi aparatur Pemda mengenai peraturan dan layanan penanaman modal	Respon aparatur Pemda dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan seputar gangguan atau kendala usaha	Tingkat pemahaman aparatur Pemda terhadap masalah dunia usaha	Facilitas kemudahan penanaman modal	Pembinaan usaha dari Pemda	Pengawasan usaha dari Pemda
N	Valid	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	3,5238	3,8095	4,1429	4,1429	3,9524	4,1429	3,9524	4,0952	3,8571	4,3810	
	Median	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	
	Mode	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	
	Std. Deviation	,98077	,81358	,72703	,72703	,66904	,72703	,66904	,83095	,85356	,80475	
	Skewness	-,952	-,851	-1,092	-1,092	-1,055	-1,092	-1,055	-,767	-,773	-,844	
	Std. Error of Skewness	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	
	Sum	74,00	80,00	87,00	87,00	83,00	87,00	83,00	86,00	81,00	92,00	
Percentiles	25	3,0000	3,5000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	3,5000	4,0000	
	50	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	
	75	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000	4,0000	5,0000	4,0000	5,0000	4,0000	5,0000	

Frequency Table

Pelayanan aparatur Pemda berkenaan dengan pengurusan dokumen-dokumen usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Baik	1	4,8	4,8	4,8
Baik	2	9,5	9,5	14,3
Ragu-ragu	5	23,8	23,8	38,1
Tidak Baik	11	52,4	52,4	90,5
Sangat Tidak Baik	2	9,5	9,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	3	14,3	14,3	23,8
Tidak Baik	13	61,9	61,9	85,7
Sangat Tidak Baik	3	14,3	14,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Ketersediaan informasi potensi dan peluang bisnis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tersedia	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Tersedia	13	61,9	61,9	71,4
Sangat Tidak Tersedia	6	28,6	28,6	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kualitas informasi potensi dan peluang bisnis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Baik	13	61,9	61,9	71,4
Sangat Tidak Baik	6	28,6	28,6	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kemudahan untuk memperoleh penjelasan dan menghubungi aparatur Pemda mengenai peraturan dan layanan penanaman modal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mudah	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	2	9,5	9,5	14,3
Tidak Mudah	15	71,4	71,4	85,7
Sangat Tidak Mudah	3	14,3	14,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Respon aparatur Pemda dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan seputar gangguan atau kendala usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Baik	13	61,9	61,9	71,4
Sangat Tidak Baik	6	28,6	28,6	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Tingkat pemahaman aparatur Pemda terhadap masalah dunia usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	2	9,5	9,5	14,3
Tidak Baik	15	71,4	71,4	85,7
Sangat Tidak Baik	3	14,3	14,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Pengawasan usaha dari Pemda

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	4	19,0	19,0	19,0
Tidak Membantu	5	23,8	23,8	42,9
Sangat Tidak Membantu	12	57,1	57,1	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Fasilitas kemudahan penanaman modal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tersedia	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	3	14,3	14,3	19,0
Tidak Tersedia	10	47,6	47,6	66,7
Sangat Tidak Tersedia	7	33,3	33,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Pembinaan usaha dari Pemda

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Membantu	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	3	14,3	14,3	23,8
Tidak Membantu	12	57,1	57,1	81,0
Sangat Tidak Membantu	4	19,0	19,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		Kemudahan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Kualitas Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur prosedur penanaman modal atau berbisnis	Penegakkan hukum atau konsistensi peraturan	Kemudahan mengetahui prosedur/aturan yang berlaku	Besaran biaya resmi pengurusan dokumen-dokumen usaha	Pengenaan biaya di luar ketentuan resmi (pungli) dikaitkan dengan kenyamanan pengurusan dokumen-dokumen usaha dan dalam menjalankan proses usaha	Kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh Pemda yang berhubungan secara langsung dengan usaha yang dijalankan	Kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh Pemda yang berhubungan secara tidak langsung dengan usaha yang dijalankan	Sosialisasi peraturan-peraturan baru dalam bidang penanaman modal atau perekonomian
N	Valid	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3,5714	3,2857	4,4286	3,9524	4,3810	4,8571	3,8095	3,2857	3,2381
Median		4,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000	4,0000	3,0000	3,0000
Mode		4,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	3,00	3,00
Std. Deviation		,87014	,56061	,50709	,80475	,80475	,47809	,81358	,56061	,62488
Skewness		-,493	1,920	,311	-1,182	-1,481	-3,530	-,851	,038	-,195
Std. Error of Skewness		,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501
Sum		75,00	69,00	93,00	83,00	92,00	102,00	80,00	69,00	68,00
Percentiles	25	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	3,5000	3,0000	3,0000
	50	4,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000	4,0000	3,0000	3,0000
	75	4,0000	3,5000	5,0000	4,0000	5,0000	5,0000	4,0000	4,0000	4,0000

Frequency Table

Kemudahan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mudah	3	14,3	14,3	14,3
Ragu-ragu	5	23,8	23,8	38,1
Tidak Mudah	11	52,4	52,4	90,5
Sangat Tidak Mudah	2	9,5	9,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kualitas Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur prosedur penanaman modal atau berbisnis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	16	76,2	76,2	76,2
Tidak Baik	4	19,0	19,0	95,2
Sangat Tidak Baik	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Penegakkan hukum atau konsistensi peraturan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Baik	12	57,1	57,1	57,1
Sangat Tidak Baik	9	42,9	42,9	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kualitas Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur prosedur penanaman modal atau berbisnis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	16	76,2	76,2	76,2
Tidak Baik	4	19,0	19,0	95,2
Sangat Tidak Baik	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kemudahan mengetahui prosedur/aturan yang berlaku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mudah	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	14,3
Tidak Mudah	14	66,7	66,7	81,0
Sangat Tidak Mudah	4	19,0	19,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Besaran biaya resmi pengurusan dokumen-dokumen usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mudah	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Mudah	8	38,1	38,1	47,6
Sangat Tidak Mudah	11	52,4	52,4	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Pengenaan biaya di luar ketentuan resmi (pungli) dikaitkan dengan kenyamanan pengurusan dokumen-dokumen usaha dan dalam menjalankan proses usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	1	4,8	4,8	4,8
Tidak Membantu	1	4,8	4,8	9,5
Sangat Tidak Membantu	19	90,5	90,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Sosialisasi peraturan-peraturan baru dalam bidang penanaman modal atau perekonomian

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	12	57,1	57,1	66,7
Tidak Baik	7	33,3	33,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh Pemda yang berhubungan secara langsung dengan usaha yang dijalankan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Menguntungkan	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	3	14,3	14,3	23,8
Tidak Menguntungkan	13	61,9	61,9	85,7
Sangat Tidak Menguntungkan	3	14,3	14,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh Pemda yang berhubungan secara tidak langsung dengan usaha yang dijalankan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Menguntungkan	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	13	61,9	61,9	66,7
Tidak Menguntungkan	7	33,3	33,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		Pelabuhan udara	Pelabuhan laut	Terminal angkutan darat	Terminal bongkar muat barang	Listrik	Air Bersih	Saluran Telepon (PSTN)	Jaringan/signal telepon satelit (telepon selular)	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Kecamatan/Desa
N	Valid	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		1,6667	5,0000	5,0000	5,0000	3,0952	2,1905	2,2381	2,0476	1,3810	1,6190	2,4762	4,1905
Median		2,0000	5,0000	5,0000	5,0000	3,0000	2,0000	2,0000	2,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000
Mode		2,00	5,00	5,00	5,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Std. Deviation		,57735	,00000	,00000	,00000	,62488	,60159	,62488	,49761	,49761	,58959	,87287	,81358
Skewness		,128				-,056	-,071	1,164	,130	,529	,298	-,169	-,996
Std. Error of Skewness		,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501
Sum		35,00	105,00	105,00	105,00	65,00	46,00	47,00	43,00	29,00	34,00	52,00	88,00
Percentiles	25	1,0000	5,0000	5,0000	5,0000	3,0000	2,0000	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000	2,0000	4,0000
	50	2,0000	5,0000	5,0000	5,0000	3,0000	2,0000	2,0000	2,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000
	75	2,0000	5,0000	5,0000	5,0000	3,5000	3,0000	2,5000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	5,0000

Frequency Table

Pelabuhan udara

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Baik	8	38,1	38,1	38,1
	Baik	12	57,1	57,1	95,2
	Ragu-ragu	1	4,8	4,8	100,0
	Total	21	100,0	100,0	

Pelabuhan laut

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Baik	21	100,0	100,0	100,0

Terminal angkutan darat

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Baik	21	100,0	100,0	100,0

Terminal bongkar muat barang

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Baik	21	100,0	100,0	100,0

Listrik

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	3	14,3	14,3	14,3
	Ragu-ragu	13	61,9	61,9	76,2
	Tidak Baik	5	23,8	23,8	100,0
	Total	21	100,0	100,0	

Air Bersih

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Baik	2	9,5	9,5	9,5
	Baik	13	61,9	61,9	71,4
	Ragu-ragu	6	28,6	28,6	100,0
	Total	21	100,0	100,0	

Saluran Telepon (PSTN)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Baik	1	4,8	4,8	4,8
	Baik	15	71,4	71,4	76,2
	Ragu-ragu	4	19,0	19,0	95,2
	Tidak Baik	1	4,8	4,8	100,0
	Total	21	100,0	100,0	

Jaringan/signal telepon satelit (telepon selular)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Baik	2	9,5	9,5	9,5
Baik	16	76,2	76,2	85,7
Ragu-ragu	3	14,3	14,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Jalan Kecamatan/Desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	2	9,5	9,5	14,3
Tidak Baik	10	47,6	47,6	61,9
Sangat Tidak Baik	8	38,1	38,1	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Jalan Negara

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Baik	13	61,9	61,9	61,9
Baik	8	38,1	38,1	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Jalan Propinsi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Baik	9	42,9	42,9	42,9
Baik	11	52,4	52,4	95,2
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Jalan Kabupaten

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Baik	3	14,3	14,3	14,3
Baik	7	33,3	33,3	47,6
Ragu-ragu	9	42,9	42,9	90,5
Tidak Baik	2	9,5	9,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		Ketersediaan bahan baku	Kualitas bahan baku	Nilai ekonomis bahan baku dibandingkan dengan daerah lain	Akses memperoleh bahan baku
N	Valid	21	21	21	21
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,8095	3,8571	4,0000	4,0952
Median		4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode		4,00	4,00	3,00(a)	5,00
Std. Deviation		,74960	,79282	,83666	,94365
Skewness		-,450	-,394	,000	-,599
Std. Error of Skewness		,501	,501	,501	,501
Sum		80,00	81,00	84,00	86,00
Percentiles	25	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
	50	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
	75	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000

a Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

Ketersediaan bahan baku

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	1	4,8	4,8	4,8
	Ragu-ragu	5	23,8	23,8	28,6
	Tidak Baik	12	57,1	57,1	85,7
	Sangat Tidak Baik	3	14,3	14,3	100,0
Total		21	100,0	100,0	

Kualitas bahan baku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	5	23,8	23,8	28,6
Tidak Baik	11	52,4	52,4	81,0
Sangat Tidak Baik	4	19,0	19,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Nilai ekonomis bahan baku dibandingkan dengan daerah lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	7	33,3	33,3	33,3
Tidak Murah	7	33,3	33,3	66,7
Sangat Tidak Murah	7	33,3	33,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Akses memperoleh bahan baku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Murah	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	5	23,8	23,8	28,6
Tidak Mudah	6	28,6	28,6	57,1
Sangat Tidak Mudah	9	42,9	42,9	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Frequency

Statistics

		Tingkat keamanan daerah dikaitkan dengan keamanan dan kenyamanan perusahaan	Tingkat keamanan daerah dihubungkan dengan prospek usaha dan pengembangan usaha	Tingkat keamanan daerah menyelesaikan sengketa yang melibatkan usaha dengan masyarakat sekitar lokasi	Kemampuan aparat Pemda dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan usaha dengan masyarakat sekitar lokasi	Peranan aparat keamanan (Poli dan TNI) dalam menjaga kenyamanan perusahaan	Peranan aparat keamanan pemerintah terendah (Nagari) dan atau kecamatan dalam menjaga kenyamanan perusahaan	Peranan tokoh masyarakat dalam menjaga kenyamanan perusahaan	Peranan pemuda dalam menjaga kenyamanan perusahaan
N	Valid Missing	21 0	21 0	21 0	21 0	21 0	21 0	21 0	21 0
Mean		3,8571	3,8571	4,2857	3,5714	3,5714	3,5238	3,5238	
Median		4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	3,0000	3,0000	
Mode		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	
Std. Deviation		,85356	,85356	,56061	,74642	,81064	,87287	,87287	
Skewness		-,773	-,773	,038	-,667	-,254	,169	,169	
Std. Error of Skewness		,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	
Sum		81,00	81,00	90,00	75,00	75,00	74,00	74,00	
Percentiles	25	3,5000	3,5000	4,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	
	50	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	3,0000	3,0000	
	75	4,0000	4,0000	5,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	

Frequency Table

Tingkat keamanan daerah dikaitkan dengan keamanan dan kenyamanan berusaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	3	14,3	14,3	23,8
Tidak Baik	12	57,1	57,1	81,0
Sangat Tidak Baik	4	19,0	19,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Tingkat keamanan daerah dihubungkan dengan prospek usaha dan pengembangan usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	3	14,3	14,3	23,8
Tidak Baik	12	57,1	57,1	81,0
Sangat Tidak Baik	4	19,0	19,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kemampuan aparat Pemda dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan usaha dengan masyarakat sekitar lokasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	1	4,8	4,8	4,8
Tidak Baik	13	61,9	61,9	66,7
Sangat Tidak Baik	7	33,3	33,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Peranan aparat keamanan (Polri dan TNI) dalam menjaga kenyamanan berusaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	6	28,6	28,6	38,1
Tidak Baik	12	57,1	57,1	95,2
Sangat Tidak Baik	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Peranan perangkat pemerintah terendah (Nagari) dan atau kecamatan dalam menjaga kenyamanan berusaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	7	33,3	33,3	42,9
Tidak Baik	10	47,6	47,6	90,5
Sangat Tidak Baik	2	9,5	9,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Peranan tokoh masyarakat dalam menjaga kenyamanan berusaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	9	42,9	42,9	52,4
Tidak Baik	7	33,3	33,3	85,7
Sangat Tidak Baik	3	14,3	14,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Frequency

Statistics

		Kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan prospek usaha	Kestabilan makroekonomi daerah dikaitkan dengan keberlangsungan dan prospek usaha	Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan skala ekonomi usaha dan lokasi pasar	Kondisi geografis Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan skala ekonomi dan lokasi pasar	Iklim (climate), suhu udara, curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan kenyamanan dan prospek usaha	Pertumbuhan ekonomi daerah dikaitkan dengan prospek usaha	Akses terhadap lembaga pendanaan/perbankan	Akses memperoleh lahan usaha atau Hak Pengusahaan Tanah
N	Valid Missing	21 0	21 0	21 0	21 0	21 0	21 0	21 0	21 0
Mean		4,0952	3,3333	4,1429	3,1429	2,7143	3,7143	4,0476	4,5238
Median		4,0000	3,0000	4,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
Mode		4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00
Std. Deviation		,70034	,79582	,72703	,79282	,56061	,64365	,66904	,81358
Skewness		-1,097	1,267	-1,092	,394	-,038	-,914	-1,159	-1,931
Std. Error of Skewness		,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501
Sum		86,00	70,00	87,00	66,00	57,00	78,00	85,00	95,00
Percentiles	25	4,0000	3,0000	4,0000	3,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000
	50	4,0000	3,0000	4,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
	75	4,5000	3,5000	5,0000	4,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000

Frequency Table

Kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan prospek usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Baik	14	66,7	66,7	76,2
Sangat Tidak Baik	5	23,8	23,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kestabilan makroekonomi daerah dikaitkan dengan keberlangsungan dan prospek usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	15	71,4	71,4	76,2
Tidak Baik	2	9,5	9,5	85,7
Sangat Tidak Baik	3	14,3	14,3	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan skala ekonomi usaha dan lokasi pasar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Menguntungkan	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Menguntungkan	13	61,9	61,9	71,4
Sangat Tdk Menguntungkan	6	28,6	28,6	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kondisi geografis Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan skala ekonomi dan lokasi pasar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Menguntungkan	4	19,0	19,0	19,0
Ragu-ragu	11	52,4	52,4	71,4
Tidak Menguntungkan	5	23,8	23,8	95,2
Sangat Tdk Menguntungkan	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Iklim (climate), suhu udara, curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan kenyamanan dan prospek usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Membantu	7	33,3	33,3	33,3
Ragu-ragu	13	61,9	61,9	95,2
Tidak Membantu	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Pertumbuhan ekonomi daerah dikaitkan dengan prospek usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	5	23,8	23,8	28,6
Tidak Baik	14	66,7	66,7	95,2
Sangat Tidak Baik	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Akses terhadap lembaga pendanaan/perbankan

	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Murah	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Mudah	15	71,4	71,4	81,0
Sangat Tidak Mudah	4	19,0	19,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Akses memperoleh lahan usaha atau Hak Penguasaan Tanah

	Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Murah	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Mudah	5	23,8	23,8	33,3
Sangat Tidak Mudah	14	66,7	66,7	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Statistics

Frequency

statistis

		Kondisi politik daerah dikaitkan dengan usaha	Kapasitas dan integritas Kepala Daerah (Bupati) dalam menjamin kenyamanan berusaha	Hubungan eksekutif-legislatif Kabupaten Padang Pariaman kaitannya dengan usaha	Kondisi sosial kemasyarakatan dikaitkan dengan usaha	Adat istiadat/budaya dikaitkan dengan usaha	Aktivitas rutin sosial kemasyarakatan dikaitkan dengan kenyamanan usaha (mis: kewajiban membayar iuran goro atau ronda bagi pemilik usaha)	Aktivitas rutin kepemudaan dikaitkan dengan kenyamanan usaha (mis: kewajiban membayar iuran/sumbangan memperingati hari-hari besar)	Pemahaman masyarakat terhadap dunia usaha dengan segala aturan dan prosedur yang berlaku di dalamnya	Kewajiban donasi resmi baik yang ditetapkan mulai dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai Pemerintahan Nagari/Desa	Donasi non resmi yang dipungut dan ditetapkan sepihak oleh oknum/kelompok masyarakat sekitar lokasi usaha
N	Valid	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3,8095	3,2857	3,5238	3,4286	3,3810	3,9524	3,9524	4,1905	4,8095	4,8571
Median		4,0000	3,0000	4,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000
Mode		4,00	3,00	4,00	3,00(a)	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
Std. Deviation		,74960	,78376	,51177	,59761	,80475	,58959	,58959	,40237	,40237	,47809
Skewness		,337	-1,265	-,103	-,476	,428	-1,619	-1,619	1,700	-1,700	-3,530
Std. Error of Skewness		,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501	,501
Sum		80,00	69,00	74,00	72,00	71,00	83,00	83,00	88,00	101,00	102,00
Percentiles	25	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000
	50	4,0000	3,0000	4,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000
	75	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000

a Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

Kondisi politik daerah dikaitkan dengan usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	8	38,1	38,1	38,1
Tidak Baik	9	42,9	42,9	81,0
Sangat Tidak Baik	4	19,0	19,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kapasitas dan integritas Kepala Daerah (Bupati) dalam menjamin kenyamanan berusaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Baik	1	4,8	4,8	4,8
Baik	1	4,8	4,8	9,5
Ragu-ragu	10	47,6	47,6	57,1
Tidak Baik	9	42,9	42,9	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Hubungan eksekutif-legislatif Kabupaten Padang Pariaman kaitannya dengan usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	10	47,6	47,6	47,6
Tidak Baik	11	52,4	52,4	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kondisi sosial kemasyarakatan dikaitkan dengan usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	10	47,6	47,6	52,4
Tidak Baik	10	47,6	47,6	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Adat istiadat/budaya dikaitkan dengan usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Membantu	2	9,5	9,5	9,5
Ragu-ragu	11	52,4	52,4	61,9
Tidak Membantu	6	28,6	28,6	90,5
Sangat Tidak Membantu	2	9,5	9,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Aktivitas rutin sosial kemasyarakatan dikaitkan dengan kenyamanan usaha (mis: kewajiban membayar iuran goro atau ronda bagi pemilik usaha)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Membantu	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Membantu	17	81,0	81,0	90,5
Sangat Tidak Membantu	2	9,5	9,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Aktivitas rutin kepemudaan dikaitkan dengan kenyamanan usaha (mis: kewajiban membayar iuran/sumbangan memperingati hari-hari besar)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Membantu	1	4,8	4,8	4,8
Ragu-ragu	1	4,8	4,8	9,5
Tidak Membantu	17	81,0	81,0	90,5
Sangat Tidak Membantu	2	9,5	9,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Donasi non resmi yang dipungut dan ditetapkan sepihak oleh oknum/kelompok masyarakat sekitar lokasi usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	1	4,8	4,8	4,8
Tidak Membantu	1	4,8	4,8	9,5
Sangat Tidak Membantu	19	90,5	90,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Pemahaman masyarakat terhadap dunia usaha dengan segala aturan dan prosedural yang berlaku di dalamnya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Membantu	17	81,0	81,0	81,0
Sangat Tidak Membantu	4	19,0	19,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kewajiban donasi resmi baik yang ditetapkan mulai dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai Pemerintahan Nagari/Desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Membantu	4	19,0	19,0	19,0
Sangat Tidak Membantu	17	81,0	81,0	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Frequency

Statistics

		Ketersediaan tenaga kerja lokal	Kualitas tenaga kerja lokal	Peraturan ketenagakerjaan	Biaya tenaga kerja lokal	Kewajiban memakai tenaga kerja lokal/sekitar lokasi usaha
N	Valid	21	21	21	21	21
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		2,7143	3,6667	3,6667	4,2381	4,2381
Median		3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Mode		2,00	4,00	4,00	4,00	5,00
Std. Deviation		,78376	,65828	,57735	,43644	,76842
Skewness		,576	,474	,128	1,327	-,453
Std. Error of Skewness		,501	,501	,501	,501	,501
Sum		57,00	77,00	77,00	89,00	89,00
Percentiles	25	2,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000
	50	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
	75	3,0000	4,0000	4,0000	4,5000	5,0000

Frequency Table

Ketersediaan tenaga kerja lokal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Murah	10	47,6	47,6	47,6
	Ragu-ragu	7	33,3	33,3	81,0
	Tidak Mudah	4	19,0	19,0	100,0
	Total	21	100,0	100,0	

Kualitas tenaga kerja lokal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	9	42,9	42,9	42,9
Tidak Baik	10	47,6	47,6	90,5
Sangat Tidak Baik	2	9,5	9,5	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Biaya tenaga kerja lokal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Murah	16	76,2	76,2	76,2
Sangat Tidak Membantu	5	23,8	23,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Peraturan ketenagakerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	8	38,1	38,1	38,1
Tidak Membantu	12	57,1	57,1	95,2
Sangat Tidak Membantu	1	4,8	4,8	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Kewajiban memakai tenaga kerja lokal/sekitar lokasi usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	4	19,0	19,0	19,0
Tidak Membantu	8	38,1	38,1	57,1
Sangat Tidak Membantu	9	42,9	42,9	100,0
Total	21	100,0	100,0	

Lampiran 8: Output Olahan Kuisisioner AHP dengan Bantuan Perangkat Lunak *Expert Choice 2000nd*

03/12/2009 22:13:55

Page 1 of 1

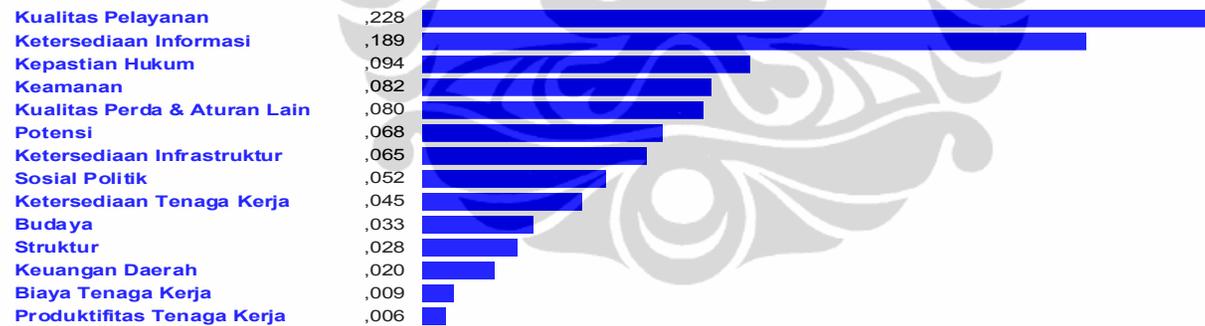
Model Name: Sintesa Global AHP Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kab

Synthesis: Summary

Synthesis with respect to:

Goal: Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten Padang Pariaman

Overall Inconsistency = ,03



Model Name: Sintesa Global AHP Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kab

Priorities with respect to:

Goal: Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupat...



Model Name: Sintesa Global AHP Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kab

Priorities with respect to:

**Goal: Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten
>Pelayanan Penda**

Kualitas Pelayanan
Ketersediaan Informasi
Kepastian Hukum
Kualitas Perda & Aturan Lain
Inconsistency = 0,02
with 0 missing judgments.



Model Name: Sintesa Global AHP Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kab

Priorities with respect to:

Goal: Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten
>Keamanan & Sospolbud

Keamanan
Sosial Politik
Budaya

Inconsistency = 0,05
with 0 missing judgments.

,493

,311

,196



Model Name: Sintesa Global AHP Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kab

Priorities with respect to:

Goal: Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten
>Perekonomian



Model Name: Sintesa Global AHP Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kab

Priorities with respect to:

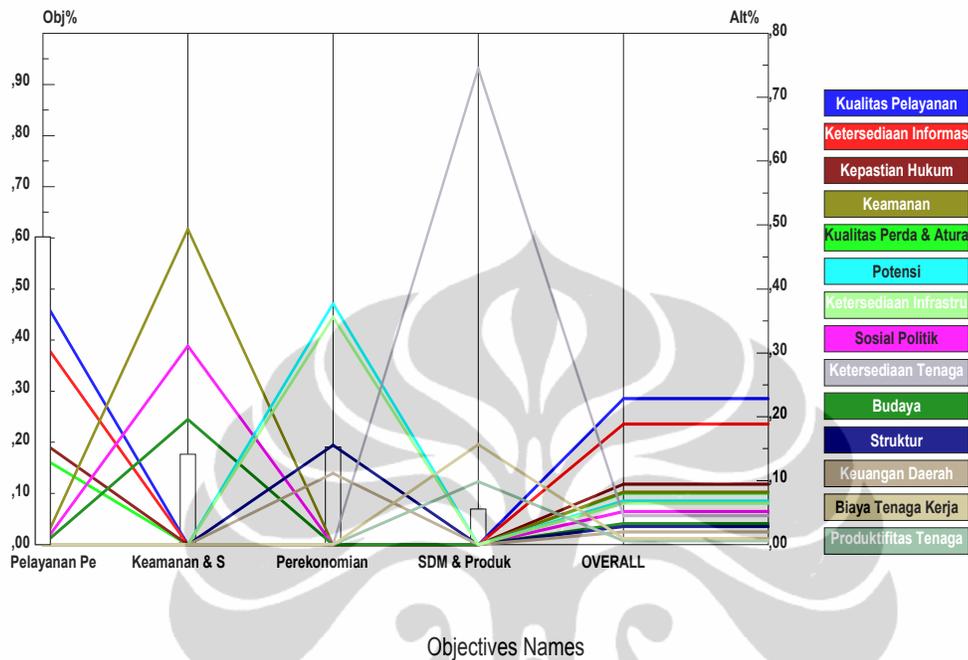
Goal: Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten
>SDM & Produktifitas

Ketersediaan Tenaga Kerja
Biaya Tenaga Kerja
Produktifitas Tenaga Kerja

Inconsistency = 0,05
with 0 missing judgments.



**Performance Sensitivity for nodes below: Goal: Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik
Investasi Kabupaten Padang Pariaman**



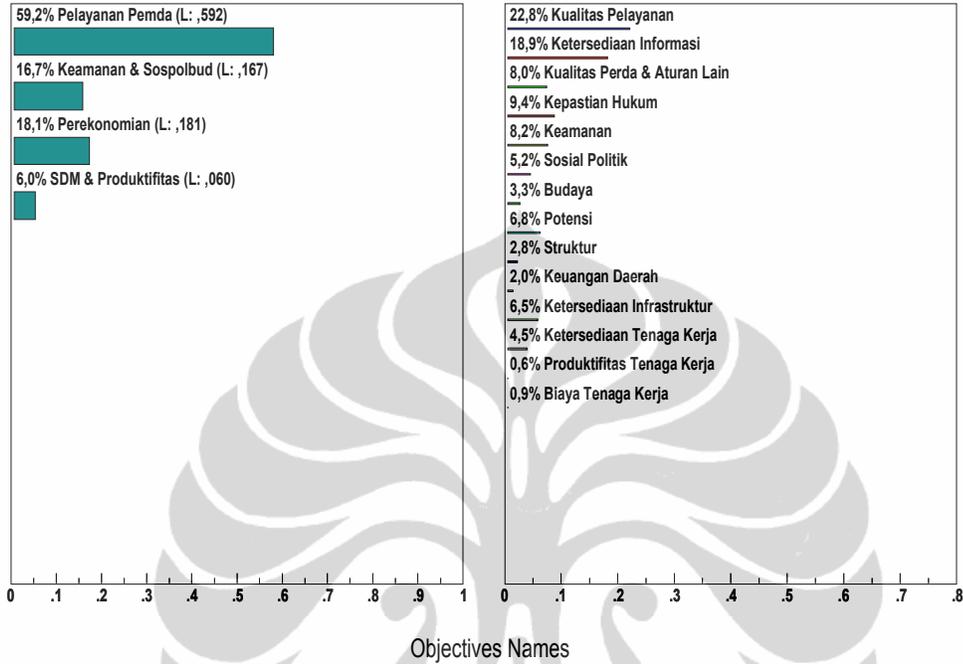
Objectives Names

Pelayanan Pe	Pelayanan Pemda (L: ,592)
Keamanan & S	Keamanan & Sospolbud (L: ,167)
Perekonomian	Perekonomian (L: ,181)
SDM & Produk	SDM & Produktifitas (L: ,060)

Alternatives Names

Kualitas Pel	Kualitas Pelayanan
Ketersediaan	Ketersediaan Informasi
Kualitas Per	Kualitas Perda & Aturan Lain
Kepastian Hu	Kepastian Hukum
Keamanan	Keamanan
Sosial Polit	Sosial Politik
Budaya	Budaya
Potensi	Potensi
Struktur	Struktur
Keuangan Dae	Keuangan Daerah
Ketersediaan	Ketersediaan Infrastruktur

**Dynamic Sensitivity for nodes below: Goal: Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik
Investasi Kabupaten Padang Pariaman**

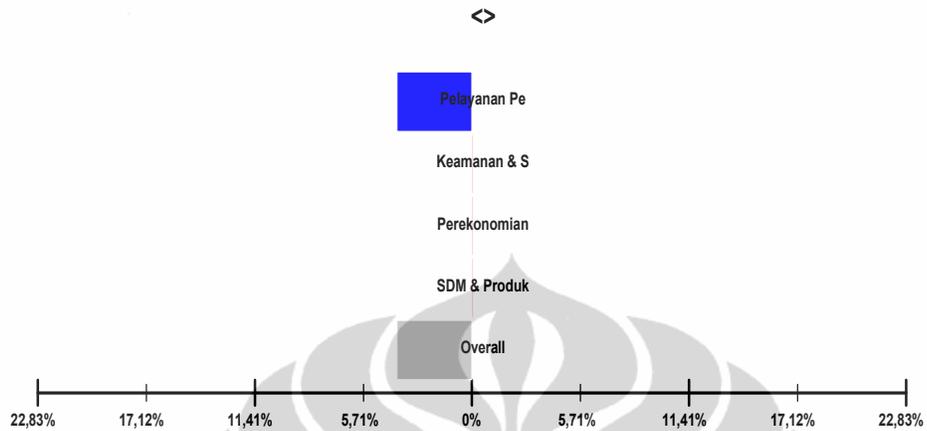


Pelayanan Pe	Pelayanan Pemda (L: ,592)
Keamanan & S	Keamanan & Sospolbud (L: ,167)
Perekonomian	Perekonomian (L: ,181)
SDM & Produk	SDM & Produktifitas (L: ,060)

Alternatives Names

Kualitas Pel	Kualitas Pelayanan
Ketersediaan	Ketersediaan Informasi
Kualitas Per	Kualitas Perda & Aturan Lain
Kepastian Hu	Kepastian Hukum
Keamanan	Keamanan
Sosial Polit	Sosial Politik
Budaya	Budaya
Potensi	Potensi
Struktur	Struktur
Keuangan Dae	Keuangan Daerah
Ketersediaan	Ketersediaan Infrastruktur

Weighted head to head between Kualitas Pelayanan and Ketersediaan Informasi



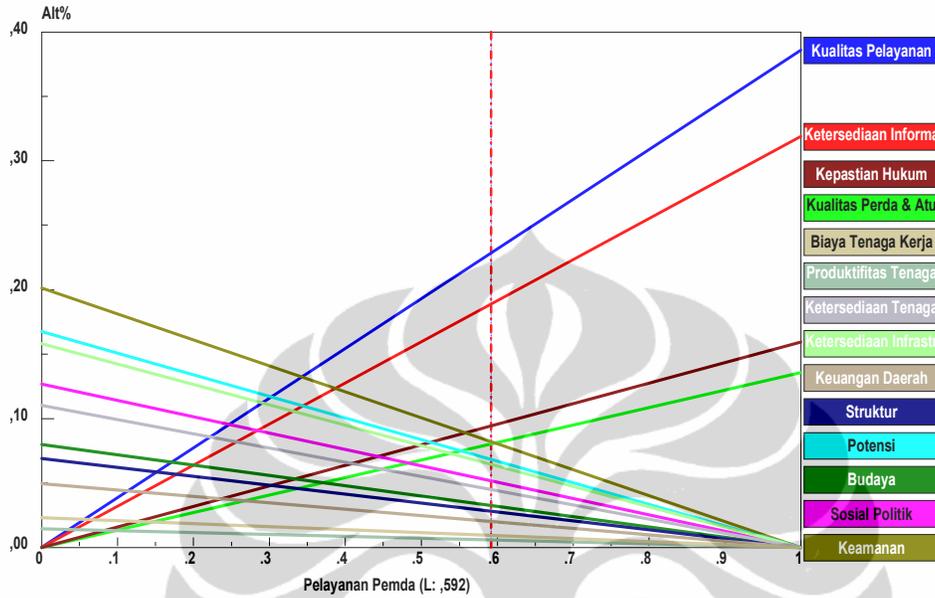
Objectives Names

Pelayanan Pe	Pelayanan Pemda (L: ,592)
Keamanan & S	Keamanan & Sospolbud (L: ,167)
Perekonomian	Perekonomian (L: ,181)
SDM & Produk	SDM & Produktifitas (L: ,060)

Alternatives Names

Kualitas Pel	Kualitas Pelayanan
Ketersediaan	Ketersediaan Informasi
Kualitas Per	Kualitas Perda & Aturan Lain
Kepastian Hu	Kepastian Hukum
Keamanan	Keamanan
Sosial Polit	Sosial Politik
Budaya	Budaya
Potensi	Potensi
Struktur	Struktur
Keuangan Dae	Keuangan Daerah
Ketersediaan	Ketersediaan Infrastruktur
Ketersediaan	Ketersediaan Tenaga Kerja
Produktifita	Produktifitas Tenaga Kerja
Biaya Tenaga	Biaya Tenaga Kerja

Gradient Sensitivity for nodes below: Goal: Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Kabupaten Padang Pariaman



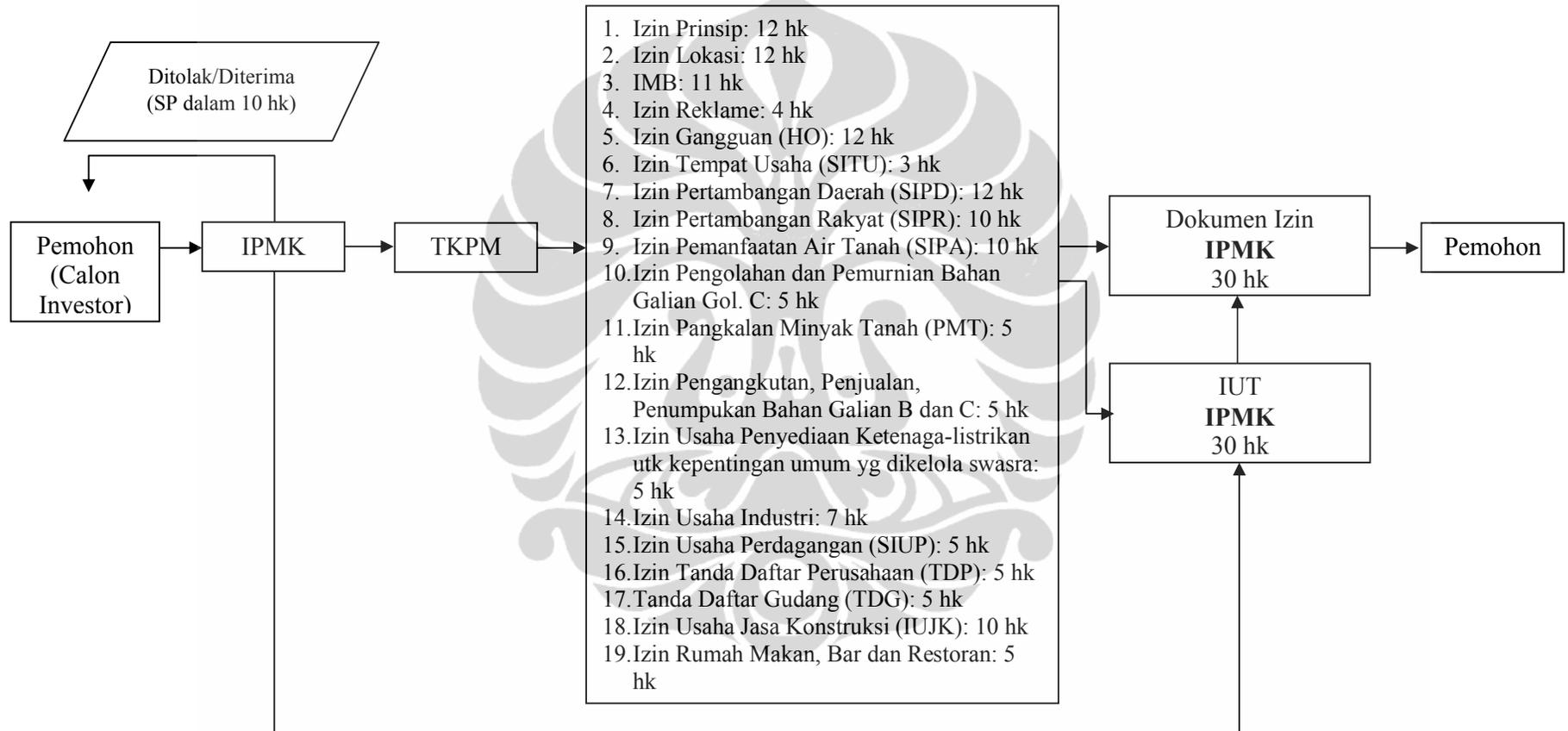
Objectives Names

Pelayanan Pe	Pelayanan Pemda (L: ,592)
Keamanan & S	Keamanan & Sospolbud (L: ,167)
Perekonomian	Perekonomian (L: ,181)
SDM & Produk	SDM & Produktifitas (L: ,060)

Alternatives Names

Kualitas Pel	Kualitas Pelayanan
Ketersediaan	Ketersediaan Informasi
Kualitas Per	Kualitas Perda & Aturan Lain
Kepastian Hu	Kepastian Hukum
Keamanan	Keamanan
Sosial Polit	Sosial Politik
Budaya	Budaya
Potensi	Potensi
Struktur	Struktur
Keuangan Dae	Keuangan Daerah

Lampiran 9: Alur dan Waktu Proses Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Prosedur tetap Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 tahun 2006



Sumber: Buku Prosedur Tetap Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman, diterbitkan oleh Bagian Perekonomian Setdakab Padang Pariaman, 2006 .